

Pendekatan Empat Sepuluh

SUKABINA Press


PERENCANAAN Pendidikan



Dr. Yahya, M.Pd

Perencanaan Pendidikan

Dr. Yahya, M.Pd.

Penerbit
 **SUKABINA Press**

Perencanaan Pendidikan

Sukabina Press, 2009

ISBN :978-602-8124-17-1

1 (Satu) Jilid :16.5x21.5 cm

235 hal

Ariel 11 pt

1. Pendidikan

2. Perencanaan

3. Sukabina Press

Hak cipta © 2009, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin foto copi, tanpa izin sah dari penerbit

Percetakan

Sukabina Offset

Penyusun

Dr. Yahya, M.Pd.

Editor Bahasa

Dr. Ngusman Abdul Manaf, M. Hum

Layout

Antonius Marbun

Desain Sampul

Darwin Marbun

Cetakan Pertama 2009

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Isi di luar tanggung jawab penerbit dan percetakan

Perencanaan Pendidikan

Perencanaan pendidikan adalah proses yang sistematis untuk menentukan tujuan, strategi, dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses ini melibatkan analisis situasi, penetapan prioritas, dan pengalokasian sumber daya yang efektif. Perencanaan pendidikan yang baik dapat memastikan bahwa lembaga pendidikan mampu menghadapi tantangan yang ada dan mempersiapkan generasi mendatang dengan kompetensi yang relevan.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NO 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA

PASAL 72
KETENTUAN PIDANA
SANKSI PELANGGARAN

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Perencanaan pendidikan merupakan ilmu yang sedang berkembang dan membutuhkan kajian. Oleh sebab itu, buku ini sengaja dibuat dalam rangka memperkaya khazanah tentang perencanaan pendidikan di tengah-tengah referensi yang sudah ada selama ini. Buku ini diharapkan sebagai pegangan bagi perencana pendidikan, mahasiswa, baik S1 maupun S2 yang mendalami ilmu kependidikan terutama manajemen pendidikan, guru, dan pemerhati pendidikan.

Buku ini memuat perencanaan pendidikan kontemporer yang dibagi dalam enam bagian utama yaitu bagian *pertama* adalah pendahuluan, yang mengkaji keterkaitan antara manajemen, perencanaan dan pendidikan. Bagian *kedua* memuat perencanaan pendidikan dari konteks sejarah. Bagian *ketiga* melihat perencanaan dari skop, level, dan jangka waktu. Bagian *keempat* menyuguhkan pendekatan perencanaan pendidikan dilihat dari aspek sosial, ketenaga kerjaan, biaya, analisis hierarki dan pendekatan sistem. Bagian *lima* memperkenalkan konsep "empat sepuluh". Konsep "empat" sebagai langkah awal perencana yang mempertanyakan tentang 1) di mana posisi sekarang yang akan dijawab oleh situasi saat ini; 2) kemana kita akan pergi yang dijawab melalui gambaran situasi pendidikan yang diharapkan; 3) bagaimana mencapainya akan dijawab melalui strategi pelaksanaan atau kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan; 4) apakah kita sudah sampai di sana akan dijawab melalui evaluasi dan kontrol. Konsep "sepuluh" memuat sepuluh langkah

perencanaan pendidikan, yaitu 1) analisis lingkungan; 2) pengumpulan dan pemaparan data; 3) mendefinisikan masalah; 4) menentukan visi, misi, dan tujuan; 5) membuat disain konseptual; 6) memformulasikan strategi pelaksanaan rencana; 7) pengalokasian sumber daya; 8) mengimplementasikan rencana; 9) mengevaluasi rencana; dan 10) memberi umpan balik dan rekomendasi. Bagian *keenam* adalah arah perencanaan pendidikan.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih membutuhkan analisis lebih lanjut serta kritikan dari teman-teman guna penyempurnaannya.

Maret 2009

Yahya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

BAB I MANAJEMEN, PERENCANAAN DAN PENDIDIKAN 1

- A. Pendahuluan 1
- B. Manajemen 3
- C. Perencanaan 8
- D. Pendidikan 12

BAB II PERENCANAAN PENDIDIKAN 20

- A. Perkembangan Perencanaan Pendidikan 20
- B. Perencanaan Pendidikan Sebagai Arah Kebijakan 24
- C. Arti Perencanaan Pendidikan 27
- D. Tujuan Perencanaan Pendidikan 36
- E. Acuan Dasar Perencanaan Pendidikan 39

BAB III SKOP, LEVEL DAN JANGKA WAKTU

PERENCANAAN PENDIDIKAN 42

- A. Skop Perencanaan Pendidikan 46
- B. Level Perencanaan Pendidikan 52
- C. Jangka Waktu Perencanaan Pendidikan 56

BAB IV PENDEKATAN PERENCANAAN PENDIDIKAN 60

- A. Pendekatan Sosial 60
- B. Pendekatan Ketenaga Kerjaan (*Man Power Approaches*) 64
- C. Pendekatan Keefektifan Biaya (*Invesment*)

Efficiency Approach) 69

- A. Pendekatan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) 74
- B. Pendekatan Sistem 75

BAB V LANGKAH PERENCANAAN PENDIDIKAN 84

- A. Menganalisis Lingkungan 90
- B. Pengumpulan dan Pemaparan Data 99
- C. Definisi Masalah 110
- D. Menentukan Visi, Misi dan Tujuan 119
- E. Disain Konseptual 134
- F. Formulasi Strategi Pelaksanaan 138
- G. Alokasi Sumber Daya 149
- H. Mengimplementasikan Rencana 157
- I. Mengevaluasi Rencana 166
- J. Umpan Balik dan Rekomendasi 174

BAB VI ARAH PERENCANAAN PENDIDIKAN 181

- A. Pemerataan dan Perluasan Akses 181
- B. Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing 188
- C. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik 192

DAFTAR PUSTAKA 199

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Contoh Perencanaan Tingkat Mikro Operasional 202

Lampiran 2 Penghitungan Indeks Pendidikan (APK, APM) 231

CONTENTS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

1992

BAB I MANAJEMEN, PERENCANAAN, DAN PENDIDIKAN

A. Pendahuluan

Kata manajemen dan perencanaan sering ditemukan dalam satu rangkaian konsep pengetahuan yang interaktif. Jika dalam suatu pendapat ada istilah manajemen, cenderung diikuti perencanaan sehingga ada anggapan manajemen tidak dapat dipisahkan dari perencanaan. Ada yang mengasumsikan bahwa istilah manajemen lebih besar dari pada perencanaan sebab berbagai literatur menceritakan perencanaan bagian fungsi dari manajemen. Keyakinan ini diperkuat sebab pada berbagai jurusan manajemen di perguruan tinggi selalu saja belajar perencanaan. Sebaliknya, ada yang berpendapat bahwa perencanaan lebih besar dari manajemen. Perencanaan selalu berorientasi masa depan yang membutuhkan pengelolaan, pengontrolan, dan penganggaran. Sementara pengelolaan atau manajemen berorientasi pemberdayaan (*empowering*) sumber-sumber.

Untuk pembahasan tentang manajemen dan perencanaan yang kontroversi di atas, dijelaskan bahwa istilah manajemen telah digunakan di Inggris hampir 2000 tahun yang lalu sebagai suatu pendekatan pengelolaan berbagai lembaga maupun organisasi. Oleh sebab itu, Inggris manajemen lebih luas penggunaannya. Di sisi lain, pada masa pergolakan sosial dan intelektual di zaman Plato dan Xenophon (*Lacedaonian*) telah mengenal perencanaan untuk kepentingan politik dan militer, sosial dan keagamaan yang digunakan untuk mempersiapkan sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan selanjutnya.

Khusus bagi Indonesia, kedua istilah itu masih sulit direduksi sebagai suatu definisi yang fokus sebab banyak lembaga-lembaga pemerintah yang memposisikan perencanaan itu dalam sebuah sistem atau sub sistem pemerintahan. Sebut saja Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) untuk tingkat nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Demikian halnya biro perencanaan atau bidang perencanaan pada level tertentu, seperti kepala biro perencanaan dan kepala bidang perencanaan. Sementara, seorang sarjana manajemen dapat direkrut untuk duduk pada salah satu jabatan yang ada pada lembaga-lembaga tersebut di atas.

Sehubungan dengan penggunaan dua istilah itu, dapat disimpulkan bahwa manajemen dan perencanaan itu adalah berada dalam satu kesatuan, tetapi berbeda posisi. Keduanya berada dalam satu sistem yang manajemen penekanannya pada pemberdayaan seluruh sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang di dalamnya termasuk perencanaan. Perencanaan berfokus pada tindakan menetapkan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, apa harus dikerjakan dan siapa yang mengerjakannya. Manajemen berada pada posisi yang lebih luas sebagai upaya memberdayakan seluruh elemen baik manusia, peralatan, anggaran secara sistematis, serta ada upaya kontrol dan evaluasi agar dapat mencapai tujuan. Perencanaan berada pada posisi di dalam manajemen yang digunakan untuk menentukan langkah-langkah pencapaian sesuai fokus masalah, waktu yang dibutuhkan serta sumber daya yang diperlukan.

Untuk mempermudah pemahaman tentang perencanaan pendidikan, dijelaskan secara umum tentang pengertian

manajemen, perencanaan dan pendidikan itu sendiri, yang pada bab-bab berikutnya akan di jelaskan secara lebih rinci.

B. Manajemen

Di dalam kehidupan sehari-hari manajemen dilihat sebagai proses pemecahan masalah terutama dalam perencanaan, rancangan, implementasi, pengendalian, evaluasi dan revisi, kemudian dilanjutkan dengan pendekatan sistem yang dilihat sebagai proses rancangan yang dijadikan alat manager. Berikut ini akan dipaparkan definisi sekaligus sebagai fungsi manajemen yang dihimpun dari definisi beberapa ahli yang populer dalam manajemen. Dari paparan ini diharapkan pembaca dapat membandingkan dan membuat kesimpulan atau definisi sendiri. Definisi yang disajikan terkesan berbeda satu dengan yang lain disebabkan oleh pandangan, keyakinan, pemahaman dan lingkungan para ahli.

Petama, Terry (1972:4), menjelaskan bahwa *"management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human beings and other resources"*. Maksudnya: manajemen adalah proses berbeda yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dipertunjukkan untuk menentukan dan menyelesaikan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan sumber-sumber daya manusia dan lainnya.

Kedua, Blanchard (1988:4), di samping ahli manajemen, Blanchard juga dikenal sebagai ahli organisasi, menjelaskan bahwa *"Management is a process of working with and through individuals and groups and other resources to accomplish organizational goals."* Artinya, manajemen adalah suatu proses bekerja dengan dan melalui individu-individu dan

kelompok-kelompok serta sumber-sumber daya lainnya untuk menyelesaikan tujuan-tujuan organisasi.

Ketiga, Mondy dan Premeaux (1995:6) mendefinisikan *"management is the process of getting things done, through the effort of other people"*. Maksudnya, manajemen adalah proses sesuatu selesai dikerjakan melalui upaya orang-orang lain.

Keempat, Prajudi Atmosudirdjo (1982:124) menjelaskan "Manajemen adalah pengendalian dan pemanfaatan daripada semua faktor dan sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja yang tertentu".

Kelima, Henry Fayol *"management is a process of planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling"*. Artinya manajemen itu berfungsi sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengkomandoan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Keenam, Urwick menjelaskan *"management is a distinct process consisting forecasting, planning, organizing, directing, coordinating, dan controlling"*. Maksudnya manajemen adalah suatu proses peramalan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan.

Ketujuh, Gregg menjelaskan *"management is decisionmaking, programming, stimulating, coordinating, influencing dan appraising"* Maknanya: manajemen adalah proses pengambilan keputusan, pemrograman, pensimulasian, mempengaruhi dan pembinaan.

Kedelapan, The Liang Gie menjelaskan *"management is a distinct process consisting . Planning, decision making, directing, coordinating, controlling, dan improving"*. Artinya manajemen adalah proses berbeda yang terdiri dari

perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengembangan.

Kesembilan, Mondy dan Premeaux mengatakan bahwa "*management is a distinct process consisting planning, organizing, influencing, dan controlling.* Maksudnya: manajemen adalah proses berbeda yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pemengaruhan, dan pengawasan.

Kesembilan ahli yang dijadikan referensi cenderung memberi defenisi yang secara tersirat mengarahkan manajemen sebagai suatu upaya pemberdayaan melalui suatu kerangka perencanaan, pembuatan keputusan, pelaksanaan, pengorganisasian, pemengaruhan, pengawasan, pengarahan dan pembiayaan.

Atas dasar beberapa definisi tersebut nampaklah perbedaan pandangan para pakar dalam memilih unsur-unsur apa yang perlu menunjang penyelesaian suatu pekerjaan atau masalah yang sedang dihadapi. Sampai sekarang pengertian manajemen sering dikaitkan dengan organisasi, tujuan organisasi, kerjasama dengan orang lain, serta dapat dicapai secara efisien dan efektif. Namun dalam kenyataan sehari-hari, ada kemungkinan pekerjaan itu dilakukan oleh seseorang dan bisa pula tanpa banyak bantuan dari orang lain. Akhir-akhir ini, faktor teknologi dan informasi sangat banyak menentukan keberhasilan manajemen. Artinya, dengan memperoleh informasi yang relevan, maka kita dapat memecahkan suatu masalah atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Oleh sebab itu, penulis mengemukakan definisi yang bisa menyangkut organisasi dan bisa pula pekerjaan yang dihadapi seseorang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah usaha-usaha memanfaatkan atau

memberdayakan sumber daya (*resources*) yang tersedia baik bersifat fisik dan non - fisik untuk mencapai tujuan lembaga maupun organisasi.

Dari definisi manajemen di atas terlihat ada tiga unsur yang sangat esensial yaitu *pertama* adalah sumber daya yang harus diberdayakan (*empowering*) secara maksimal yaitu: manusia, uang, peralatan, pendekatan atau metode, dan pasar. *Kedua* pemanfaatan atau pemberdayaan, di sinilah fungsi manajemen itu dituntut bagaimana agar seluruh sumber daya yang tersedia difungsikan dan diberdayakan maksimal melalui perencanaan, pengorganisasian, penganggaran, pelaksanaan, dan pengontrolan. *Ketiga* adalah tujuan lembaga atau organisasi.

Antara tujuan (*ketiga*) dan sumber daya yang tersedia (*pertama*) ada kalanya berubah posisi di dalam konsep berfikir atau saling melengkapi. Jika suatu lembaga ingin mencapai tujuan tertentu maka dibalik itu akan segera mengalisis apa sumber daya yang dibutuhkan. Artinya, tujuan dulu baru sumber daya. Sebaliknya, jika melihat sumber daya yang melimpah maka ini merupakan potensi yang harus diberdayakan, maka tujuan atau sasaran akan muncul.

Definisi yang dikemukakan diatas digambarkan sebagai berikut:



Diadaptasi dari Dachnel Kamaras 2005

Gambar 1. Proses Manajemen

Dari gambar di atas terlihat bahwa penghimpunan sumber daya manusia, modal, peralatan, uang, pendekatan apabila difungsikan dengan baik maka ini adalah cara yang paling efektif dalam mencapai tujuan. Manajemen merupakan upaya memadukan sumber daya serta memberdayakanya untuk mencapai tujuan.

Tiga fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan kontrol merupakan fungsi utama manajemen dan ini dianggap aliran manajemen tradisional. Kemudian manajemen modern menuntut adanya unsur behaviorisme yang berfungsi untuk menggugah semangat kemanusiaan yang dimasukkan dalam konteks pemimpin dan pengikut unsur kemanusiaan dimaksud yaitu motivasi,

kepemimpinan, perlakuan pada staf (Sikula, 1973).

Aliran manajemen tradisional yang hanya merencanakan, melaksanakan dan mengontrol merupakan fungsi manajemen yang sangat sederhana dan cenderung kurang efektif dalam pencapaian tujuan, tetapi dengan menambah unsur teori behaviorisme seperti bagaimana memimpin dan mempertimbangkan pengikut akan membentuk suasana yang lebih menarik. Di samping pendekatan behaviorisme, fungsi manajemen dalam pascamodern menghendaki adanya unsur spiritualisme. Ini sejalan dengan pendapat Steven Copy (1990) bahwa ada empat kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan psikologis, kebutuhan sosial, dan kebutuhan spiritual.

C. Perencanaan

Banyak pakar memandang bahwa perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pemotivasian (*motivating*) dan pengendalian (*controlling*) sebagai inti pembicaraan tentang manajemen. Ketiga proses ini dikenal dengan proses "tradisional" yang menggambarkan informasi, opini, dan kepercayaan yang sudah dimanfaatkan pada beberapa generasi. Walaupun ketiga fungsi manajemen ini relevan pada setiap level organisasi atau lembaga, namun tetap ingin disempurnakan dengan memasukkan teori kemanusiaan.

Perencanaan secara umum dapat diartikan sebagai proses penyusunan tujuan dan sasaran organisasi serta penyusunan peta kerja dan cara-cara kerja dalam mencapai tujuan dan sasaran. Jika sebuah rencana telah tersusun maka proses pengorganisasian menjadi sangat penting dan inilah kaitan yang sangat erat dengan manajemen.

Roger A. Kauffman, (1972) menjelaskan perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin. Dalam setiap perencanaan selalu terdapat tiga kegiatan yang meskipun dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya dalam proses perencanaan.

Mondy dan Premeaux (1995:138) menjelaskan bahwa "*planning is the process of determining in advance what should be accomplished and how it should be realized*". Maksudnya, perencanaan adalah proses penentuan untuk waktu yang akan datang, apa yang harus diselesaikan dan bagaimana hal itu dicapai. Namun demikian perencanaan perlu dilengkapi dengan dimana (tempat), bilamana (waktu) oleh siapa (tenaga), dan bagaimana cara-caranya, (Prajudi (1982).

Perencanaan adalah proses manajerial yang mencakup susunan dan serangkaian langkah-langkah untuk maksud mencapai beberapa tujuan. Perencanaan merupakan keputusan yang harus dilaksanakan. Perencanaan dibagi kedalam empat unsur, *Pertama*, perencanaan adalah proses. Sebagai suatu proses perencanaan adalah kegiatan yang bergerak maju dari satu titik ke titik berikutnya sesuai dengan urutannya. Perencanaan suatu konsep kegiatan yang orientik, dan statik, fleksibel, dan dinamik. *Kedua*, perencanaan berisikan serangkaian langkah-langkah. Serangkaian langkah-langkah ini ditunjukkan oleh metode ilmiah, metode kreatif atau pendekatan pemecahan masalah. *Ketiga*, perencanaan dibuat untuk suatu maksud. Serentetan atau serangkaian dari kegiatan mempunyai bermacam-macam sasaran atau tujuan, Biasanya sasaran atau tujuan dari suatu perencanaan adalah

tujuan dari rencana tersebut. *Keempat*, perencanaan berisikan kegiatan jasmani dan rohani. Walaupun biasanya perencanaan adalah inisiatif benda dan alam, pada umumnya langkah awal dalam proses perencanaan adalah membentuk jasmani dan konseptual

Sebagaimana dijelaskan bahwa perencanaan merupakan fungsi yang pertama manajemen yang perlu diperhatikan, karena kesalahan menyusun rencana akan berakibat beruntun pada fungsi atau langkah-langkah berikutnya. Secara ideal akan lebih baik, kalau sebelum rencana disusun, terlebih dahulu dilakukan penilaian (evaluasi) terhadap berbagai kegiatan yang pernah dilakukan. Dari penilaian tersebut, diperoleh data dan informasi yang kelak menjadi masukan dalam menyusun rencana. Kalau suatu rencana disusun tanpa data dan informasi yang mendukungnya, hal itu berarti kita menyusun rencana yang kasar, sehingga dalam pelaksanaannya nanti akan banyak mengalami hambatan. Walaupun begitu, adanya suatu rencana yang kasar jauh lebih baik dari pada tanpa rencana sama sekali jika kita melakukan berbagai kegiatan. Hasil kegiatan demikian bisa saja macam-macam dan bisa pula tidak sesuai dengan yang kita harapkan sebelumnya.

Merencanakan pada dasarnya menentukan kegiatan yang hendak dilakukan pada masa depan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengatur berbagai sumber daya agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Perencanaan juga bersifat dinamis karena sewaktu-waktu perlu dilakukan perbaikan dan penyesuaian dengan keadaan yang dihadapi. Oleh sebab itu, rencana yang telah disusun tidaklah berharga mati, tetapi fleksibel. Perencanaan bagi setiap organisasi perusahaan, pemerintahan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain, menduduki peranan yang penting,

karena ia menuntut tiap orang, tiap kelompok dan manajer dapat bekerja sesuai dengan rencana itu dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Perencanaan juga mempersiapkan arah kegiatan, mengurangi penyimpangan, dan perubahan yang diperlukan, meningkatkan produktivitas, memungkinkan manajer mengorganisasikan, memimpin dan mengontrol kegiatan yang mengarah pencapaian tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Perlunya suatu rencana sangat dirasakan oleh semua tingkat manajer, terutama bagi manajer tingkat tinggi.

Roger A. Kaufman (1975) menjelaskan bahwa perencanaan itu dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan. Kebutuhan ditetapkan dengan sifat terukur antara hasil yang dibutuhkan atau terukur dengan rencana yang dibuat. Penilaian kebutuhan memberikan data untuk identifikasi dan batasan kebutuhan serta menjadi prioritas utama dalam pembahasan. Kebutuhan, ketika telah dibuat akan memberikan informasi dasar untuk mendisain tujuan serta menjamin atas hasil yang lebih sesuai.

Perencanaan adalah proyeksi atas apa yang ditetapkan untuk reaksi tujuan valid dan bernilai. Termasuk unsur:

1. Mengidentifikasi dan mencatat kebutuhan.
2. Memilih kebutuhan yang tercatat menjadi prioritas aksi.
3. Spesifikasi terperinci atas hasil atau ketetapan yang dicapai untuk setiap kebutuhan terpilih.
4. Identifikasi kebutuhan untuk menemukan kebutuhan terpilih, termasuk spesifikasi batasan kebutuhan dengan pemecahan masalah.
5. Sekuensi hasil yang dibutuhkan untuk menemukan kebutuhan teridentifikasi.

Identifikasi strategi alternatif yang memungkinkan dan

alat untuk menetapkan kebutuhan menemukan setiap kebutuhan, termasuk daftar keuntungan dan kerugian setiap strategi dan alat.

D. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Dengan demikian, pada dasarnya, pendidikan itu adalah suatu usaha mentransformasikan ilmu, pengetahuan, ide, gagasan, norma, hukum, dan nilai-nilai kepada orang lain dengan cara tertentu, baik terstruktur formal, serta informal dan nonformal. Proses pentransferan ini bisa saja ada di rumah tangga, masyarakat, atau sekolah sebagai satuan pendidikan. Namun, ketiga satuan pendidikan tersebut bukanlah berdiri-sendiri, tetapi merupakan komponen yang saling melengkapi (*complementer*).

Pendidikan pada zaman peradaban Yunani dikonsepsikan sebagai proses penyiapan tiga tipe manusia sebagai warga pendukung terwujudnya negara ideal sebagaimana termaktub dalam buku "*Republika*" yang disusun oleh Plato (427-327 BC). Ketiga tipe manusia tersebut adalah 1) Pemikir, sebagai pengatur negara, 2) Kesatria, sebagai pengaman negara, dan 3) Pengusaha, sebagai penjamin kemakmuran dan kesejahteraan negara dengan segenap warganya. Pada saat itu, anak yang berusia sepuluh tahun diasramakan dan pendidikan diselenggarakan oleh negara. Seluruh peserta didik harus mengikuti pendidikan di Gymnasium hingga berusia 20 tahun yang diakhiri dengan

general examination. Mereka yang lulus terbaik disiapkan untuk menjadi kesatria dan pengusaha, sistem pendidikan tersebut oleh Butts (1955) dan Wil-Duran (1957) dinamai sistem pendidikan yang cenderung bernuansa demokratis.

Pendidikan pada zaman peradaban Romawi diidentifikasi sebagai proses penyiapan manusia terbaik sebagai orator, dialah para pemimpin negara dan masyarakat. Konsepsi ini termaktub dalam buku "*De Oratore*" oleh Cicero (106-43 BC) dan institutes of oratori oleh Quintilian (Abad I AD). Sistem pendidikannya tertuju kearah penguasaan "*Artes Liberales*" yang isinya gramat, rhetoric, history, civil law, dan philosophi. Pendekatan yang dilakukan pada dasarnya mengindahkan atau menghargai perbedaan individual peserta didik (*humanistis*), penguasaan bahasa asing merupakan keharusan. Sistem pendidikan bagi rakyat umumnya mengikuti model Yunani yang berfungsi sebagai pusat kekuasaan pemerintah. Sistem pendidikannya cenderung menonjolkan elitis-aristokratis. Guru yang dipercayakan mendidik putra bangsawan itu mendapat julukan sebagai gubernur.

Pada zaman abad pertengahan, pendidikan pada dasarnya dikonsepsikan sebagai proses penyiapan manusia untuk menjadi pengabdikan khaliknya (*The son of God, versi Kristiani; hamba Allah versi Islam*), meskipun hakikat pendidikan keduanya itu cenderung mirip, namun sistem pendekatannya berbeda. Dalam versi kristiani, selama hampir lima abad pertama zaman pertengahan itu substansi peradaban Yunani itu terlarang diajarkan, penyelenggaraan sistem pendidikan menjadi wewenang dan tanggung jawab otoritas keagamaan (Gereja). Para guru merupakan perangkat kelengkapan keagamaan, guru mata pelajaran umum diangkat dan harus mendapat "*Lisentia Docende Ubique*" dari otoritas keagamaan. Dipenghujung zaman itu, baru nama pelonggaran

dengan dibukanya bidang disiplin dan keahlian umum seperti hukum, kesehatan, dan sebagainya pada lingkungan Universitas. Secara umum, sistem pendidikannya masih bernuansa Aristokratis Elitis, pendidikan bagi warga masyarakat umumnya amat terbatas. Berlainan halnya dengan versi Islam, peradaban Yunani yang diidentifikasi sebagai Helenisme itu dipelajari dan dikembangkan, karena Islam menganjurkan mempelajarinya bahkan ilmu dari negeri Cina sekalipun, karena di zaman itu muncul ilmuan terkemuka seperti Ibnu Rusdi (Averos), Ibnu Sina (Avecinna), Al Gazali dan sebagainya yang diakui dan dihormati secara luas termasuk di dunia barat. Islam meletakkan tanggungjawab utama pendidikan itu ditangan para orang tua, proses pendidikan harus berlangsung sepanjang hayat, arah pendidikan anak harus diorientasikan kemasa depan yang berlainan dari zaman yang dialami oleh orang tuanya (Athiyah Aribasy, 1964; Butts 1955; dan Wil-Duran 1957).

Suatu proses pendidikan selalu berkaitan dengan kehidupan dan kondisi suatu masyarakat, sebab objek pendidikan itu sendiri adalah masyarakat yang dalam perkembangan dan pertumbuhannya tidak dapat dipisahkan dari sistem hidup itu sendiri. Masyarakat sebagai objek pendidikan dalam pertumbuhan tidaklah berubah ketika ia berada di suatu tempat dan kemudian berada di tempat lain. Semua proses hidup yang dilakoninya baik di rumah tangga, di masyarakat atau di sekolah akan mengisi skema dalam pikirannya dan itu akan mewarnai perilakunya. Artinya, bahwa apa yang telah termemori dalam pikirannya dari seluruh aspek kehidupan yang dilaluinya akan membentuk dirinya sebagai anggota masyarakat diwujudkan dengan cara berpikir, berbicara, bergaul, menganalisa, dan lain sebagainya.

Pendidikan sebagai bagian dari kehidupan sangat sulit

dipisahkan. Selanjutnya, kehidupan akan mempengaruhi perkembangan pendidikan dan pendidikan juga akan mempengaruhi perkembangan kehidupan dan ini suatu hal yang tidak dapat dipungkiri. Menurut Anwar (2003), masalahnya adalah status keilmuan tersebut. Dalam konteks ilmu ekonomi, manusia dipandang sebagai makhluk ekonomi yang memberi kepuasan sebesar-besarnya dan menjauhi ketidaknyamanan sebisa mungkin. Manusia juga dipandang sebagai makhluk *hedonis* yang berusaha mendapatkan keuntungan sebesar mungkin dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Tujuan ekonomi juga dapat dilihat sebagai telaa hubungan antara manusia dengan jasa yang ada untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari asumsi di atas, bidang garapan ilmu ekonomi terlihat seperti apa yang ada sekarang menggiring manusia menjadi individualis, kapitalis, bahkan kembali pada prinsip *homo homini lupus*. Konsep ini selalu diperbaiki sesuai dengan karakter bangsa dan keinginan suatu negara misalnya untuk Indonesia sering dikembangkan "ekonomi kerakyatan" dan bukan ekonomi kapitalis, dimana yang kuat sangat berkuasa.

Di sisi lain, ilmu pendidikan berasumsi bahwa manusia adalah individu sekaligus makhluk sosial yang memiliki etika. Manusia adalah makhluk yang dapat dididik (*animal educandum*) yang dapat mendidik (*animal educabil*) sekaligus makhluk yang tertuju kepada pendidikan (*antropus normativ*). Secara alamiah, manusia lahir dalam kondisi yang lemah atau tidak berdaya baik secara fisik maupun daya pikir. Dalam kondisi lemah manusia untuk mempertahankan hidup ingin tumbuh dan berkembang dan ditumbuhkembangkan. Pada saat inilah fungsi pendidikan menjadi sangat jelas yakni menumbuhkan serta mengembangkan anak didik agar menjadi dewasa dan matang dalam situasi tertentu. Adanya

interaksi orang dewasa dan yang belum dewasa melalui transformasi dan internalisasi akan menciptakan suasana pendidikan yang dikenal dengan aspek *pedagogis* (*epistemologi*). Proses pendidikan mentransfer, mentransformasi ilmu kepada anak didik adalah menjadi objek kajian ilmu pendidikan yang memadukan unsur sosiologi, psikologi (*ontologi*). Manfaatnya akan terlihat bagi anak didik sebagai orang yang berilmu, berpengetahuan, serta memiliki keterampilan (*aksiologi*).

1. Ilmu Pendidikan

Pada dasarnya, Ilmu pendidikan adalah mempelajari proses pembentukan kepribadian manusia dengan kegiatan belajar yang dirancang secara sadar dan sistematis dalam interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Menurut Rochman Natawijaya (1995), kepribadian adalah kondisi dinamis yang merupakan keterpaduan antara pola pikir, pola sikap, dan pola tindak individu. Pembentukan kepribadian mencakup proses transfer dan transformasi pengetahuan, sikap dan perlakuan mengenai aspek logika, etika dan estetika yang masing-masing terdiri dari unsur kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam mengkaji objek tersebut, ilmu pendidikan menyusun batang tubuh pengetahuan teoretis berdasarkan epistemologi keilmuan secara logis, analitis, sistematis, dan teruji dengan mengembangkan postulat, asumsi, prinsip dalam konsep pendidikan dengan bantuan teori-teori keilmuan di luar bidang pendidikan. Dalam mempelajari interaksi antara pendidik dengan peserta didik, dipengaruhi oleh unsur psikologis, sosial, dan budaya dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan. Tekanan tujuan pendidikan setelah pembentukan kepribadian yang mandiri.

Dalam kamus Webster's *New World Dictionary* (1962),

pendidikan dirumuskan sebagai proses pengembangan dan latihan yang mencakup aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan kepribadian (*character*), terutama yang dilakukan dalam suatu bentuk formula (persekolahan) kegiatan pendidikan mencakup proses dalam menghasilkan (*production*) dan transfer (*distribution*) ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh individu atau organisasi belajar (*learning organization*). Organisasi belajar dimaksud dapat tercapai dari lembaga-lembaga pemerintah atau swasta, tingkat dasar, menengah, dan pendidikan tinggi.

2. Faktor-Faktor yang Terkait dalam Pendidikan

Pendidikan bukanlah berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu sistem yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Bertolak dari landasan filosofis, psikologis, dan sosial budaya dan nilai-nilai yang menjadi acuan, ilmu pendidikan yang membentuk batang tubuh ilmu bergantung pada komponen-komponen sebagai berikut ini.

a. Peserta Didik

Peserta adalah anak manusia sebagai input yang akan dididik serta memiliki kekurangan dan kelebihan. Di dalam kelas diperlakukan dengan pendekatan yang sama namun seharusnya tidak melepaskan perbedaan yang faktor bawaan anak manusia.

b. Kurikulum

Kurikulum merupakan komponen ilmu pendidikan yang berkenaan dengan tujuan dan bahan acuan interaksi, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit/tersembunyi. Teori-teori yang dikembangkan dalam komponen ini meliputi, antara lain, teori tentang tujuan pendidikan, organisasi kurikulum, isi

kurikulum, dan modul-modul pengembangan kurikulum.

c. Belajar

Belajar merupakan komponen ilmu pendidikan yang berkenaan dengan proses pelaksanaan interaksi ditinjau dari sudut peserta didik. Teori-teori yang dikembangkan dalam komponen ini meliputi, antara lain, teori tentang karakteristik peserta didik, jenis-jenis belajar, cara-cara belajar, hierarki, jenis-jenis, dan kondisi-kondisi belajar.

d. Mendidik dan Mengajar

Mendidik dan mengajar merupakan komponen ilmu pendidikan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan interaksi ditinjau dari sudut pendidik. Teori-teori yang dikembangkan dalam komponen ini meliputi, teori tentang karakteristik pendidik, karakteristik pembuatan pendidikan dan mengajar, metode dan teknik mendidik, dan mengajar dan sistem pengolahan kelas. Sebagai upaya mendidik, dan membelajarkan ungkapan Dorothy tepat untuk disimak dan dipahami.

Syair Dorothy Law Nottle, 1945

- Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki
- Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi
- Jika anak dibesarkan dengan cemoohan anak belajar rendah diri
- Jika anak dibesarkan dengan hinaan ia belajar menyesali diri
- Jika anak dibesarkan dengan toleransi ia belajar menahan diri
- Jika anak dibesarkan dengan dorongan percaya diri
- Jika anak dibesarkan dengan pujian ia belajar menghargai

- Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan dia belajar menemukan cinta dalam kehidupan

e. Lingkungan Pendidikan

Lingkungan pendidikan berkenaan dengan situasi tempat interaksi belajar-mengajar berlangsung. Teori yang berkaitan dengan lingkungan pendidikan adalah perencanaan pendidikan, manajemen pendidikan bimbingan konseling, kebijakan pendidikan (daktik), dan ekonomi pendidikan.

f. Evaluasi Pendidikan

Evaluasi berkenaan dengan prinsip, mental, teknik, dan prosedur dengan cara-cara bagaimana mengenai pencapaian tujuan pendidikan. Sejauh mana kualitas program dan proses pendidikan yang bermutu telah tercapai. Teori-teori yang dikembangkan dalam komponen ini mencakup teori tentang model-model penilaian, metode dan teknik, serta instrumen penilaian.

BAB II

PERENCANAAN PENDIDIKAN

A. Perkembangan Perencanaan Pendidikan

Sejarah perencanaan pendidikan sama umurnya dengan pendidikan itu sendiri. Sadar atau tidak ketika pendidikan itu dibuat di dalamnya sudah ada konsep perencanaan, hanya saja si penggagas pendidikan tidak memahami bahwa pemikiran, ide dan gagasan yang dibuat adalah sebuah rencana. Ide dan pemikiran yang ada selama ini juga tidak dibuat secara sistematis, terprogram apa lagi terdokumentasi secara baik, sehingga sulit dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan berikutnya.

Perencanaan pendidikan itu mulai dimaknai ketika sesuatu dibutuhkan untuk tujuan tertentu yang melibatkan keterampilan dan pengetahuan manusia. Kebutuhan tertentu itulah menjadi satu tujuan atau sasaran yang menuntut langkah-langkah pencapaian. Perencanaan pendidikan itu mulai tersentuh. Kejadian ini sudah ada sejak zaman mesir kuno ketika mereka ingin memperbaiki lingkungannya dengan kemampuan pikir dan keterampilannya sendiri. Mereka mulai berupaya menggunakan ketersediaan apa yang ada di alam sekitar untuk mempertahankan kehidupan. Pengalaman hidup mereka juga menggiring untuk mereka hidup berkelompok agar komunikasi lebih mudah, dapat mengadakan perlawanan ketika musuh datang, dan mereka juga sadar bahwa dengan hidup bersama ada kemudahan dalam mempertahankan kehidupan. Keinginan untuk mempertahankan hidup, keinginan untuk bersama, menghindar dari segala bentuk serangan dari apa saja. Semua ini dilakukan dengan

melibatkan manusia dengan kemampuannya masing-masing menjadi bagian dari tujuan. Perencanaan untuk memberi keterampilan dan kemampuan untuk tujuan tertentu merupakan peran dari perencanaan pendidikan.

Jadi, dapat diartikan bahwa asal mula perencanaan erat hubungannya dengan rencana dan tujuan pendidikan itu sendiri, walaupun perencanaan maupun pendidikan dahulu bentuknya belum seperti apa yang ada sekarang, tetapi kegiatan yang ada dalam perencanaan pendidikan selalu mendukung terhadap kemajuan pendidikan sehingga meninggalkan warisan mengenai cara-cara pemecahan permasalahan dalam pendidikan.

Proses penyelesaian masalah dan keinginan mencapai tujuan dengan cara-cara tertentu berulang kali dalam jangka yang lama menjadikan ini sebuah warisan perencanaan. Waktu dan masalah yang ditemui menuntut perubahan sistem perencanaan yang lebih tepat dan mekanistik. Ini menggambarkan keteraturan perkembangan dari perencanaan yang pernah ada dan membantu memberikan petunjuk kepada perencanaan pendidikan untuk menentukan bentuk masa depan. Sejarah dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masa lalu, sementara perencanaan dapat menentukan tujuan dan masa depan.

Tujuan hidup dan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat, menjadi satu alasan pokok mengapa perencanaan menjadi penting. Apa yang harus dituju sebuah komunitas? Apa yang harus diperbaiki dari suatu sistem yang ada? Apa yang harus dicapai dari kondisi sekarang? Serta bagaimana cara mencapainya? Semua adalah awal dari perencanaan. Semua bermula dari fenomena yang ada pada masyarakat dan direduksi menjadi sebuah masalah.

Hakikat perencanaan selalu berorientasi pada masa

depan dan meliputi analisis yang menyeluruh (komprehensif) tentang masa kini, dan juga kekuatan-kekuatan sejarah yang telah membentuk perkembangannya. Perkembangan perencanaan tentu ada kaitannya dengan sejarah, tanpa adanya sejarah akan sulit ditelusuri bagaimana perencanaan itu dimulai dan apa tujuan yang sebenarnya. Sejarah perencanaan itu juga sebagai salah satu langkah untuk memperoyeksikan tujuan dan selanjutnya.

Proses perkembangan perencanaan pendidikan juga sangat terkait dengan tuntutan sosial kehidupan masyarakat dan teknologi yang berkembang. Sistem informasi manajemen yang banyak menggunakan teknologi informatika tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pendidikan sebagai suatu alat pengolah data sehingga mempermudah proses serta menggiring pada proyeksi kebijakan atau ramalan kegiatan yang lebih tepat dan objektif.

Tujuan pendidikan yang terkait dengan program makro-strategis maupun mikro-operasional menuntut perencana lebih matang dan profesional sehingga seluruh kebijakan itu dapat diterjemahkan secara tepat hingga pada tataran operasional. Tujuan pendidikan yang bersifat filosofi tidak mungkin dibiarkan tergantung dalam bentuk statemen dan angan-angan, tetapi tujuan harus dielaborasi menjadi suatu kegiatan yang mungkin dan layak dilakukan. Proses penerjemahan dan elaborasi inilah menuntut perencana lebih arif dan bijak sehingga tidak terjadi ketidaksinkronan antara filosofi dengan program serta hasil yang diharapkan.

Kegiatan pendidikan biasanya terkait dengan program-program yang ada dimasyarakat karena sebenarnya program pendidikan tujuannya adalah meningkatkan dan memperbaiki kecerdasan masyarakat. Dengan demikian, perencanaan pendidikan juga terkait dengan kemauan politik. Pendidikan

yang bersifat terbuka dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, kaya atau miskin, di kota atau di desa membuat pendidikan menjadi suatu objek pembicaraan dan diskusi dengan berbagai tingkat pemikiran. Kajian tentang sarana prasarana serta fasilitas sampai pada kualitas layanan maupun luaran semua terbuka pada masyarakat. Tidak ada yang tersembunyi sehingga apa pun yang direncanakan oleh pengambil kebijakan pendidikan menjadi konsumsi publik, dan malah menjadi komoditas politik.

Pendidikan dengan masyarakat sebenarnya bagai *symbiosis mutualism*, yakni hubungan saling menguntungkan. Perencanaan pendidikan yang bagus dan terlaksana secara baik akan meningkatkan kecerdasan masyarakat. Masyarakat yang cerdas dan berkualitas baik secara ekonomi maupun pemahaman politik membuat pendidikan dapat berjalan dengan baik. Semakin cerdas masyarakat akan semakin kritis dan jeli terhadap perkembangan dan persoalan pendidikan. Kritik dan kejelian masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan di dalam perencanaan pendidikan. Yang kurang diinginkan adalah pendidikan dijadikan sebagai komoditas politik hanya untuk kepentingan suatu kelompok atau perorangan, tanpa mempertimbangkan nilai keadilan, kesamaan dan kelayakan program.

Kebijakan pendidikan yang selalu menjadi konsumsi publik membuat perencanaannya harus sangat hati-hati dan membutuhkan pertimbangan yang matang. Kurang matang dan kurang pertimbangan dalam merencanakan pendidikan baik aspek fisik, kurikulum dan kualitas lulusan bisa terjebak dalam berbagai situasi. Misalnya, penentuan batas lulus Ujian Nasional (UN) dari rata-rata nilai 4,26 tahun 2006 menjadi rata-rata 5,0 tahun 2007. Ini dilaksanakan agar ada peningkatan kompetensi lulusan anak bangsa dengan

penguasaan ilmu minimal 5,0 untuk mata pelajaran Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Hal yang ini menjadi isu nasional dan menjadi bahan kajian berbagai lapisan, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta pengamat pendidikan dengan berbagai komentar yang diberikan. Ada yang pro dan ada yang kontra, dengan alasannya masing-masing. Bagi yang pro hal ini, adalah suatu yang baik dan harus dilaksanakan. Bagi yang kontra, dengan rasional yang diberikan ini, tidak mungkin dilaksanakan karena alasan fasilitas dan ketersediaan sumber daya maka ini disebut suatu kebijakan yang salah. Akhirnya, akan bermuara pada pengambil kebijakan dengan memberi label-label tertentu.

Perkembangan perencanaan pendidikan telah berjalan kearah lebih sempurna dengan adanya interaksi berbagai faktor dan tuntutan pendidikan itu sendiri. Namun demikian dapat dipahami perkembangan perencanaan pendidikan ini tidak terlepas dari apa, siapa dan di mana perencanaan itu dilaksanakan. Pendekatan perencanaan untuk kepentingan dunia usaha dan industri berbeda dengan pendekatan hanya sekedar proses peningkatan kemampuan akademik. Pendekatan perencanaan untuk anak usia dini berbeda dengan anak remaja dan orang dewasa. Demikian halnya perencanaan pendidikan di wilayah perkotaan akan berbeda pendekatannya dengan daerah terpencil atau perencanaan pendidikan di daerah kepulauan dengan dataran yang luas.

B. Perencanaan Pendidikan Sebagai Arah Kebijakan

Perencanaan pendidikan penting dilakukan untuk memberi arah dan bimbingan para pelaku pendidikan dalam rangka menuju perubahan atau tujuan yang lebih baik. Perubahan yang dimaksud boleh dalam bentuk peningkatan,

pengembangan pendidikan dengan resiko yang kecil serta mampu mengurangi ketidakpastian masa depan.

Perencanaan pendidikan muncul akibat semakin ruwet dan kompleksnya permasalahan pendidikan yang timbul dalam masyarakat sehingga membutuhkan suatu pengelolaan yang terstruktur dan komprehensif. Di samping itu, ada keinginan positif untuk membawa pendidikan pada situasi tertentu yang lebih baik dan bermutu dan tentu saja merupakan hasil kajian dan analisis situasi terbaru.

Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pendidikan seperti jumlah penduduk, kebutuhan akan tenaga kerja, penurunan sumber daya, serta penggunaan pengembangan ilmu pengetahuan yang sembarangan, kemiskinan menempatkan institusi pendidikan pada posisi pengambil kebijakan atau solusi yang sesuai. Jika institusi pendidikan mampu menyelesaikan masalah-masalah tersebut atau menawarkan suatu solusi terhadap masalah yang muncul, perencanaan pendidikan telah berjalan secara efektif.

Pandangan administrasi melihat bahwa perencanaan pendidikan penting sebagai alat kontrol dalam pengembangan, pembuatan keputusan, manajemen operasi, kontrol inventaris, perencanaan transportasi, dan fisik lembaga pendidikan. Akan tetapi, pada sisi lain, sering terlihat bahwa komunitas institusi pendidikan tertentu memberikan pelayanannya tidak bermakna untuk mengenal kebutuhan akan perencanaan pendidikan. Mereka menuntut solusi, namun secara simultan menolak pendekatan yang dapat menyelesaikan solusi tersebut.

Benturan-benturan yang terjadi dalam masyarakat, baik yang terkait dengan budaya, sosial ekonomi maupun fisik secara langsung maupun tidak, selalu dikaitkan dengan perencanaan pendidikan. Dengan kata lain, persoalan yang sering terjadi di dalam masyarakat terutama yang terkait

dengan kebodohan, ketidakberdayaan sumber daya manusia akan menuding bahwa ini akibat dari perencanaan pendidikan yang kurang mangkus.

Demikian halnya ketika perencana pendidikan tidak mampu memberi proyeksi kebijakan yang tepat dari sebuah persoalan, ketika anggaran yang dibuat tidak merefleksikan suatu layanan pendidikan yang lebih unggul atau kualitas lulusan masih jauh di bawah standar negara lain, perencanaan yang dibuat adalah perencanaan yang tidak profesional. Sesungguhnya, perencanaan pendidikan itu sangat penting untuk memberi arahan dan membentuk opini kemana masyarakat didik akan dibawa oleh lembaga pendidikan itu sendiri.

Banyak fenomena sosial saat ini yang belum dapat diterjemahkan dan direncanakan secara sempurna sebagai langkah penyelesaian masalah yang berkembang seperti persoalan pengangguran, ketidaksesuaian antara keterampilan (vocational) yang ditawarkan pendidikan dengan tuntutan kehidupan, serta banyaknya kegiatan kehidupan yang tidak didekati dengan ilmu. Persoalan pertanian masyarakat masih saja didekati dengan pola tradisional, belum menggunakan kaidah keilmuan yang relevan sehingga hasilnya tidak maksimal dan efisien.

Setiap persoalan pendidikan yang timbul membutuhkan sikap tanggap atau respon yang tentu saja membutuhkan kajian dan rencana tindak yang harus dibuat dengan segera tanpa membabi buta, tetapi rencana yang terarah dan merupakan jawaban yang tepat atas masalah yang telah didefinisikan secara tepat pula, bukan memberi solusi yang salah dari hasil reduksi masalah yang salah pula.

Pentingnya perencanaan pendidikan itu dapat dilihat minimal dari tiga unsur yang ada dalam masyarakat, antara

lain sebagai berikut ini.

- a. Secara konseptual, perencanaan pendidikan dilihat sebagai upaya penemuan masalah (*research*), pengembangan teori dan teknik (*developing and applied*), penggambaran rencana pada tingkat lokal, regional maupun nasional dan global (*mapping area and thinking*).
- b. Secara fisik, perencanaan pendidikan adalah perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek gedung sekolah, tata ruang gedung sekolah dan peralatannya, kriteria lingkungan kegiatan pembelajaran, dan lainnya.
- c. Dari segi sosial, perencanaan pendidikan merupakan tinjauan sosial yang dapat merefleksikan kehidupan masyarakat, perencanaan kurikulum, strategi instruksional, tinjauan kebutuhan tenaga kerja dan sosial, rancangan fisik yang dapat meningkatkan interaksi individu dan sosial atau masyarakatnya.

C. Arti Perencanaan Pendidikan

Perencanaan itu sendiri artinya adalah, proses menyiapkan seperangkat keputusan yang akan dilaksanakan pada masa datang. Perencanaan pendidikan adalah proses penyusunan gambaran kegiatan pendidikan pada masa depan dalam rangka mencapai perubahan/tujuan pendidikan yang telah ditetapkan (Blaug, 1972). Dengan demikian, perencanaan pendidikan adalah, proses menyiapkan seperangkat kebijakan pendidikan yang akan dilaksanakan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien sesuai tujuan dan kebutuhan masyarakat.

Ada empat aspek yang harus diketahui dan diperhatikan, untuk memberikan pemahaman tentang

pengertian perencanaan pendidikan, yaitu karakteristik perencanaan pendidikan, ciri perencanaan pendidikan, dimensi perencanaan pendidikan, dan hambatan perencanaan pendidikan.

1. Karakteristik Perencanaan Pendidikan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, perencanaan pendidikan adalah proses penyiapan seperangkat kebijakan pendidikan yang akan dilaksanakan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien sesuai tujuan dan kebutuhan. Sebelum perencanaan dilakukan, perencana pendidikan harus memahami tiga bidang pengetahuan khusus, yaitu: (1) metode ilmiah yang komprehensif dan kemampuan menggunakannya dengan fasilitas yang ada, (2) pengetahuan akan nilai-nilai perbandingan dan sistem nilai dengan maksud dapat memfasilitasi keputusan rasional dari tujuan masyarakat, (3) pemahaman akan berkelanjutan dan tidak berkelanjutan, kecenderungan dan arah dari segala urusan manusia sehingga dapat memprediksi apa kemungkinan-kemungkinan yang muncul.

Di samping definisi dan pengetahuan khusus tentang metodologi, perencana juga harus memahami karakteristik perencanaan pendidikan yang membedakan dengan perencanaan lain untuk menggambarkan sifat khusus dari perencanaan pendidikan itu sendiri, yakni bahwa perencanaan pendidikan itu adalah sebagai berikut ini.

- a. Suatu proses rasional, yang direduksi dari fenomena masyarakat, diproyeksikan untuk membenahi, mengembangkan dan menyempurnakan proses pendidikan masyarakat.
- b. Bersifat sosial, menyangkut hayat hidup orang banyak yang harus mempertimbangkan aspek

psikologis, sosial budaya, dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan fungsi kontrol terhadap arah ideologi.

- c. Rancangan konseptual yang korehensif dimana yang kebijakan dan tindakan yang dirancang oleh kelompok dalam bentuk konsep tidak berdiri sendiri.
- d. Konsep dinamis yang dijamin suatu rencana dikonstruksikan dengan lentur sehingga tidak mungkin terjadi penyimpangan.

2. Ciri Perencanaan Pendidikan

Perencanaan pendidikan berbeda dengan perencanaan lain, sebab pendidikan secara umum menyangkut banyak orang dengan tingkat umur, pemahaman, daerah dan kondisi demografi. Tidak jarang pendidikan dijadikan sasaran kebijakan yang bernuansa ideologi, komoditas politik tanpa mempertimbangkan aspek teknis maupun profesionalisme pendidikan itu sendiri. Berikut akan dijelaskan sebelas ciri perencanaan pendidikan

- 1) *Luwes* atau tidak terikat dengan suatu idealisme perorangan atau paradigma temporer.
- 2) *Berkaitan dengan masa depan* yakni apa yang harus dilaksanakan untuk masa yang akan datang berdasarkan data yang ada.
- 3) *Berkesinambungan*, tidak terhenti pada satu terminal layaknya seperti proyek tetapi berkelanjutan.
- 4) *Tidak persaingan penguasa* tetapi keinginan objektif dari tuntutan keadaan atau keinginan bersama yang memiliki nilai guna.
- 5) *Bukan karya kebijakan*, tetapi hasil analisis yang rasional.

- 6) *Terintegrasi* dengan pengelolaan keseluruhan.
- 7) Dapat membantu pembuat kebijakan baik kebijakan level rendah maupun kebijakan level tinggi.
- 8) Membantu mencapai tujuan pendidikan yang baik dan luas sesuai dengan sumber daya yang ada.
- 9) *Berpandangan luas*, tidak memihak personal, kelompok atau kepentingan lain, tetapi atas analisa yang benar dan komprehensif.
- 10) *Sistemik*, yaitu mudah dipahami dan dilaksanakan atas prosedur yang jelas dan tepat suai.
- 11) *Peka analisis*, yakni tidak menganggap apa yang telah direncanakan adalah yang paling benar, tetapi juga tidak percaya diri sehingga tidak memiliki kekonsistenan.

Membuat perencanaan adalah bagian tugas dari suatu institusi untuk mencapai keputusan, sedangkan perencanaan suatu proses terkendali di dalam suatu rantai yang panjang dari pembuatan keputusan oleh manusia pada suatu waktu tertentu. Kadang-kadang perwujudan kedalam rencana hanyalah merupakan suatu bagian dari proses. Oleh karena itu, perencanaan merupakan program terkendali dari seluruh jangkauan tindakan publik dan perseorangan menuju pengembangan. Esensi yang dihasilkan adalah suatu rencana untuk sifat, tingkat dan proses perubahan karena dasarnya telah meluas melibatkan perencanaan fisik, sosial, dan ekonomi, maka dapat mengambil alih analisa teknis dari bidang lain.

Pengertian perencanaan melibatkan beberapa komponen proses seperti tujuan yang akan dicapai, prosedur efisien untuk mencapainya, alokasi sumber daya yang tepat yang diperlukan untuk mencapai tujuan, seperti manipulasi

lingkungan fisik.

Secara umum, pengertian perencanaan dapat hanya mengacu kepada persiapan ke dalam kelompok dan individu, yang biasa disebut dengan pembelajaran. Intisari dari perencanaan dan pembelajaran adalah kepedulian terhadap lingkungan pendidikan dari komunitas manusia. Oleh karena itu, seorang perencana harus mengetahui nilai-nilai, tujuan, dan struktur sosial dari komunitas dengan tujuan untuk melayaninya secara memadai.

3. Dimensi Perencanaan Pendidikan

Dimensi perencanaan pendidikan adalah melihat tingkat ukuran dan besaran masalah yang terkait dengan perencanaan pendidikan. Ada sembilan dimensi yang terkait dengan proses perencanaan pendidikan.

- a. **Bermakna (Significance)**, yaitu tingkat kebermaknaan objek yang harus diidentifikasi dan dicarikan solusinya. Ini tergantung dari kepentingan sosial, tujuan, dan ideologi diusulkan.
- b. **Layak (Feasibility)**, yaitu kelayakan teknis dan perkiraan biaya merupakan aspek yang harus dilihat secara realistis.
- c. **Berkait (Relevance)**, yaitu konsep relevan mutlak perlu bagi implementasi rencana pendidikan.
- d. **Keterdefinisian (Definitiveness)**, yaitu penggunaan teknis simulasi untuk menjalankan rencana dengan menggunakan data model buatan, tujuannya adalah untuk meminimumkan kejadian yang tidak diharapkan yang akan mengalihkan sumber daya dari tujuan yang direncanakan.

- e. **Sederhana (*Parsimoniousness*)**, yaitu perencanaan haruslah digambarkan secara sederhana.
- f. **Ketersesuaian (*Adaptability*)**, yaitu perencanaan pendidikan haruslah dinamis dan dapat berubah sesuai informasi sebagai umpan balik sistem.
- g. **Waktu (*Time*)**, yaitu siklus alamiah pokok bahasan pada perencanaan, kebutuhan untuk merubah situasi yang tidak dapat dipikul, keterbatasan perencana pendidikan dalam meramalkan masa depan merupakan beberapa faktor berkaitan dengan waktu. Waktu yang berdampak pada kemampuan untuk mengevaluasi kebutuhan pendidikan saat ini berkaitan dengan masa depan.
- h. **Monitoring**, yaitu melibatkan penegakan kriteria pendidikan untuk menjamin berbagai komponen rencana kerja secara efektif.
- i. **Pokok Masalah (*subject matter*)**, yaitu pokok-pokok bahasan yang akan direncanakan yang terdiri atas:
 - 1) *tujuan dan sasaran*, mencakup apa yang diharapkan sebagai keluaran dari proses pendidikan. Merupakan pokok bahasan yang paling mendasar dalam perencanaan pendidikan;
 - 2) *program dan layanan*, mencakup bagaimana mengorganisasikan pola kegiatan pembelajaran dan mendukung pelayanan;
 - 3) *sumber daya manusia*, mencakup bagaimana membantu dan meningkatkan kinerja, interaksi, spesialisasi, sikap, kompetensi dan pertumbuhan kepuasan sumber daya manusia;

- 4) sumber daya fisik, mencakup bagaimana memanfaatkan fasilitas dan merencanakan pola distribusinya;
- 5) *budgeting*, mencakup bagaimana membiayai pengeluaran dan merencanakan pemasukan keuangan;
- 6) *organization Structure* (Governance), mencakup bagaimana mengorganisasi dan mengelola kegiatan dan kontrol terhadap program-program pendidikan dan aktivitasnya;
- 7) *social Context*, mencakup elemen-elemen sumber yang harus diperhatikan pada sistem pendidikan.

4. Hambatan-Hambatan Dalam perencanaan Pendidikan

Kendala memegang peranan yang sangat penting dalam mendefinisikan arti perencanaan pendidikan, yang utamanya meliputi: politik, ekonomi, dan waktu. Pada umumnya, kendala-kendala yang muncul pada proses perencanaan pendidikan ditingkat yang lebih tinggi akan berdampak lebih besar pada tingkat di bawahnya.

Perencanaan pendidikan berkaitan erat dengan politik dan kebijaksanaan yang dihasilkan dari proses politisasi. Hubungan ini digambarkan dengan satu arah yang sangat mendasar sehingga proses perencanaan harus memainkan peranan yang penting dalam memberikan alternatif kebijakan dan tekanan untuk keputusan dari tingkat paling awal dan paling luas mulai dari perumusan kebijakan sampai kepada tingkat yang lebih rinci dari penentuan kebijakan.

Perencanaan pendidikan dapat mendahului kebijakan pendidikan dikarenakan perencanaan melibatkan keputusan

dan pilihan di antara alternatif rangkaian kegiatan tindakan. Dalam memilih suatu rangkaian tindakan, perencanaan pendidikan, menjadi suatu kebijakan untuk unit administrasi yang lebih rendah.

Hubungan antara perencanaan pendidikan dan kebijakan pendidikan ini dinyatakan dengan sangat baik oleh struktur hierarki dari sebagian besar administrasi pendidikan karena pada masa lalu praktek administrasi telah menegakkan hubungan antara perencanaan pendidikan. Makna dari hubungan ini dalam perencanaan pendidikan adalah dijadikan sebagai permasalahan publik. Pada saat kebijakan publik terpisah dari pengamatan publik, perencanaan pendidikan akan menjadi musibah besar.

Perencanaan pendidikan melibatkan orang-orang dari berbagai disiplin ilmu dengan permasalahan ekonomi pada segi waktu serta biaya yang merupakan kendala utama. Inti dari permasalahan ekonomi menekankan pentingnya menghasilkan suatu rencana yang dapat membawa hubungan yang serasi dengan keseluruhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan persetujuan politik dan peraturan hukum juga ditempatkan pada perencanaan pendidikan proses perencanaannya. Kenyataannya bahwa dalam proses perencanaan harus fleksibel dan dilakukan secara terus menerus. Definisi operasional perencanaan pendidikan, terutama perencanaan pendidikan komprehensif adalah suatu proses yang antara lain:

- a. menghasilkan informasi keputusan yang sah dalam bentuk alternatif rangkaian kegiatan.;
- b. melayani sebagai suatu paduan untuk memonitor aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan

pendidikan yang telah ditetapkan dan mendefinisikan suatu kriteria kinerja untuk mengukur derajat kesuksesan dalam mencapai sasaran;

- c. menyajikan rantai koordinasi diantara sasaran jangka panjang dan program menengah, serta rencana operasi terinci untuk mengimplementasikan program tahunan bersama-sama dengan kerangka kerja jangka panjang dan jangka menengah;
- d. melengkapi dasar untuk pemeriksaan kembali dan perbaikan tujuan pendidikan serta program-program melalui proses perencanaan kembali.
- e. menyajikan alat untuk peninjauan ulang;
- f. menegakkan inventaris kebutuhan untuk menentukan proses logis dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan memproyeksikan informasi;
- g. mencocokkan perencanaan secara komprehensif untuk pengembangan dan kesejahteraan secara umum;
- h. menggabungkan peralatan yang tepat, seperti:
 - 1) perencanaan, pemrograman, dan sistem anggaran;
 - 2) analisis dan sintesis sistem;
 - 3) penjadwalan jaringan;
 - 4) sistem informasi manajemen;
 - 5) pemodelan dan simulasi;
 - 6) analisis lingkungan dan kebutuhan penilaian.
 - 7) analisis keuntungan dan efektivitas pembiayaan;
 - 8) sistem manajemen dan pengawasan.

D. Tujuan Perencanaan Pendidikan

Perencanaan pendidikan bertujuan untuk menjamin agar perubahan/ tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil. Berbeda dengan profesinya lainnya, perencanaan pendidikan tidak memiliki bidang pengetahuan teknis yang dikenali secara jelas. Perencanaan pendidikan terlihat sebagai perwujudan dari kecendrungan kearah kegiatan manusia.

Perencanaan pendidikan bertujuan untuk mencapai efisiensi pada proses penyelesaian masalah dan memerlukan paling sedikit tiga tujuan, yakni:

- a. menegaskan kebenaran yang berarti menemukan kenyataan yang dapat diterima orang lain;
- b. menentukan serangkaian tindakan dimaksudkan untuk melihat gambaran pada masa depan yang merupakan esensi dari perencanaan;
- c. membujuk yang membutuhkan sehingga dapat memunculkan sikap personal, kegemaran, prasangka, dan emosi yang dapat menentukan tindakan.

Dari konsep sistem, tujuan sistem perencanaan pendidikan paling tidak ingin mencapai empat aspek, yaitu:

1. mendukung koordinasi antar pelaku pendidikan;
2. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antara sekolah dengan dinas pendidikan, dinas pendidikan propinsi, dan pusat;
3. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya

secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dalam mencapai tujuan perencanaan pendidikan, ada tiga dimensi peran yang seyogianya dimiliki perencana, yaitu:

- a. jenis tugas yang meliputi teknis atau administrasi dan yang berkenaan dengan rencana implementasi, aktivitas koordiansi perencanaan, dan politik;
- b. berkenaan dengan pelanggan yang dilayani perencana;
- c. sponsor, individu atau kelompok.

Dalam pendidikan, terdapat 2 (dua) orientasi yang spesifik, yaitu:

- a. kegiatan yang diarahkan kepada proses sosial, seperti: psikologi pembelajaran, perencanaan kurikulum, pelatihan guru, kelompok pengajaran atau intruksi individu;
- b. kegiatan yang diarahkan kepada lingkungan fisik.

Mengingat perencanaan pendidikan mempunyai program yang beragam, maka dalam menetapkan tujuan suatu perencanaan harus ditentukan indikator kinerja yang dapat diukur dan bersifat fisik (misalnya: pembangunan prasarana dan sarana fisik, angka partisipasi siswa, angka mengulang kelas, dan angka putus sekolah) maupun nonfisik, misalnya, peningkatan nilai UN, serta kecerdasan dan perilaku peserta didik.

Berdasarkan sifat dari masing-masing jenis kegiatan berbeda, diperlukan cara dan alat ukur yang berbeda sesuai dengan sifat dan bentuk indikator yang akan diukur. Misalnya, perencanaan pendidikan secara umum untuk jenis dan jenjang. Ada empat jenis indikator kinerja yang biasa

digunakan sebagai acuan dalam pemantauan dan evaluasi atau pengukuran kinerja lembaga seperti sekolah, yaitu masukan, proses, keluaran dan dampak.

1. **Indikator masukan**, yang mencakup antara lain kurikulum, siswa, dana, sarana, dan prasarana belajar, data dan informasi, pendidik dan tenaga kependidikan, gedung sekolah, kelompok belajar, sumber belajar, motivasi belajar, kesiapan anak (fisik dan mental) dalam belajar, kebijakan, dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
2. **Indikator proses**, yang meliputi antara lain lama waktu belajar, kesempatan mengikuti pembelajaran, lama mengikuti pendidikan, jumlah yang putus sekolah, efektivitas pembelajaran, mutu proses pembelajaran, dan metode pembelajaran yang digunakan.
3. **Indikator keluaran**, yang terdiri antara lain jumlah siswa yang lulus atau naik kelas, nilai-rata-rata ujian, mutu lulusan yang naik kelas, dan jumlah siswa yang menyelesaikan pembelajaran/naik kelas berdasarkan jenis kelamin.
4. **Indikator dampak**, yang antara lain berupa kemampuan/jumlah siswa yang melanjutkan sekolah. Jumlah siswa yang bisa bekerja di perusahaan atau usaha mandiri, jumlah angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan, dan pengaruh para lulusan terhadap mutu angkatan kerja/lingkungan sosial, peran serta siswa dalam pembangunan lingkungan dan pengaruh atau peran lulusan pendidikan dan pelatihan terhadap kehidupan masyarakat secara luas.

E. Acuan Dasar Perencanaan Pendidikan

Acuan dasar perencanaan Pendidikan umumnya adalah ideologi bangsa atau tujuan daerah, wilayah atau negara yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Undang-undang tersebut, misalnya tercantum bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan yang harus direncanakan adalah:

- 1) Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
- 2) Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna serta diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- 3) Memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
- 4) Mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
- 5) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut, ditetapkanlah tujuan pembangunan pendidikan nasional jangka menengah sebagai berikut:

- a. meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia, serta kualitas jasmani peserta didik;
- b. meningkatkan etika, estetika, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. meningkatkan pemerataan kesempatan belajar pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan bagi semua warga negara secara adil, tidak diskriminatif, dan demokratis tanpa membedakan tempat tinggal, status sosial-ekonomi, jenis kelamin, agama, kelompok etnis, dan kelainan fisik, emosi, mental serta intelektual;
- d. menuntaskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun secara efisien, bermutu, dan relevan sebagai landasan yang kokoh bagi pengembangan kualitas manusia Indonesia;
- e. menurunkan secara signifikan jumlah penduduk buta aksara;
- f. memperluas akses pendidikan non-formal bagi penduduk laki-laki maupun perempuan yang belum sekolah, tidak pernah sekolah, buta aksara, putus sekolah dalam dan antar jenjang serta penduduk lainnya yang ingin meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan;
- g. meningkatkan daya saing bangsa dengan menghasilkan lulusan yang mandiri, bermutu, terampil, ahli dan profesional, mampu belajar sepanjang hayat, serta memiliki kecakapan hidup yang dapat membantu dirinya dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan;
- h. meningkatkan kualitas pendidikan dengan tersedianya standar pendidikan nasional dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta meningkatkan

- kualifikasi minimum dan sertifikasi bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya;
- i. meningkatkan relevansi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan melalui peningkatan hasil penelitian, pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh perguruan tinggi serta penyebarluasan dan penerapannya pada masyarakat;
 - j. menata sistem pengaturan dan pengelolaan pendidikan yang semakin efisien, produktif, dan demokratis dalam suatu tata kelola yang baik dan akuntabel;
 - k. meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan melalui peningkatan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan, serta efektivitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pendidikan termasuk otonomi keilmuan;
 - l. Mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk mewujudkan Depdiknas yang bersih dan berwibawa.

Untuk dapat menjalankan amanat terhadap pembangunan pendidikan nasional, diperlukan kejelasan arah, moto atau proyeksi di luar visi dan misi yang telah dibuat. Salah satu dasar penentuan rencana seperti halnya perspektif makro Pembangunan Pendidikan Nasional, atau Pendidikan dan Komitmen Global.

BAB III

SKOP, LEVEL, DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN PENDIDIKAN

Perencanaan pendidikan hampir sama dengan perencanaan pembangunan program lain memiliki skop, level, dan jangka waktu. Skop boleh juga dilihat dari konsep kajian pemikiran, wilayah, atau uraian kerja. Perencanaan pendidikan pada skop makro pada wilayah yang lebih luas misalnya nasional, tidak dapat lepas dari perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun global. Perencanaan pendidikan harus secara konseptual dan hierarki tugas harus dibangun dalam keterkaitannya secara fungsional dengan berbagai bidang kehidupan, yang masing-masing memiliki persoalan dan tantangan yang semakin kompleks.

Ketiga dimensi, yakni skop, level, dan jangka waktu tersebut tidak dapat dipisah satu dengan yang lain, sebab dalam hal ini tekanan diberikan pada objek rencana. Meskipun perencanaan pada tingkat makro, meso, dan mikro tetapi tetap juga harus mencari posisi apakah strategis atau operasional, demikian juga waktunya apakah jangka panjang, menengah atau tahunan. Ketiganya harus dipertimbangkan dalam satu keterpaduan mengingat objek rencana tidak lepas dari pertanyaan apa, kapan dan di mana.

Perencana pendidikan dengan kapasitas tingkat pemerintahan baik dalam tataran konsep maupun wilayah untuk kondisi Indonesia misalnya telah diarahkan oleh peraturan perundang-undangan atau telah dihukum oleh struktur pemerintahan yang menangani pendidikan seperti berikut ini.

- (1) Pada tingkat Pemerintah, prioritas pengembangan kapasitas mencakup penataan kelembagaan, penguatan sistem advokasi strategis dan monitoring, perbaikan sistem informasi kinerja dalam memetakan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) oleh satuan pendidikan dan pemerintah daerah. Dalam lima tahun ke depan, pembangunan pendidikan nasional harus dilihat dalam perspektif pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Dalam perspektif demikian, pendidikan harus lebih berperan dalam membangun seluruh potensi manusia agar menjadi subyek yang berkembang secara optimal dan bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan nasional. Potensi manusia Indonesia yang dikembangkan mencakup olah hati yang berkualitas dengan *keimanan, ketakwaan dengan akhlak mulia, olah rasa yang berkualitas dengan seni atau estetika, olah pikir yang berkualitas dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta potensi fisik yang berkualitas dengan olah raga.*
- (2) Pada tingkat provinsi, pengembangan kapasitas harus lebih diarahkan pada peningkatan institusi pengelola dalam melaksanakan fungsi dekonsentrasi, yaitu kemampuan provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam mengelola pelaksanaan kegiatan yang menjadi wewenang pusat, misalnya pengendalian mutu, penjaminan mutu, evaluasi dan monitoring program, serta akreditasi. Kapasitas provinsi juga perlu ditingkatkan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan antar kabupaten/kota.

- (3) Pada tingkat kabupaten/kota, perlu penguatan kapasitas dalam menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional, sistem informasi dan sistem pembiayaan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Kabupaten/kota berfungsi sebagai fasilitator yang memberikan kemudahan dan otonomi yang lebih luas bagi satuan pendidikan dalam upaya mencapai kemandirian. Sistem Perencanaan Pendidikan Kabupaten (SPPK) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pendidikan kabupaten/ kota untuk menghasilkan rencana-rencana pendidikan kabupaten/kota dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pendidikan kabupaten/kota dan masyarakat (diwakili oleh dewan pendidikan). SPPK adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pendidikan kabupaten/kota untuk menghasilkan rencana-rencana pendidikan kabupaten/kota dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pendidikan kabupaten/ kota dan masyarakat (diwakili oleh dewan pendidikan).
- (4) Pada pendidikan tinggi, terutama dalam masa transisi dari sentralisasi menuju masa otonomi, pengembangan kapasitas dilakukan ke arah mewujudkan perguruan tinggi yang memiliki keleluasaan untuk memberikan pelayanan pendidikan tinggi yang bermutu secara sehat dan akuntabel. Perguruan tinggi yang sehat memiliki kapasitas untuk merespon lingkungan yang berubah secara otonom dan unik.

- (5) Pada satuan pendidikan, penguatan kapasitas tercermin dari kemampuan satuan pendidikan dalam melaksanakan proses pembelajaran efektif untuk mencapai standar nasional pendidikan. Untuk itu, perlu ditingkatkan kemampuan kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya dalam memanfaatkan sumber daya pendidikan agar mendorong kegiatan belajar peserta didik secara optimal.

Sebagai acuan dasar perencanaan dalam pendidikan dikenal beberapa istilah yang dapat dijadikan pedoman penentuan kegiatan maupun program yaitu:

- visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
- misi adalah rumusan umum mengenai tindakan (upaya-upaya) yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
- tujuan (baku) adalah rumusan mengenai apa yang diinginkan pada kurun waktu tertentu;
- sasaran/tujuan situasional adalah rumusan spesifik mengenai apa yang diinginkan pada kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan tantangan nyata yang dihadapi (sasaran merupakan jabaran tujuan);
- strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
- kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan;
- program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan.

A. Skop Perencanaan Pendidikan

1. Perencanaan Makro

Perencanaan makro adalah perencanaan yang mempunyai ruang lingkup nasional, yaitu yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh, tujuan yang ingin dicapai dan cara-cara mencapai tujuan itu secara nasional. Perencanaan makro dapat diarahkan pada konteks politik, ekonomi. Perencanaan semacam ini dapat ditelusuri dari apa yang dilakukan Rusia antara tahun 1928-1932, dengan pembangunan lima tahunnya. Rencana pembangunan dewasa ini meliputi aspek ekonomi dan sosial. Perencanaan semacam itu menjadi perdebatan terutama pada fase permulaan terutama mengenai kegunaannya. Kemudian perbedaan itu tidak terdengar lagi, lebih-lebih setelah perancis melaksanakan rencana pembangunannya pada tahun 1948-1953.

Sejak tahun 1950 perencanaan nasional telah menjadi perhatian negara-negara berkembang, terutama negara-negara yang baru mendapatkan kemerdekaannya dari pemerintah kolonial. Alasan utama mengapa perencanaan menjadi perhatian adalah karena negara-negara berkembang tersebut ingin mengejar ketinggalan mereka, tetapi dana yang dipunyai sangat terbatas.

Dalam kelangkaan sumber-sumber seperti itu, pemerintah memegang peranan sentral dalam mengarahkan dan mengontrol penggunaannya sehingga keseimbangan antara produksi dan konsumsi antara simpanan dan penanaman modal, antara penyediaan dan permintaan serta antara sumber-sumber dan belanja negara, dapat terjamin. Keseimbangan tersebut dimaksudkan untuk menekan pemborosan di satu pihak, dan pihak lain untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi.

Seperti apa yang telah dilakukan oleh pemerintah kita,

hasil-hasil yang dicapai dalam pembangunan ekonomi ini kemudian digunakan untuk pembangunan sektor-sektor lain seperti pendidikan dan usaha pembangunan dalam bidang sosial. Di sini terlihat pentingnya peranan pemerintah untuk mengontrol pembangunan.

Dilihat dari peranan pemerintah, perencanaan dapat dibedakan menjadi dua. **Pertama perencanaan wajib** (*imperative planning*) yang banyak terdapat di negara-negara sosial, yaitu perencanaan yang dilakukan oleh suatu badan yang sangat berkuasa. Badan semacam itu dibentuk untuk menentukan sasaran kebijakan dan strategi pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dikontrol secara ketat dengan konsentrasi kekuasaan yang besar kepada negara. **Kedua perencanaan arahan** yaitu perencanaan yang hanya menunjukkan arah kemana sasaran kebijakan dan strategi pembangunan seharusnya diarahkan. Arahan ini tidak bersifat mengikat, karena arahan ini hanya berfungsi sebagai nasihat. Dalam keadaan ini sebenarnya perencanaan tidak mempunyai arti sama sekali. Kombinasi itu berupa kontrol yang ketat untuk sektor pemerintah dan arahan untuk sektor swasta.

Untuk merealisasikan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka perencanaan pendidikan pada tingkat nasional harus berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut ini.

- (1) Pendekatan apakah yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut?
- (2) Bagaimana seharusnya lembaga pendidikan yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tersebut diorganisasikan?
- (3) Apakah program-program yang dibuat untuk mencapai tujuan itu?
- (4) Bagaimanakah prioritas program-program tersebut?

(5) Bagaimanakah saling tunjang/saling hubungan antara proyek-proyek yang direncanakan?

Pembangunan pendidikan nasional adalah suatu usaha yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkualitas, maju, mandiri, dan modern. Pembangunan pendidikan merupakan bagian penting dari upaya menyeluruh dan sungguh-sungguh untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Keberhasilan dalam membangun pendidikan akan memberikan kontribusi besar pada pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan. Dalam konteks demikian, pembangunan pendidikan itu mencakup berbagai dimensi yang sangat luas: sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Dalam perspektif sosial, pendidikan akan melahirkan insan-insan terpelajar yang mempunyai peranan penting dalam proses perubahan sosial di dalam masyarakat. Pendidikan menjadi faktor determinan dalam mendorong percepatan mobilitas masyarakat, yang mengarah pada pembentukan formasi sosial baru. Formasi sosial baru ini terdiri atas lapisan masyarakat kelas menengah terdidik, yang menjadi elemen penting dalam memperkuat daya rekat sosial (*social cohesion*). Pendidikan yang melahirkan lapisan masyarakat terdidik itu menjadi kekuatan perekat yang menautkan unit-unit sosial di dalam masyarakat: keluarga, komunitas, perkumpulan masyarakat, dan organisasi sosial yang kemudian menjelma dalam bentuk organisasi besar berupa lembaga negara. Dengan demikian, pendidikan dapat memberikan sumbangan penting pada upaya memantapkan integrasi sosial.

Dalam perspektif budaya, pendidikan juga merupakan wahana penting dan medium yang efektif untuk mengajarkan norma, menyosialisasi nilai, dan menanamkan etos di kalangan warga masyarakat. Pendidikan juga dapat menjadi

instrumen untuk memupuk kepribadian bangsa, memperkuat identitas nasional, dan memantapkan jati diri bangsa. Bahkan, peran pendidikan menjadi lebih penting lagi ketika arus globalisasi demikian kuat, yang membawa pengaruh nilai-nilai dan budaya yang acapkali bertentangan dengan nilai-nilai dan kepribadian bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, pendidikan dapat menjadi wahana strategis untuk membangun kesadaran kolektif (*collective conscience*) sebagai warga bangsa dan mengukuhkan ikatan-ikatan sosial, dengan tetap menghargai keragaman budaya, ras, suku-bangsa, dan agama sehingga dapat memantapkan keutuhan nasional.

Dalam perspektif ekonomi, pendidikan akan menghasilkan manusia-manusia yang andal untuk menjadi subyek penggerak pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu melahirkan lulusan-lulusan bermutu yang memiliki pengetahuan, menguasai teknologi, dan mempunyai keterampilan teknis dan kecakapan hidup yang memadai. Pendidikan juga harus dapat menghasilkan tenaga-tenaga profesional yang memiliki kemampuan kewirausahaan, yang menjadi salah satu pilar utama aktivitas perekonomian nasional. Bahkan, peran pendidikan menjadi sangat penting dan strategis untuk meningkatkan daya saing nasional dan membangun kemandirian bangsa, yang menjadi prasyarat mutlak dalam memasuki persaingan antarbangsa di era global. Di era global sekarang ini, berbagai bangsa di dunia telah mengembangkan *Knowledge-Based Economy* (KBE), yang mensyaratkan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas. Karena itu, pendidikan mutlak diperlukan guna menopang pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan – *Education for the Knowledge Economy* (EKE). Dalam konteks ini, lembaga pendidikan harus pula berfungsi sebagai pusat

penelitian dan pengembangan, yang menghasilkan produk-produk riset unggulan yang mendukung KBE. Ketersediaan SDM bermutu yang menguasai iptek sangat menentukan kemampuan bangsa dalam memasuki kompetensi global dan ekonomi pasar bebas, yang menuntut daya saing tinggi. Dengan demikian, pendidikan diharapkan dapat mengantarkan bangsa Indonesia meraih keunggulan dalam persaingan global.

Dalam perspektif politik, pendidikan harus mampu mengembangkan kapasitas individu untuk menjadi warga negara yang baik (*good citizens*), yang memiliki kesadaran akan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara. Karena itu, pendidikan harus dapat melahirkan individu yang memiliki visi dan idealisme untuk membangun kekuatan bersama sebagai bangsa. Visi dan idealisme itu haruslah merujuk dan bersumber pada paham ideologi nasional, yang dianut oleh seluruh komponen bangsa. Dalam jangka panjang, pendidikan niscaya akan melahirkan lapisan masyarakat terpelajar yang kemudian membentuk *critical mass*, yang menjadi elemen pokok dalam upaya membangun masyarakat madani. Dengan demikian, pendidikan merupakan usaha besar untuk meletakkan landasan sosial yang kokoh bagi terciptanya masyarakat demokratis, yang bertumpu pada golongan masyarakat kelas menengah terdidik yang menjadi pilar utama *civil society*, yang menjadi salah satu tiang penyangga bagi upaya perwujudan pembangunan masyarakat demokratis.

Dalam lima tahun mendatang, pembangunan pendidikan nasional dihadapkan pada berbagai tantangan serius, terutama dalam upaya meningkatkan kinerja yang mencakup: (i) pemerataan dan perluasan akses, (ii) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing (iii) penataan tata kelola,

akuntabilitas, dan pencitraan diri, dan (iv) peningkatan pembiayaan. Dalam upaya meningkatkan kinerja pendidikan nasional, diperlukan suatu reformasi menyeluruh yang telah dimulai dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi pendidikan sebagai bagian dari reformasi politik pemerintahan. Reformasi politik pemerintahan ini tertuang di dalam UU No. 22/1999, yang kemudian disempurnakan menjadi UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU tersebut menandai perubahan radikal tata pemerintahan dari sistem sentralistik ke sistem desentralistik, dengan memberikan otonomi yang luas kepada daerah. Pendidikan yang semula menjadi kewenangan pemerintah pusat kemudian dialihkan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pengelolaan pendidikan yang menjadi wewenang pemerintah daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki kinerja pendidikan nasional.

2. Perencanaan Meso

Perencanaan pada tingkat meso adalah perencanaan pada tingkat daerah, perencanaan ini merupakan penjabaran dari perencanaan makro yang disesuaikan dan dilengkapi berdasarkan keadaan daerah atau keadaan departemen di daerah yang bertugas menjabarkan lebih lanjut misi yang ditetapkan pada tingkat makro. Perencanaan tingkat meso ini harus merupakan bagian yang menunjang tercapainya tujuan pada tingkat makro.

Sifat perencanaan sudah lebih operasional dari pada tingkat makro. Perencanaan berupa program-program yang dipilih untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Yang harus diperhatikan disini adalah koordinasi antara badan-badan perencana daerah sehingga ada sinkronisasi dan

koordinasi di antara program-program yang dibuat mereka.

Dalam era otonomi dan desentralisasi, sistem pendidikan nasional dituntut untuk melakukan berbagai perubahan, penyesuaian, dan pembaharuan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang otonom dan demokratis, yang memberi perhatian pada keberagaman dan mendorong partisipasi masyarakat, tanpa kehilangan wawasan nasional. Dalam konteks ini, pemerintah bersama dengan DPR-RI telah menyusun UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai perwujudan tekad dalam melakukan reformasi pendidikan untuk menjawab berbagai tantangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di era persaingan global.

3. Perencanaan Mikro

Perencanaan pada tingkat mikro dapat diartikan sebagai perencanaan ini menyangkut penjabaran yang lebih rinci dari perencanaan pada tingkat meso dan merupakan perencanaan institusional. Kekhususan-kekhususan misi sekolah/institut diperhatikan, namun demikian tidak boleh bertentangan dengan rencana yang telah ditetapkan oleh perencanaan pada tingkat makro maupun meso.

B. Level Perencanaan Pendidikan

1. Perencanaan Strategis

Mondy dan Premeaux (1995:168) menjelaskan "*Strategic Planning is the process by which top management determines overall organizational purposes and objectives and how they are to be achieved*". Artinya, perencanaan strategis adalah proses yang dengan cara itu manajemen puncak menentukan maksud dan tujuan-tujuan keseluruhan organisasi dan bagaimana tujuan-tujuan itu dicapai. Dengan perencanaan

strategis ini, segala kegiatan harus memperhatikan strategi (siasat) itu sebelum dirobah dengan strategi baru. Strategi itu sendiri mungkin tidaklah baru, tetapi pelaksanaannya harus diperbaharui dari yang sudah-sudah.

Perencanaan strategis tingkat keseluruhan (*corporate*) yang mendefinisikan ciri-ciri keseluruhan tujuan organisasi, perusahaan yang ditangani dan yang ditinggalkan, dan bagaimana sumber daya perusahaan didistribusikan di antara bagian-bagian perusahaan-perusahaan itu. Strategi tingkat gabungan (*corporate*) secara khusus memperhatikan campuran dan penggunaan bagian-bagian perusahaan yang disebut unit perusahaan strategis (*strategic business unit*). Perencanaan strategis tingkat gabungan membuat strategi besar, dan menjadi tanggung jawab dari top eksekutif organisasi.

Misalnya, renstra Depdiknas Tahun 2005-2009 disusun dalam rangka mempercepat sasaran Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of the Child*) yang menyatakan bahwa setiap negara di dunia melindungi dan melaksanakan hak-hak anak tentang pendidikan dengan mewujudkan wajib belajar dikdas bagi semua secara bebas (Artikel 28) dan konvensi mengenai HAM yang menyatakan "Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus bebas biaya, setidaknya pada dikdas. Pendidikan dasar harus bersifat wajib. Pendidikan teknik dan profesi harus tersedia secara umum dan pendidikan yang lebih tinggi harus sama-sama dapat dimasuki semua orang berdasarkan kemampuan" (Deklarasi HAM, Artikel 26). Hal ini sejalan dengan pencapaian sasaran pembangunan yang disepakati dalam Kerangka Aksi Dakar Pendidikan Untuk Semua (PUS) atau *Education for All* (EFA). Dalam sasaran Konvensi Hak-Hak Anak dan PUS, Pemerintah telah menetapkan kebijakan dasar dan Program Nasional Bagi

Anak Indonesia (PNBAI) tahun 2015, yaitu mewujudkan anak yang cerdas/ceria dan berakhlak mulia melalui upaya perluasan aksesibilitas, peningkatan kualitas dan efisiensi pendidikan, serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan perlu mengakomodasikan hak-hak anak dan kebutuhan anak termasuk juga mempertimbangkan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak.

Dalam memenuhi komitmen internasional di bidang pendidikan, Pemerintah melakukan perbaikan indikator kinerja PUS, dengan menekankan pada peran masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Namun, upaya inovatif sangat diperlukan untuk mempercepat kemajuan, khususnya untuk menjamin penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin yang belum memperoleh kesempatan belajar, serta penuntasan buta aksara sebagai salah satu indikator penting dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia.

Kemudian terkait dengan isu gender, ditetapkan pemihakan kebijakan dan disusun program-program pendidikan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Renstra menyusun strategi dalam mengurangi berbagai kendala yang menghambat partisipasi perempuan atau laki-laki untuk memperoleh kesempatan belajar pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Dalam menjalankan misi pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada dikdas, dibuka peluang yang sebesar-besarnya bagi laki-laki dan perempuan agar dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya dalam rangka mengembangkan seluruh potensi mereka secara optimal dan seimbang. Kebijakan menghapus berbagai kesenjangan gender pada berbagai tingkat pendidikan ini telah mulai diwujudkan melalui program

Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai salah satu komitmen pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan milenium, di samping penuntasan wajib belajar 9 tahun yang bermutu dan bebas dari biaya.

Selain terkait dengan gender, kebijakan pendidikan nasional perlu juga dikaitkan dengan pemihakan terhadap warga negara miskin yang mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan, terutama bagi warga negara miskin yang berpotensi dan berkecerdasan istimewa perlu memperoleh beasiswa dan fasilitas lainnya, tanpa mengalami hambatan ekonomi secara berarti. Demikian pula, bagi warga negara yang memiliki kelainan khusus dan hambatan fisik dapat memperoleh layanan pendidikan yang bermutu sehingga mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal.

Diberlakukannya sistem perdagangan dunia akan memberikan peluang dan tantangan dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Indonesia berkomitmen pada terbukanya perdagangan dunia (*WTO*), termasuk dalam perdagangan jasa atau *General Agreement on Trade in Services (GATS)* dan bidang pendidikan merupakan salah satu sektor yang terkait dalam *GATS* dimaksud.

2. Perencanaan Operasional

Perencanaan tingkat operasional adalah proses penentuan kebijakan-kebijakan dan prosedur yang secara relatif lebih sempit dalam kegiatannya, tetapi cukup kritis terhadap keberhasilan organisasi. Pada umumnya, organisasi yang besar seperti departemen pendidikan terdiri dari beberapa sub bagian yang fungsional, seperti: bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pengembangan

guru, keuangan dan bidang pendidikan tinggi. Perencanaan strategi yang terjadi menurut tingkat-tingkat pendidikan ini adalah suatu yang penting diperhatikan, khususnya dalam rangka pertumbuhan akhir-akhir ini dalam organisasi yang kompleks.

Di samping sebagai penentuan kebijakan, level operasional diharapkan mampu mendefinisikan setiap program menjadi kegiatan yang rinci sehingga setiap program terbagi habis dalam kegiatan dengan uraian yang jelas dan terukur. Dengan demikian dapat diterjemahkan ke dalam waktu, biaya, jumlah personal serta tempat.

C. Jangka Waktu Perencanaan Pendidikan

Adanya jangka waktu yang berbeda antara tiga macam perencanaan itu perlu terpadu, oleh sebab itu kemampuan dalam merencanakan hendaklah mencakup hal-hal yang terdapat dalam rencana itu, seperti praktek-praktek masa lalu dan jenis usaha merupakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan rencana itu. Juga satu hal yang perlu diperhatikan ialah masalah jumlah uang yang diinvestasikan. Kapan uang itu akan kembali dan berapa untungnya karena sejumlah uang telah digunakan untuk biaya bahan, alat, promosi dan untuk melatih tenaga-tenaga yang diperlukan. Oleh sebab, itu semua macam perencanaan perlu fleksibel, karena asumsi-asumsi masa datang itu tidak mudah mengetahuinya. Jadi, adanya perencanaan jangka panjang, menengah, dan jangka pendek masing-masing memiliki keuntungannya sendiri. Pada perencanaan jangka panjang dituntut adanya pandangan ke depan, memiliki kreativitas dan ketrampilan khusus. Pengalaman yang diperoleh dengan perencanaan ini akan membantu para manejer untuk masa selanjutnya.

1. Perencanaan Jangka Pendek (*Short range planning*).

Dalam hal ini jangka waktu berkisar antara satu minggu sampai satu tahun. Biasanya, banyak bagian yang dilibatkan dalam kegiatan itu karena waktunya pendek. Komitmen manejer pun sangat diharapkan dan mengandung resiko terutama dalam dana yang dikeluarkan. Oleh sebab itu, rencana jangka pendek memerlukan ketelitian dan urutan kegiatan yang rapi.

2. Perencanaan Jangka Menengah. (*Medium range planning*).

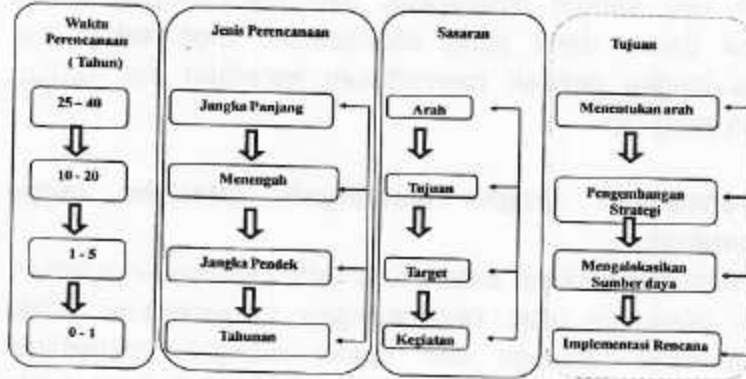
Waktunya berkisar antara satu tahun sampai lima tahun. Hal ini dilakukan atas pertimbangan penyelesaian suatu rencana tidak terdesak dan masih mungkin melakukan penyesuaian sewaktu pelaksanaannya. Seperti juga pada rencana jangka pendek, dalam hal ini pun diperlukan ketelitian disertai asumsi-asumsi (perkiraan yang belum dibuktikan) agar apa-apa yang tercantum dalam perencanaan dapat diwujudkan 100% atau mendekatinya. Resikopun bisa segera dihindarkan jika terdapat sesuatu tidak tertera dalam rencana.

3. Perencanaan jangka Panjang (*Long range planning*).

Para pendiri, para pemegang saham, dan para manejer umum perlu memiliki visi (pandangan jangka panjang), misi (apa yang menjadi tugas pokok bagi setiap unit dalam organisasi), tujuan (adalah suatu kadaan yang akan dicapai dalam berbagai usaha organisasi), dan sasaran (target ialah sesuatu yang akan dicapai dan terukur dalam waktu dan kadar tertentu).

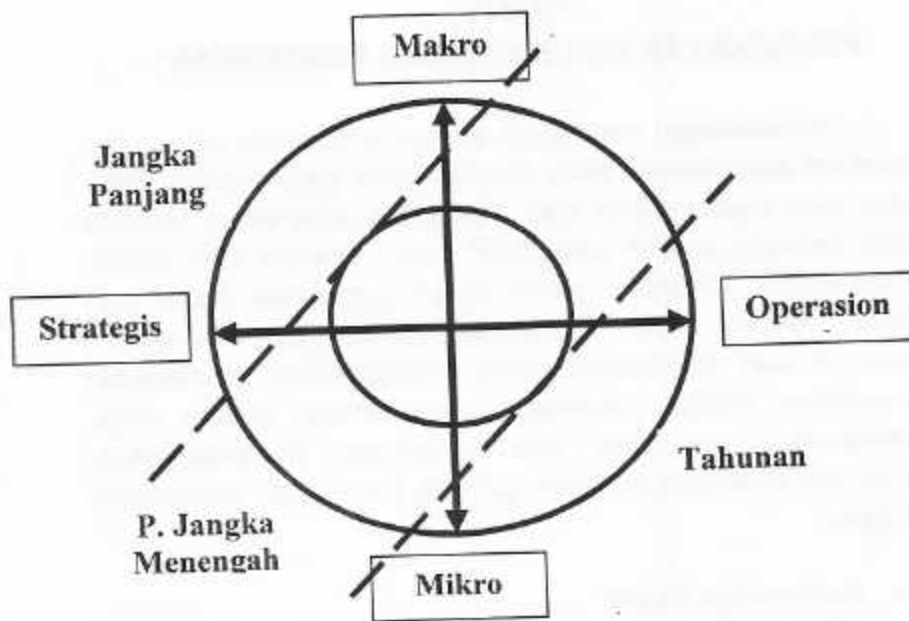
Menentukan arah dan Tujuan

Arah sasaran dari tujuan Perencanaan Pendidikan dan Kriteria Perencanaan



Proses Perencanaan Pendidikan

Bagan hubungan Antara Perencanaan makro, mikro di dalam Level Strategis dan Operasional Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek



BAB IV

PENDEKATAN PERENCANAAN PENDIDIKAN

Perencanaan pendidikan sangat tergantung situasi dan sasaran perencanaan yang dihadapi pada serta sasaran objek dan level kajian. Objek bisa saja sama akan tetapi levelnya bisa berbeda apakah pada level makro-strategik atau makro-operasional. Misalnya, perencanaan pendidikan dilihat dari jenis, jenjang dan satuan pendidikan. Secara umum, perencanaan pendidikan dapat menggunakan pendekatan kebutuhan sosial, pendekatan perencanaan tenaga kerja, pendekatan nilai balik, dan pendekatan biaya-efektivitas, pendekatan analytical hirarcy process (AHP), dan pendekatan sistem.

A. Pendekatan Sosial

Pendekatan sosial bertujuan mengembangkan pendidikan sesuai dengan tuntutan sosial dalam mengangkat martabat bangsa yang mengandung misi pembebasan, atau penanaman idealisme akibat tekanan politis maupun sosial. Ini umumnya terjadi pada negara berkembang. Di samping itu, pendekatan sosial juga digunakan sebagai suatu kebutuhan untuk meningkatkan prestise. Ini terlihat bagi masyarakat yang memiliki level ekonomi memadai tetapi tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai sehingga perlu untuk memperoleh gelar pendidikan.

Dari gambaran di atas terlihat bahwa pendekatan ini lebih menekankan pemerataan kesempatan atau kuantitatif, dibandingkan dengan aspek kualitatif. Oleh karena itu, pendidikan dasar merupakan prioritas utama yang harus

diberikan kepada setiap anak usia sekolah. Sebagai gambaran, wajib belajar sembilan tahun di Indonesia merupakan manifestasi dari tuntutan sosial agar target minimal sekolah adalah sembilan tahun serta membebaskan masyarakat dari keaksaraan fungsional. Suatu target yang harus dicapai adalah pembebasan dari tuna aksara (*free from illiteracy*) yang telah menjadi keputusan pemerintah.

A. W. Guruge (1972) menjelaskan bahwa pendekatan sosial adalah *"the traditional approach to education al development by providing institution and facilities to exercise of student and parent preferences"*. Pendekatan sosial adalah pendekatan tradisional untuk pembangunan pendidikan dengan menyediakan lembaga dan fasilitas untuk memenuhi tekanan-tekanan untuk memasukkan sekolah serta memungkinkan pemberian kesempatan kepada pemenuhan keinginan-keinginan murid dan orang tuanya secara bebas.

Pendekatan yang dikemukakan Guruge tersebut bersifat tradisional yang pendekatan ini didasarkan kepada tujuan untuk memenuhi tuntutan atau permintaan seluruh individu terhadap pendidikan pada tempat dan waktu tertentu dalam situasi perekonomian politik dan kebudayaan yang ada pada waktu itu. Ini berarti bahwa sektor pendidikan harus menyediakan lembaga-lembaga pendidikan serta fasilitas untuk menampung seluruh kelompok umur yang ingin menerima pendidikan. Jika jumlah tempat yang tersedia masih lebih kecil dari pada jumlah tempat yang seharusnya ada, maka dikatakan bahwa permintaan masyarakat melebihi penyediaan.

Pendekatan sosial juga mengharuskan para perencana pendidikan untuk memperkirakan kebutuhan pada masa yang akan datang dengan menganalisa: *"In demographic growth, participation in education, student flows from grade to grade*

and to level and social and individual preference relating to types of education" kedekatan social dapat juga menganalisis: (1) pertumbuhan penduduk, (2) partisipasi dalam pendidikan (yakni dengan menghitung persentase penduduk yang bersekolah), (3) arus murid dari kelas satu kelas yang lebih tinggi dan dari satu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi (misalnya dari SD ke SLTP ke SMA dan ke perguruan tinggi), (4) pilihan atau keinginan masyarakat dari individu tentang jenis-jenis pendidikan.

Kemudian, perencana diminta untuk merencanakan penggunaan tenaga dan fasilitas yang ada secara optimal dan memobilisasikan dana dan daya agar supaya permintaan masyarakat terhadap pendidikan menjadi terpenuhi. Banyak negara terutama negara berkembang, penyediaan pendidikan dasar baik dalam sekolah maupun di luar sekolah didasarkan kepada pendekatan-pendekatan permintaan masyarakat.

Namun demikian, pendekatan sosial sukar diukur keberhasilannya, kecuali untuk negara yang sudah melaksanakan undang-undang kewajiban belajar serta mempunyai data demografi baik (lengkap) atau adanya kebijakan pemerintah termasuk Indonesia sesuai Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2008 tentang wajib belajar.

Kelemahan pendekatan permintaan masyarakat ini dapat disebutkan antara lain berikut ini.

1. Pendidikan ini mengabaikan alokasi sumber-sumber dalam skala nasional dan secara implisit tidak mempersoalkan berapa besar sumber yang diperuntukkan bagi pendidikan karena beranggapan bahwa penggunaan sumber-sumber itulah yang terbaik bagi pembangunan bangsa.

2. Pendekatan itu mengabaikan ciri-ciri dan pola kebutuhan *man power* yang diperlukan disektor kehidupan ekonomi. Dengan demikian, akan cenderung menghasilkan tamatan yang sebenarnya kurang diperlukan dan justru akan kekurangan jenis tamatan yang dibutuhkan.
3. Pendekatan ini cenderung berlaku menjawab tuntutan saja sehingga mengabaikan pertimbangan pembiayaan, dan pemerataan sumber-sumber itu menjadi kecil. Akibatnya, tuntutan kualitas dan efektivitas pendidikan tidak tercapai yang berarti pemborosan.

Pendekatan sosial dalam perencanaan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas tadi pernah di tuang secara tepat dalam *Robbins Comunittee on Higher Education* di Inggris pada tahun 1963 (Guruge, 1972) dengan alasan pemilihan pendekatan ini bahwa: "*All young persons qualified by ability and attainment to pursue a full time course in higher education should have the opportunity to do so*". Dengan demikian, setiap warga negara terutama orang tua berhak mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih tinggi, karena pendidikan dipandang merupakan faktor pendukung kearah kemajuan dalam bidang-bidang lain. Pilihan pribadi dan anggota masyarakat yang menentukan apakah dia harus mengikuti pendidikan atau bidang, dari jenis pendidikan yang dikehendaknya atau tidak. Pemerintah bertugas untuk menyiapkan sekolah-sekolah dan fasilitas-fasilitas yang cukup untuk semua anak yang bersekolah.

Di Amerika Serikat, walaupun secara formal tidak menggunakan pendekatan sosial, kenyataannya terdapat beberapa negara bagian yang melakukannya dengan mengadakan proyek-proyek bagi para mahasiswa pada

tempat-tempat tertentu. Masalah pokok yang dialami tidak hanya faktor penduduk, tapi juga faktor sosial ekonomi lainnya atau aktivitas atau kebijakan pemerintah seperti uang kuliah, beban pembiayaan operasional, lokasi, jenis pendidikan, dan usaha menstabilkan ekonomi masyarakat.

Dengan pengalaman yang dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dengan menggunakan pendekatan sosial tanpa memperhatikan kriteria kebutuhan masyarakat sebagaimana yang lazimnya dilakukan perencanaan pendidikan maka tujuan pendidikan akan sukar dicapai secara optimal sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Alternatif pendekatan perencanaan pendidikan dalam Pendekatan Kebutuhan Sosial ini lebih menekankan pada pemerataan kesempatan atau kuantitatif dibandingkan dengan aspek kualitatif. Pendekatan kebutuhan sosial ini adalah pendekatan tradisional bagi pembangunan pendidikan dengan menyediakan lembaga-lembaga dan fasilitas demi memenuhi tekanan-tekanan untuk memasukkan sekolah serta memungkinkan pemberian kesempatan kepada pemenuhan keinginan-keinginan murid dan orang tuanya secara bebas. Dalam Model kebutuhan sosial ini, tugas perencanaan pendidikan adalah harus menganalisa kebutuhan pada masa yang akan datang dengan menganalisa: (a) pertumbuhan penduduk, (b) partisipasi dalam pendidikan, (c) arus murid, dan (d) keinginan masyarakat.

B. Pendekatan Ketenaga Kerjaan (*Man Power Approaches*)

Menurut A.W. Guruge (1972) Pendekatan ketenagakerjaan (*man power approaches*) adalah "Gearing on

educational effort to the fulfillment of national man power requirement". Pendekatan ini bertujuan mengarahkan kegiatan pendidikan kepada usaha untuk memenuhi kebutuhan nasional akan tenaga kerja (*man power* atau *person power*).

Pendekatan ini digunakan untuk mengarahkan kegiatan pendidikan pada usaha memenuhi kebutuhan nasional akan tenaga kerja. Gagasan pendirian sekolah kejuruan (*vocational*) merupakan wujud dari pendekatan ini sehingga lapangan kerja yang tersedia selalu diupayakan terkait dan sepadan (*link and match*) dengan sekolah yang didirikan. Namun di sisi lain ada kesulitan bagi sekolah untuk selalu menyesuaikan dengan dunia usaha dan industri.

Di Negera berkembang, pembangunan pada tahap awal diperlukan banyak tenaga kerja dari segala tingkatan dan berbagai jenis keahlian. Kebanyakan negara mengharapkan supaya pendidikan mempersiapkan dan menghasilkan tenaga kerja yang terampil untuk pembangunan dalam sektor pertanian, industri, perdagangan dan seterusnya, dan juga untuk calon pemimpin yang cerdas dalam profesinya. Untuk itu, dicoba membuat perkiraan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan oleh setiap kegiatan pembangunan nasional. Perencanaan pendidikan dalam hal ini diharapkan dapat memberikan keyakinan penyediaan fasilitas dan pengarahannya benar-benar didasarkan atas perkiraan kebutuhan tenaga kerja. Pendekatan untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja perlu ditetapkan atau dibuat terlebih dahulu sesuai dengan tuntutan dan situasi suatu bangsa.

Keterkaitan lulusan sistem pendidikan dengan tuntutan terhadap tenaga kerja pada berbagai sektor pembangunan seperti sektor ekonomi, pertanian, perdagangan dan industri sangat dituntut dalam pendekatan ini. Harapan pendekatan

sosial adalah bahwa pendidikan itu diperlukan untuk membantu lulusan memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik hingga tingkat kehidupannya dapat diperbaiki melalui penghasilan sangat *appalling* karena dikaitkan langsung dengan usaha pemenuhan kebutuhan dasar setiap orang. Karena itu tekanan utama adalah *relevancy* seperti disebutkan di atas, kurikulum dikembangkan sedemikian rupa hingga lupa yang merupakan output sistem pendidikan siap pakai di lapangan. Implikasi dari pendekatan ini adalah pendidikan harus diorientasikan kepada pekerjaan yang mungkin diperlukan dipasaran kerja. Jenis pekerjaan, tingkat atau level pekerjaan, persyaratan kerja, mobilitas kerja harus dijabarkan biaya hingga *educational attainment* cocok dengan karakteristik berbagai persyaratan pekerjaan yang diharapkan.

Jika secara murni pendekatan ini dilaksanakan maka kesukarannya adalah dalam pengembangan program yang relevan itu. Jenis kerja, persyaratan kerja, klasifikasi kerja, tingkat kerja amat tidak pasti dan perubahannya amat cepat, sedangkan pendidikan adalah proses jangka lama yang menghendaki ketelitian dan kecermatan. *Education attainment* yang diinginkan amat sulit diwujudkan. Kesukarannya lain adalah pendidikan yang tidak langsung berkaitan dengan dunia kerja tidak mendapat prioritas, dan pendidikan dengan pembebasannya itu akan dikesampingkan dan ini secara politis akan menimbulkan kesukaran pula.

Salah satu metode misalnya bukan hanya sekedar memperkirakan kebutuhan saja, tapi perlu penelitian jenis tenaga yang terlatih diperlukan oleh negara-negara atau dasar perbandingan yang dilakukan terhadap negara-negara lain yang sudah duluan mengalami taraf pembangunan yang serupa. Metode lain ialah dengan menggunakan model

matematika dalam menentukan jenis tenaga terdidik yang dibutuhkan oleh negara berdasarkan *trend* pertumbuhan ekonominya.

Kebanyakan ahli ekonomi memilih pendekatan ketenagakerjaan ini, karena mereka berpendirian bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung kepada sumber alam dan fasilitas, tapi juga sumber tenaga kerja yang mengolah, menggunakan serta mengelolanya. *Man Power Approach* memperhatikan terutama jenis dan tingkat pendidikan yang dapat langsung menghasilkan tenaga kerja. Perencanaan pengembangannya (kuantitatif dan kualitatif) didasarkan kepada perbandingan tenaga kerja menurut klasifikasi yang ada serta jumlah yang diperlukan. Misalnya, diperlukan 100 insinyur, beberapa lulusan STM yang harus ada, perbandingan antara dokter dengan perawat dan sebagainya.

Menurut pendekatan ini, perencanaan pendidikan diminta untuk merencanakan kegiatan atau usaha pendidikan suatu negara sehingga menjamin setiap individu atau bahkan seorang yang belum pernah sekolah terjun ke masyarakat dengan kemampuan untuk menjadi pekerja yang produktif.

Masalah yang timbul dalam perencanaan tenaga kerja terutama bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, antara lain dalam hal:

- a. jenis dan jumlah lapangan kerja;
- b. persyaratan yang jelas mengenai mutu personil yang dituntut oleh pasaran tenaga kerja;
- c. perbandingan jumlah personil berdasarkan jenjang keahlian;
- d. kebutuhan yang riil akan tenaga kerja.

Demikian juga pada negara-negara tertentu mempunyai pengalaman khusus dalam masalah pendekatan

mendirikan dan mengembangkan sekolah yang produktif. Jika sebuah pendidikan tidak produktif, dianggap kurang mampu memberi nilai balik (*rate of return*) secara baik.

Menurut Guruge (1972), yang dimaksud dengan *Investment Efficiency Approach* adalah "*Determining the investment to be made in education according to the rate of return or benefit or effectiveness*". Dari uraian Guruge tentang pendekatan efisiensi investasi ini, mengandung pengertian bahwa penentuan besarnya investasi dalam dunia pendidikan sesuai dengan hasil, keuntungan, atau efektivitas yang akan diperoleh. Di dalam pendekatan ini, bukan saja biaya keseluruhan pendidikan tetapi juga biaya sesuatu jenjang atau jenis pendidikan tertentu selalu dibandingkan dengan nilai hasil misalnya kenaikan pendapatan atau kenaikan produktivitas orang-orang yang sudah memperoleh pendidikan itu. Tugas perencanaan adalah menghindarkan investasi yang tidak memberikan hasil yang sepadan. Pendekatan seperti ini mempunyai harapan bahwa kegiatan pendidikan yang tidak produktif dapat dihindarkan melalui proses pendekatan efisiensi investasi ini.

Theodore Shultz Claim that: Improving the welfare of the poor people did not depend on land, equipment or energi, but rather on knowledge. He called this qualitative aspect of economic "Human capital" Consider all human abilities to be either innate. Every person born with a particular set of genes, with determines his innate abilities. Atribut of acquired population quality wich are valuable and can be augmented by appropriate invesment, it will be treated as human capital (Fitz-en xii).

Adanya hubungan antara tingkat pendidikan dengan kesehatan dan kemaslahatan manusia terlihat seperti

ditemukan di beberapa negara seperti berikut ini.

- Penelitian di tujuh belas negara Amerika Latin dan Afrika menemukan bahwa wanita berpendidikan memiliki resiko yang sangat rendah terhadap infeksi HIV.
- Keluarga yang berpendidikan cenderung memiliki anak lebih sedikit dari pada yang tidak berpendidikan.
- Hanya 20% ibu rumah tangga melek huruf rata-rata memiliki 6 orang anak sedangkan sisanya memiliki kurang dari 3 orang anak.

Pandangan pendekatan ini secara koseptual tampaknya, tidak diragukan lagi, mempunyai nilai ekonomi, artinya pendidikan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, walaupun para ahli ekonomi mengalami kesukaran secara nyata dan pasti dalam mengukur besarnya kontribusi tersebut, karena sifat dan ciri pendidikan yang kompleks itu. Keterkaitan pendidikan dengan ekonomi dapat diterangkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti tenaga kerja, pengetahuan dan teknologi. Faktor-faktor ini hanya dapat diwujudkan dengan masuknya peran pendidikan melalui *human Factor*, sebab pembangunan ekonomi pada dasarnya dilakukan oleh manusia dan untuk manusia. Pembangunan manusia hanya mungkin dilakukan oleh pendidikan, bukan oleh ekonomi. Bukti lain yang dapat menerangkan keterkaitan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi adalah negara-negara yang ekonominya lemah, tingkat pendidikan rakyatnya rendah. Bukti lain yang dapat menerangkan kontribusi pendidikan tahap ekonomi adalah melalui keterkaitan antara tingkat dan jenis pendidikan dengan ketenagakerjaan. *Income* seseorang ternyata banyak dipengaruhi oleh jenis pendidikan dan tingkat pendidikan yang diperolehnya. Secara umum *income* lulusan SD lebih rendah bila dibandingkan dengan *income* lulusan SMA, dan dengan

demikian pula SMA berpenghasilan lebih rendah bila dibandingkan dengan *income* lulusan perguruan tinggi.

1. Petani yang memiliki pendidikan dasar 4 tahun, rata-rata 8,7% lebih produktif dibanding dengan petani yang tidak memiliki pendidikan.
2. Pengaruh pendidikan bahkan lebih besar (13%) bila dibanding dengan input lain seperti pupuk, bibit baru atau mesin-mesin pertanian.
3. 60-90% pertumbuhan ekonomi Jepang dan negara industri Asia Timur lainnya lebih disebabkan oleh *human capital* daripada sumber daya alam. [data bank dunia]
4. Hasil penelitian di 83 negara berkembang (selama 1960-1977) 12 negara di antaranya dengan tingkat pertumbuhan yang paling cepat memiliki tingkat kecakapan membaca dan harapan hidup di atas rata-rata.
5. Hasil penelitian di 83 negara berkembang (selama 1960-1977) ditemukan, 12 negara di antaranya dengan tingkat pertumbuhan yang paling cepat memiliki tingkat kecakapan membaca dan harapan hidup di atas rata-rata.
6. Peningkatan kemampuan membaca dari 20% menjadi 30%, berhubungan dengan peningkatan pendapatan nasional (GDP) dari 8% menjadi 16%.
7. Tingkat literasi minimum, paling sedikit 40-50% telah menjadi kondisi pertumbuhan ekonomi yang penting: Inggris, Swedia dan Amerika telah memperoleh level ini sebelum revolusi industri.

Berdasarkan uraian diatas, pendekatan untung rugi

mempunyai implikasi sesuai dengan prinsip ekonomi yaitu program pendidikan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi menempati urutan atau prioritas penting. Karena pendekatan untung rugi mempunyai keterkaitan erat dengan pendekatan ketenagaan, maka program pendidikan kejuruan dan teknologi yang lulusnya mempunyai kesempatan lebih baik untuk bekerja mendapat prioritas dalam alokasi pembiayaan sebagai bentuk investasi dalam pendidikan. Kesulitan didalam pendekatan ini adalah menentukan dengan pasti program mana yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dalam menentukan besar alokasi dana. Pengembangan program pendidikan yang berorientasikan pada nilai ekonomi ini tidak selalu mudah karena kesempatan kerja yang merupakan ukuran nilai ekonomi tinggi, amatlah tidak stabil dan terus berubah sesuai dengan pertumbuhan ekonomi bangsa itu.

Pendekatan ini disebut juga pendekatan *Rate Education* (yang mula-mula dicobakan di Rusia), bertujuan untuk mengukur pendidikan dari sudut hasil atau keuntungan yang diperoleh. Jika suatu jenis pendidikan tertentu menghasilkan lulusan yang kalau sudah bekerja menghasilkan return yang jauh lebih besar dari input biaya yang dipakai untuk jenis pendidikan tersebut, maka jenis pendidikan ini harus terus dikembangkan. Jika tidak menguntungkan, sebaiknya perlu dipikirkan apakah jenis pendidikan itu perlu dilanjutkan atau tidak.

Pendekatan *Cost Benefit* didasarkan pada asumsi bahwa: (a) sumbangan seseorang terhadap pendapatan nasional adalah sebanding dengan tingkat pendidikannya, dan (b) perbedaan pendapat di masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan dalam pendidikan dan bukan perbedaan kemampuan atau latar belakang sosial. Perencanaan pendidikan dinegeri kita tidak menggunakan salah satu saja

dari pendekatan tadi, tapi menerapkan beberapa pendekatan, kadang-kadang ketiga-tiganya secara bersama-sama. Perencanaan pendidikan tidak diharuskan supaya terikat kepada salah satu pendekatan, akan tetapi menjabarkan tujuan nasional pendidikan. Setiap tingkat dan jenis pendidikan mungkin memerlukan pendekatan yang berlainan. Karena itu adalah penting bagi setiap perencana untuk mengetahui ruang lingkup dan keterbatasan-keterbatasan setiap pendekatan.

Alternatif pendekatan perencanaan pendidikan dalam pendekatan efisiensi biaya ini bersifat ekonomi oleh karena memiliki pandangan pendidikan memerlukan investasi yang besar dan karena itu keuntungan dari investasi tersebut harus dapat diperhitungkan bila mana pendidikan itu memang mempunyai nilai ekonomi.

Pendekatan efisiensi biaya mempunyai implikasi sesuai dengan prinsip ekonomi, yaitu program pendidikan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi menempati urutan atau prioritas penting karena pendekatan untung rugi mempunyai keterkaitan dengan pendekatan ketenagaan.

D. Pendekatan *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

Sasaran AHP ini adalah pada paradigma baru pengelolaan keuangan sektor publik dalam mewujudkan *good governance*. Semua biaya pendidikan yang timbul tidak lepas dari urutan prioritas dan tawaran program sebagai wujud kinerja. Kegiatan apa yang harus dilakukan dalam mencapai sasaran pendidikan tertentu harus terlihat dari program yang ditawarkan serta jumlah biaya yang dibutuhkan.

Siklus perencanaan dan pengendalian dapat dilihat dari besaran dan perjalanan biaya yang dilakukan. Anggaran pendidikan yang didasarkan program menjadi proses

penentuan untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

E. Pendekatan Sistem

Semua yang ada didunia ini merupakan sistem. Sistem berfikir merupakan suatu kata. Pendekatan sistem adalah cara berfikir terhadap pengertian yang lebih tepat dari konsep-konsep yang relevan dan aplikasinya. Sistem adalah suatu keseluruhan yang terdiri dari subsistem-subsistem atau komponen-komponen atau unsur-unsur atau dimensi-dimensi, sistem subsistem antarsubsistem terjadi intraksi, masing-masing subsistem bekerja untuk mencapai tujuan subsistem dalam rangka mencapai tujuan.

Pendekatan sistem adalah memandang sesuatu itu berdasarkan sistem yang saling terkait, artinya pendekatan itu harus dilakukan dan dilihat dari sub-sub sistem (tidak persial atau bagian-bagian) akan tetapi holistik (menyeluruh).

Pendekatan sistem terhadap pendidikan menyangkut apa saja yang terkait dengan pendidikan adalah merupakan rangkaian dari sub-sub sistem pendidikan yang digerakkan agar bekerja menuju sasaran pendidikan. Dengan catatan bahwa :

1. pendekatan sistem tidak menyediakan jawaban atas masalah, hanya mengurai (menggoncang) agar lebih mudah didekati untuk penyelesaian keseluruhan;
2. meminimalkan prasangka-prasangka dan memaksimalkan tuntutan objektif demi suatu jawaban yang konstruktif;
3. pendekatan sistem merupakan langkah-langkah yang logis untuk memecahkan masalah secara berkesinambungan.

Pendekatan sistem dalam perencanaan pendidikan melihat bahwa semua proses dalam pendidikan adalah saling terkait serta utuh dalam sebuah sistem, tidak parsial atau fragmentaris. Semua ini memiliki keterkaitan satu sama lain secara signifikan, baik dalam jumlah yang besar maupun kecil. Kita tahu bahwa seluruh yang ada di dunia ini merupakan sistem; sungai, gunung, transportasi, komunikasi dan ekonomi. Apabila sistem-sistem ini digabung di dalam organisasi, ini merupakan deretan dari berbagai bentuk komponen untuk menetapkan suatu tujuan yang teliti yang dijadikan sebagai rencana.

Ada tiga dasar pertimbangan yang dapat digunakan memilih pendekatan sistem, yaitu: (1) filosofi sistem, (2) sistem desain dan analisis, (3) sistem manajemen.

1. Sistem *Philosophis*:

Sistem filosopis merupakan kerangka acuan dari Teori sistem umum dan menyediakan cara pikir tentang sistem yang kompleks dan hubungan-hubungan antarkomponen. Suatu pendapat dari Cullition: Kita sedang beranjak dari zaman "analisis" ke zaman " Sintesis" sengan perlahan, dengan usaha manusia untuk menemukan jawaban lebh akurat dari pertanyaan yang "menyeluruh" dari sebuah operasi. Saat ini adalah Era sintesis yang memaksa manajemen untuk berfikir dan aktif/berbuat didalam cara yang baru dan berbeda sebagaimana yang dikatakan dengan pendekatan sistem. Dalam hal ini, "keseluruhan" bukan hanya kombinasi dari sub sistem tetapi secara nyata merupakan bagian.

Perubahan yang diharapkan di dalam sebuah sistem adalah dengan "evolusi" bukan dengan "revolusi" (terkait

dengan teori kaizen) sebab manajemen tidak dapat dirubah secara drastis.

Pendekatan ini juga memandang bahwa perencanaan pendidikan mengutamakan analisis awal, proses dan dampak yang akan timbul, mempertimbangkan sumber yang akan dilibatkan dan pihak yang terimbas. Analisis apa yang harus dilakukan dan bagaimana rancangan itu dapat dilakukan apakah sesuai dengan situasi yang ada.

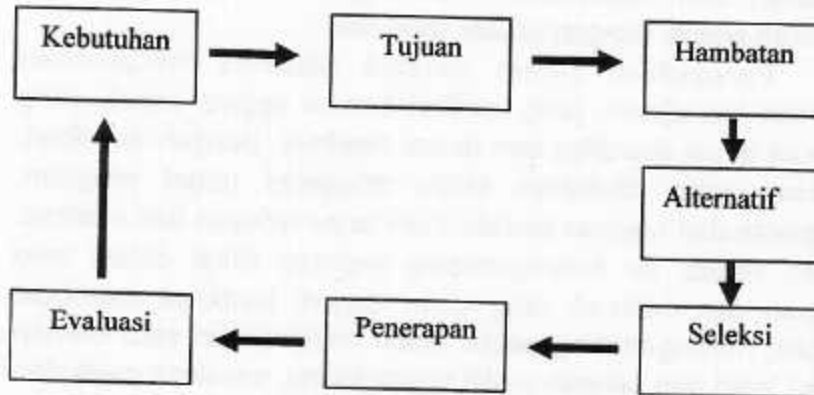
Pengelolaan sistem tersebut biasanya menggunakan kontrol manajemen yang melihat bahwa segala aspek yang terkait dapat dianalisa dan diukur hasilnya. Dengan demikian, proses yang dilakukan selalu dibayangi target program, kegiatan dan sasaran keseluruhan tanpa terlepas dari kualitas. Oleh sebab, itu masing-masing kegiatan diikat dalam satu tujuan dan maksud yang utuh. Seperti layaknya membuat mobil, masing-masing pabrik boleh mengerjakan satu elemen atau lebih dari sebuah mobil toyota kijang, misalnya casing dan bodi pada satu pabrik X, mesin di pabrik Y serta AC pada pabrik Z. Ketiga pabrik itu mempunyai tujuan yang sama untuk mewujudkan sebuah mobil. Masing-masing pabrik dapat menciptakan mekanisme tertentu dalam mencapai tujuan masing-masing kegiatan tetapi tidak lepas dari tujuan keseluruhan.

Dalam merancang sistem baik secara keseluruhan maupun sistem pada masing-masing program dapat dilakukan dengan beberapa langkah yaitu:

1. pelajari sistem yang ada untuk menemukan suatu sistem baru yang lebih efektif dan sesuai dengan situasi yang ada;
2. buat konsep tentang struktur personal, alat dan perangkat lain;

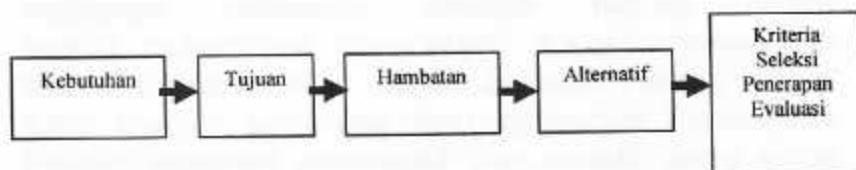
3. pilih suatu model yang cocok yang mampu mempercepat proses;
4. pilih metoda dan sarana yang tepat sesuai kebutuhan.

Berikut ini merupakan diagram dari urutan elemen dari "Pendekatan Sistem"



Pada diagram ini terlihat bahwa kebutuhan merupakan awal dari siklus sistem yang diidentifikasi dari permasalahan yang ada, dilanjutkan dengan penetapan tujuan. Dalam mencapai tujuan mungkin ada hambatan yang timbul, dianjurkan untuk membuat alternatif pemecahan yang relevan. Solusi yang ditawarkan diseleksi secara benar berdasarkan tujuan, lalu diterapkan sesuai mekanisme. Penerapan ini dievaluasi apakah sesuai kebutuhan atau tujuan.

Alur diagram yang ditawarkan dapat dirubah sesuai kondisi, model ini menjadi jelas dan digunakan pencil merah atau pena dan nomor yang anda rubah. Beri alasan terhadap bagian yang anda rubah, dan beri nomor hubungannya.



Elemen manajemen merupakan totalitas gerak, keseluruhan lebih diutamakan daripada bagian-bagian dan proses lebih vital dari pada basic elemen.

Penulis tidak melihat, pendekatan sistem bukanlah "PANACEA". Artinya, obat dari segala penyakit. Ini bukan terapi yang sederhana, tetapi pendekatan sistem merupakan "*facilitate understanding*" dan gambaran dari situasi yang kompleks.

Pendekatan sistem adalah membantu menangani masalah yang kompleks. Kemampuan untuk memahami, mengerti antarmubungan dan mengantisipasi reaksi di dalam subsistem merupakan fungsi dari orang pemikir dan simbol dari seorang manajer efektif.

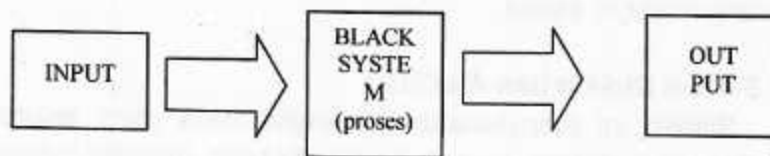
2. Sistem Desain dan Analisis:

Sistem ini menyediakan kerangka kerja yang seluruh masalah diidentifikasi secara benar. Setelah mengidentifikasi kecenderungan perencanaan maka langkah selanjutnya dalam mengkonsepsikan dan merancang rencana, yaitu menentukan tujuan dan sasaran. Kemudian, merancang rencana (*designing plans*) pendidikan. Alternatif pemecahan yang dievaluasi dan pilihan yang tepat dijadikan sebagai sumber. Pendekatan ini akan memberikan kontribusi yang besar jika dapat menilai efektivitas berbagai program yang ditanganinya. Perencanaan harus fleksibel, tidak boleh statis atau menumpuk secara berlebihan pada lingkungan tersebut. Perencanaan harus

selaras dengan dinamika pergerakan lingkungan. Pertanyaannya adalah utilitas yang didefinisikan sebagai "pilihan pribadi". Memang, hampir tidak mungkin membuat perencanaan lingkungan yang seluruhnya berguna untuk setiap orang. Namun, ada fleksibilitas mengenai manusia yang memungkinkan mereka untuk menyesuaikan lingkungannya dengan struktur psikologis, ketimbang hanya pasif menyesuaikan diri manusia dengan lingkungan. Singkatnya, proses desain merupakan 4 (empat) aktivitas penting, yaitu: a) definisi, b) Analisis, c) Sintesis, d) Modifikasi.

Aktivitas ini muncul secara berurutan, yaitu: pertama, definisi masalah. Kedua, analisis variabel yang relevan. Ketiga, sintesis variabel yang relevan tersebut kedalam desain tentatif (sementara). Keempat, modifikasi sampai bentuk final disepakati.

Bagian-Bagian dari Sistem



3. Sistem Manajemen:

Sistem manajemen merupakan gabungan dari kerangka filosofis dengan logika, sistematika, metode analisis disaat pengembangan untuk mengkoordinasikan aktivitas program yang akan menemukan tujuan yang tetap.

Ada 4 (empat) karakter penggunaan dari sistem manajemen:

1. manajemen yang berorientasi tujuan: penekanannya pada tujuan bagaimana organisasi diusahakan seefektif mungkin untuk mencapai tujuan;
2. manajemen berorientasi pada total sistem;
3. manajemen yang berorientasi pada pertanggungjawaban : sebab input dan output dapat diukur atau dihitung;
4. manajemen berorientasi pada manusia.

Ada empat kebijakan di dalam manajemen sistem, satu sama lain berbeda namun punya keterkaitan:

1. determinasi sistem (penetapan sistem);
2. disain dan kreasi;
3. operasi dan kontrol;
4. revidu dan evaluasi.

Skema Pendekatan Sistem

	Filsafat Sistem	Manajemen Sistem	Analisis Sistem
Pandangan	Konseptual	Pragmatis	Optimalisasi
Metode	Kogitatif(pikir dan refleksikan = renungkan)	Sintesis (simpulkan)	Buat Model
Organisasi subsistem	Strategi	Kordinatif	Pengoperasian

Tugas	Integrasi organisasi dengan lingkungan	Integrasi operasi melalui rencana dan penekanan pada antar-hubungan	Tingkatkan prestasi untuk mencapai tujuan dan mengefisienkan manfaat sumber.
-------	----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

4. Sistem Filosofis:

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa teori sistem umum adalah sebagai usaha pengembangan yang sistematis, kerangka kerja teoritis untuk menyatakan hubungan dari dunia empiris.

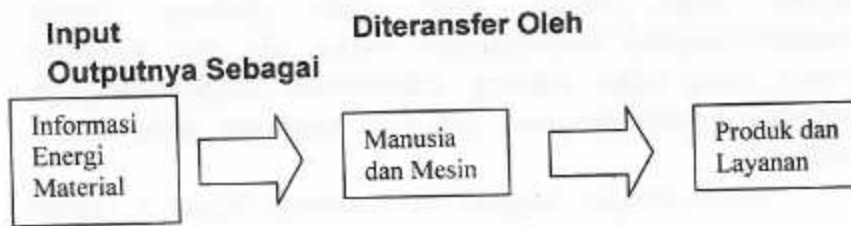
Ada beberapa prinsip yang pokok atau sebagai alasan filosofis dari teori umum ini, antara lain:

1. keseluruhan lebih utama dari pada bagian-bagian.
2. terintegrasi, yaitu suatu kondisi berbagai bagian saling terkait;
3. bagian-bagian merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan, tidak berguna tanpa mengaktifkan keseluruhannya;
4. peranan bagian-bagian adalah untuk mencapai tujuan keseluruhan;
5. hakikat dan fungsi bagian-bagian diperoleh dari posisinya dalam keseluruhan dan prilakunya diatur oleh keseluruhan pada hubungan antar bagian;
6. keseluruhan merupakan banyak sistem atau kompleks atau konfigurasi dari banyak energi, bagaikan suatu potongan yang tidak berarti dalam suatu komplektisitas;

7. segalanya akan mulai dengan keseluruhan, suatu unit, suatu bagian dan keterkaitannya kemudian akan bergerak.

Definisi mengandung tiga makna : 1 harus ada tujuan, 2 harus suatu bentuk (konstruksi) dari komponen yang telah dipersiapkan, 3 Informasi, energi, dan material harus disepakati besarnya di dalam suatu rencana.

Skema Model Garis Sebuah Sistem Dasar



BAB V LANGKAH PERENCANAAN PENDIDIKAN

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa perencanaan pada dasarnya menentukan kegiatan yang hendak dilakukan pada masa depan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengatur berbagai sumber daya agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Perencanaan merupakan tindakan menetapkan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, apa harus dikerjakan dan siapa yang mengerjakannya. Perencanaan sering juga disebut jembatan yang menghubungkan kesenjangan atau jurang antara keadaan masa kini dan keadaan yang diharapkan terjadi pada masa yang akan datang. Untuk menghubungkan kesenjangan masa kini dan harapan masa yang akan datang, dibutuhkan langkah-langkah sebagai acuan program maupun kegiatan yang harus dilakukan.

Terkait dengan langkah ini, Kaufman, Roger A (1975) menjelaskan bahwa perencanaan dimulai dengan identifikasi kebutuhan. Kebutuhan pendidikan ditetapkan sebagai diskrepansi terukur antara hasil yang dibutuhkan atau diukur. Penilaian kebutuhan memberikan data untuk identifikasi dan batasan kebutuhan prioritas tinggi dibutuhkan dalam pembahasan. Kebutuhan, ketika dicatat, memberikan informasi dasar untuk merancang tujuan menjamin kita atas produk pendidikan yang relevan. Apakah itu perencanaan? Rencana proyeksi atas apa yang ditetapkan untuk reaksi

tujuan valid dan bernilai. Jika diurutkan langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. identifikasi dan mencatat kebutuhan;
2. memilih kebutuhan yang tercatat dari prioritas aksi;
3. spesifikasi terperinci atas hasil atau ketetapan yang dicapai untuk setiap kebutuhan terpilih;
4. identifikasi kebutuhan untuk menemukan kebutuhan terpilih, termasuk spesifikasi batasan kebutuhan dengan pemecahan masalah;
5. sekuensi hasil yang dibutuhkan untuk menemukan kebutuhan teridentifikasi.

Identifikasi strategi alternatif yang memungkinkan dan alat untuk menetapkan kebutuhan menemukan setiap kebutuhan, termasuk daftar keuntungan dan kerugian setiap strategi dan alat.

Andrew F. Sikula (1973) menjelaskan, perencanaan adalah proses manajerial yang mencakup susunan dan serangkaian langkah-langkah untuk maksud mencapai beberapa tujuan, perencanaan merupakan keputusan yang harus dilaksanakan. Perencanaan dibagi ke dalam empat unsur, *Pertama*, perencanaan adalah proses. Sebagai suatu proses perencanaan adalah kegiatan yang bergerak maju dari satu titik ke titik berikutnya sesuai dengan urutannya. Perencanaan suatu konsep kegiatan yang orientik, statis, fleksibel, dan dinamik. *Kedua*, perencanaan berisikan serangkaian langkah-langkah. Serangkaian langkah-langkah ini ditunjukkan oleh metode ilmiah, metode kreatif atau pendekatan pemecahan masalah. *Ketiga*, perencanaan dibuat untuk suatu maksud. Serentetan atau serangkaian dari kegiatan mempunyai bermacam-macam sasaran atau tujuan, Biasanya sasaran atau tujuan dari suatu perencanaan adalah tujuan dari rencana tersebut. *Keempat*, perencanaan berisikan

kegiatan jasmani dan rohani. Walaupun biasanya perencanaan adalah inisiatif benda dan alam. Pada umumnya, langkah awal dalam proses perencanaan adalah membentuk jasmani dan konseptual.

Dari dua pendapat di atas, disimpulkan bahwa perencanaan pendidikan dapat dilakukan melalui 10 langkah berikut ini.

1. Melakukan analisis terhadap lingkungan strategis.
2. Mengumpulkan dan memaparkan data.
3. Mendefenisikan masalah.
4. Mengkonfrontir dengan visi dan misi.
5. Mengkonseptualisasikan disain dengan memahami kesenjangan.
6. Menformulasi rencana strategis dan rencana operasional.
7. Alokasikan sumber daya.
8. Implementasikan.
9. Evaluasi rencana.
10. Umpan balik atau rekomendasi.

Kesepuluh langkah perencanaan di atas diarahkan oleh empat pertanyaan mendasar (1) dimana kita sekarang, (2) kemana kita akan pergi, (3) bagaimana cara mencapainya serta (4) apakah kita sudah sampai di sana. Keterkaitan empat komponen itu akan dijelaskan berikut ini.

1. **Dimana kita sekarang;** adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban akan kondisi riil lembaga pendidikan dengan segala persoalannya, yang memuat apa yang terjadi pada lingkungan pendidikan, apa yang diinginkan, serta apa kebutuhan pendidikan yang dianalisis melalui lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Analisis ini disempurnakan dengan

data sebagai suatu proses reduksi akan fenomena yang terjadi pada lingkungan maupun sebagai simpulan harapan dan kebutuhan. Data yang akurat sebagai gambaran fenomena yang terjadi maupun harapan kedepan dapat direduksi lagi menjadi sebuah definisi masalah atau pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Hal ini merupakan *gambaran keadaan saat ini*.

2. ***Kemana kita pergi***; merupakan arah perencanaan yang harus dicapai yang dijabarkan (dielaborasi) dari misi dan visi lembaga. Selain acuannya visi dan misi lembaga arah perencanaan dapat dilakukan atas kebutuhan dan tuntutan mendesak atau gabungan keduanya yakni harapan visi, misi serta tuntutan atau kebutuhan yang mendesak. Tujuan ini adalah suatu kondisi yang diinginkan yaitu suatu perubahan atau perbaikan maupun pengembangan dari kondisi sebelumnya. Kondisi yang diharapkan ini yang bisa diarahkan pada apa pilar yang dijadikan landasan pembangunan pendidikan seperti perluasan akses, peningkatan mutu maupun akutabilitas dan pencitraan publik. Ketika telah menemukan arah atau tujuan perencanaan, sesungguhnya secara langsung maupun tidak di dalam pemikiran kita telah terbentuk suatu gambaran kegiatan, gambaran hasil dalam wujud konsep yang dikenal disain konseptual. Ini adalah situasi pendidikan yang diharapkan.
3. ***Bagaimana mencapainya***; situasi pendidikan yang diharapkan adalah tujuan perencanaan yang akan dicapai. Oleh sebab itu, segera disusun strategi pencapaian program maupun pencapaian kegiatan. Strategi pencapaian harus sinkron dengan tujuan yang kita capai dengan memperhitungkan efisiensi dan

efektivitas. Langkah-langkah pencapaian yang diformulasi tidak berdiri sendiri, tetapi telah memuat sumber daya yang dibutuhkan. Berapa anggaran yang diperlukan, siapa pelakunya dan di mana tempatnya serta berapa lama akan dilakukan.

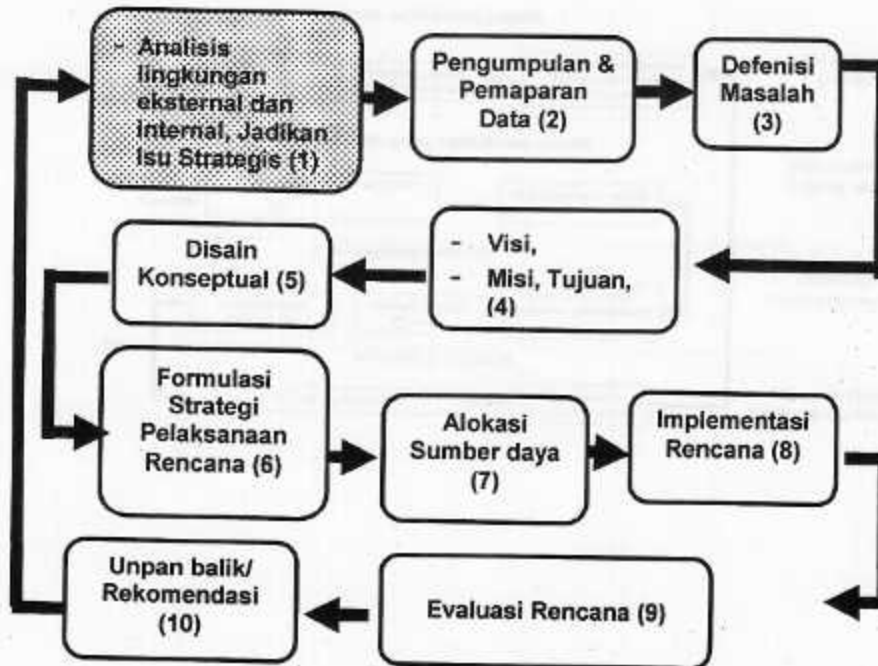
4. **Apakah sudah sampai disana;** untuk mengetahui apakah kita telah sampai pada tujuan yang kita buat dibutuhkan evaluasi dan kontrol. Evaluasi perencanaan dilaksanakan pada proses yang sedang berjalan atau pada terminal tertentu untuk menandai berakhirnya siklus proses perencanaan pendidikan. Evaluasi pada dasarnya merupakan suatu aktivitas pengendalian yang memungkinkan intervensi yang positif. Evaluasi memeriksa arah yang diambil dan mengevaluasi hasil atau penyimpangannya dari perencanaan sebelumnya. Penilaian dan pengujian kuantitatif yang berdasarkan pengalaman masa lalu merupakan cara mengevaluasi berbagai tahap dalam proses perencanaan. Kemudian kontrol sangat dibutuhkan dalam setiap proses agar tidak terjadi penyimpangan terhadap arah dan tujuan yang ditentukan sampai pada batas akhir. Jika ternyata tidak ada masalah, a perencanaan yang kita buat adalah tepat dan dapat direkomendasikan. Jika ternyata ada kendala, perencanaan kita perlu direvisi atau malah diganti dengan rencana baru.

Langkah perencanaan sebagaimana dijelaskan di atas merupakan siklus yang akan berhenti ketika dianggap sudah sempurna, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

LANGKAH PERENCANAAN PENDIDIKAN



A. Menganalisis Lingkungan



I. Analisis Lingkungan Pendidikan

Kita memahami bahwa pendidikan merupakan sistem yang tidak berdiri sendiri, tetapi suatu sistem yang dibentuk oleh beberapa subsistem yang berproses. Proses-proses tersebut terjadi di dalam suatu lingkungan yang kemudian disebut sebagai lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan ini terdiri dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Pada lingkungan inilah, informasi dan persoalan pendidikan berada dan menjadi bidang analisis masalah perencanaan pendidikan.

Lingkungan eksternal pendidikan adalah lingkungan

yang tidak secara langsung bersentuhan dengan lembaga pendidikan itu sendiri baik yang bersifat perangkat lunak seperti aturan dan perundang-undangan atau kebijakan, maupun perangkat keras seperti fasilitas penunjang dalam bentuk gedung maupun peralatan komunikasi serta sumber daya lain yang terkait dengan lembaga.

Lingkungan internal adalah berada pada lembaga pendidikan itu sendiri baik perangkat keras, lunak, atau sumber daya lain yang termasuk dalam sistem pendidikan itu. Sumber daya yang tersedia terutama sumber daya manusia adalah bidang telaahan yang membutuhkan perhatian.

Perencanaan pendidikan akan berurusan dengan keseluruhan apa yang terjadi baik di dalam lingkungan eksternal maupun lingkungan internal sebagai suatu bentuk proses pendidikan. Segala bentuk persoalan yang terjadi pada lingkungan pendidikan harus dicermati dan dipahami sebagai suatu sistem, agar menjadi masukan pada proses analisa yang lebih tajam dan akurat.

Analisis lingkungan dimaksudkan adalah untuk mengetahui sesungguhnya apa yang telah terjadi, sedang terjadi dan yang akan terjadi pada lingkungan pendidikan yang bisa didekati dengan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan atau analiaais SWOT.

Kekuatan (*Strengthness*) adalah potensi apa yang dimiliki oleh lembaga pendidikan yang dilihat dari aspek fasilitas, sumber daya maupun semangat. Kelemahan (*weakness*) menyangkut segala aspek yang tidak belum atau tidak mendukung berjalannya proses lembaga pendidikan. Peluang (*opportuniy*) kemungkinan yang bisa diraih atau dimanfaatkan untuk mendukung kemajuan pendidikan tanpa mengganggu sistem yang ada. Tantangan (*Treath*) adalah hambatan yang terjadi ketika ingin memaksimalkan potensi

yang tersedia dan memadukannya dengan peluang ada diluar lembaga pendidikan.

Untuk Indonesia sebagai suatu pedoman dasar lingkungan dan kegiatan yang dianalisis pada lembaga pendidikan dapat mengacu kepada standar pendidikan yang tertuang dalam PP No .19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari delapan standar.

(1) Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:

- a. Standar isi;
- b. Standar proses;
- c. Standar kompetensi lulusan;
- d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. Standar sarana dan prasarana;
- f. Standar pengelolaan;
- g. Standar pembiayaan; dan
- h. Standar penilaian pendidikan.

(2) Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

(3) Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Secara umum sebagai suatu lembaga pendidikan dibentuk dua aspek pokok, yaitu imprastruktur atau fasilitas, dan organisasi yang di dalamnya ada sumber daya manusia. Interaksi kedua aspek inilah menciptakan proses dalam lembaga pendidikan untuk beraktivitas, berkomunikasi, dan proses pendidikan lainnya.

Jadi, sasaran analisa lingkungan ditujukan kepada imprastruktur atau fasilitas, serta sumber daya manusia dengan segala aktivitas yang dilakukan, komunikasi yang dibangun serta proses pendidikan yang diciptakannya.

a. Lingkungan Imprastruktur atau fasilitas

Analisis lingkungan pada aspek imprastruktur dan fasilitas pendidikan bertujuan untuk melihat apakah penyediaan fisik dan peralatan lain yang dapat membantu tercapainya keberhasilan pendidikan baik individu dalam proses pembelajaran telah tersedia. Analisis fasilitas termasuk pada fasilitas pendidikan yang disesuaikan dengan pergerakan penduduk untuk melakukan hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa model pendekatan seperti yang dikemukakan William, yaitu model survei visual yang memperhatikan dua bagian pendekatan, yaitu: a) mengidentifikasi karakteristik peta kota atau wilayah, b) menentukan signifikansi atau keberartian kebutuhan akan fasilitas pendidikan.

Imprastruktur adalah ketersediaan sarana seperti: 1) jalan sebagai akses yang baik menuju lembaga pendidikan, 2) listrik sebagai energi untuk kepentingan penerangan, pembelajaran dengan media elektronik, 3) air untuk kebutuhan dan kepentingan kebersihan.

Fasilitas berupa gedung untuk 1) kantor dengan kelengkapannya, 2) ruang belajar dengan kelengkapannya, 3) ruang pertemuan atau serbaguna, 4) perpustakaan dengan buku dan sistemnya, 5) ruang labotatorium dengan kelengkapannya, 6) sarana olah raga dan kesenian, serta 7) sarana ibadah.

Menurut PP No. 19 tahun 2005 pasal 42 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa untuk sekolah harus menyediakan sebagai berikut.

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Pasal 43

- (1) Standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia.
- (2) Standar jumlah peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per peserta didik.
- (3) Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan.
- (4) Standar jumlah buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks

pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik.

- (5) Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dinilai oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (6) Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan.

Pasal 44

- (1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) untuk bangunan satuan pendidikan, lahan praktik, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan satuan pendidikan suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
- (2) Standar lahan satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio luas lahan per peserta didik.
- (3) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan sejenis dan sejenis, serta letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan yang menjadi pengumpan masukan peserta didik.
- (4) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan jarak tempuh maksimal yang harus dilalui oleh peserta didik untuk menjangkau satuan pendidikan tersebut.
- (5) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan.

b. Lingkungan Organisasi

Lembaga pendidikan sebagai sebuah organisasi tidak lepas ikatan maupun interaksi sosial dan hubungan budaya yang di dalamnya terjadi aktivitas baik yang rutin maupun insidental, proses komunikasi sesama anggota lembaga yakni guru dengan murid, guru dengan guru atau personil lainnya serta proses pembelajaran atau pendidikan.

1. Aktivitas Pendidikan

Pendidikan terdiri atas sekumpulan aktivitas yang merupakan suatu proses dan membentuk suatu sistem, yaitu sistem aktivitas pendidikan. Sistem aktivitas pendidikan mencakup aktivitas-aktivitas perencanaan kurikulum, perencanaan sumber daya, strategi program pembelajaran, interprograming komunitas sekolah, pelatihan pelayanan guru dan evaluasi.

2. Komunikasi Pendidikan

Sistem komunikasi pendidikan dapat dibagi ke dalam tiga subsistem, yaitu subsistem perpindahan (*movement*), sub sistem informasi dan sub sistem energi.

- a. Subsistem pergerakan pendidikan merupakan motivasi utama secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan menetapkan lokasi berbagai jenis aktivitas pendidikan dan mengizinkan perpindahan siswa dan bagian-bagian yang lainnya dalam wilayah pendidikan. Subsistem perpindahan juga berkaitan dengan masalah pendidikan. Tujuan dan kebutuhan pendidikan harus menjadi faktor utama dalam menentukan bentuk struktur, dan operasi sistem perpindahan.
- b. Sistem informasi pendidikan berkaitan dengan masalah-masalah penyediaan dan pengelolaan

sarana-sarana informasi, seperti: televisi, internet, dan lain-lain.

- c. Sistem energi pendidikan berkaitan dengan penyediaan energi yang akan digunakan dalam proses pendidikan, seperti listrik, AC, penerangan, dan lain-lain.

c. Operasional Pendidikan

Sistem operasional pendidikan mencakup segala sesuatu yang tidak secara langsung dilihat dengan proses pembelajaran, akan tetapi cukup membantu dan mendukung fasilitas pembelajaran diantaranya pelayanan perpustakaan, penyediaan buku-buku paket, konseling dan bimbingan siswa, pelayanan kesehatan, dan lain-lain.

Pasal 19

- (1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan.
- (3) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Pasal 20

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik.
- (2) Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca dan menulis.

Pasal 22

- (1) Penilaian hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai.
- (2) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktik, dan penugasan perseorangan atau kelompok.
- (3) Untuk mata pelajaran selain kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, teknik penilaian observasi secara individual sekurang-kurangnya dilaksanakan satu kali dalam satu semester.

Pasal 23

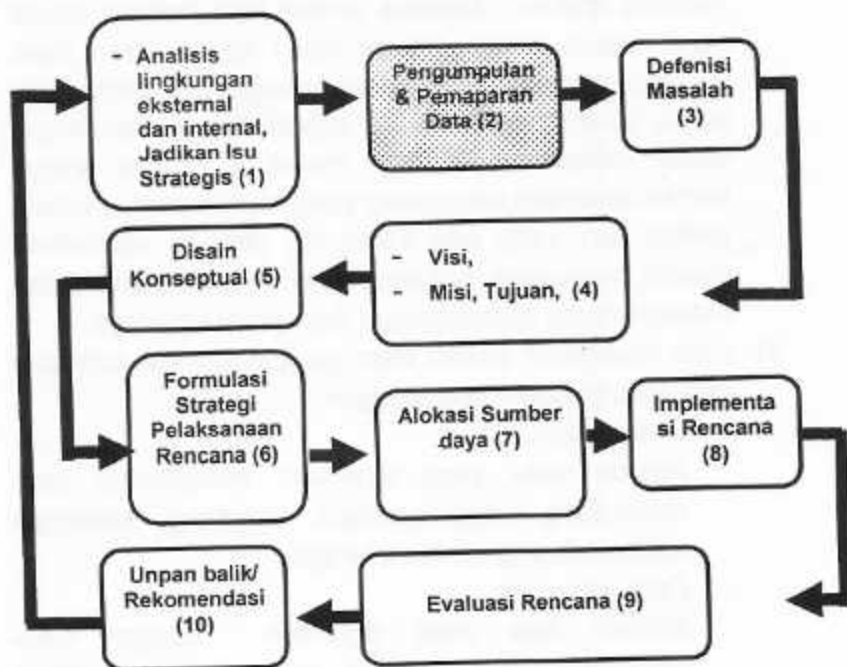
Pengawasan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) meliputi pemantauan,

supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

Pasal 24

Standar perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

B. Pengumpulan dan Pemaparan Data



I. Pengumpulan Data

Data adalah keterangan atau informasi yang diperlukan sebagai dasar untuk mengambil keputusan maupun memecahkan suatu masalah. Data boleh dalam bentuk angka-angka, kata-kata, gambar yang disajikan dalam bentuk fisik (*hard copy*) maupun dalam bentuk digital (*soft copy*). Berikut ini diberikan macam-macam data ditinjau dari beberapa segi yaitu;

a. Menurut sifatnya.

- 1) Data kualitatif adalah data yang berbentuk kategori atau atribut. Data ini biasanya ditemukan dalam bentuk simbol-simbol yang ada pada masyarakat yang memiliki makna. Makna simbol bisa berlaku umum atau khusus seperti halnya *trafig light* di jalan raya, bendera partai politik dan lain sebagainya. Simbol lain boleh dalam bentuk suara seperti batuk *mendehem* dikala masuk kamar atau mandi di sungai artinya bahwa akan ada seseorang yang akan masuk. Simbol-simbol lain yang ada kaitannya dengan pendidikan seperti menunduk sebagai rasa hormat, bersalaman sebagai tanda persahabatan dan lain sebagainya.
- 2) Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan yang dibagi dalam dua kategori:
 - Data Diskrit
Adalah data yang diperoleh menghitung atau membilang objek secara langsung sehingga berbentuk angka atau bilangan.
 - Data sekunder
Adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur atau dengan cara mentransformasi

objek ke dalam hitungan atau angka seperti hasil belajar bidang studi yang dirobah menjadi angka.

b. Menurut cara memperolehnya

1) Data primer

Adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi serta diperoleh langsung dari objeknya.

2) Data sekunder

Adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya data itu dicatat dalam bentuk publikasi-publikasi.

Pengumpulan data di dalam perencanaan pendidikan tidak hanya sekedar bagaimana mengumpulkan data yang diinginkan dalam suatu daftar, tetapi harus meliputi prosedur-prosedur cara perolehan data, pengorganisasian dan cara memperbaharui data. Pengumpulan data ini harus dilaksanakan bahwa data tersebut waktu yang tepat dan pada saat pembuat keputusan.

Ada lima tahapan dalam sistem pengorganisasian data, yaitu; pertama, data dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam sistem. Kedua, data diisikan atau ditempatkan di tempat penyimpanan data. Ketiga, data diolah (dikemas) menurut atauran yang sudah ada. Keempat, data ditampilkan dalam bentuk yang dapat digunakan. Kelima, data dipindahkan dari satu titik ke dalam sistem titik yang lain sesuai dengan keperluannya. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan dan selanjutnya digunakan untuk perencanaan pendidikan baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

II. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data lazim digunakan empat metode pengumpulan, yang boleh berdiri sendiri atau bersamaan yakni: pengamatan atau observasi, menggunakan angket, interview atau wawancara, dan studi literatur.

a. Pengamatan atau observasi

Pengumpulan data melalui pengamatan atau observasi adalah mengamati atau mengobservasi langsung kegiatan maupun kejadian yang pada suatu objek. Kegiatan atau kejadian dicatat atau didokumentasikan sehingga menjadi informasi. Misalnya, perilaku kelompok atau anak didik yang proaktif atau pendiam.

b. Penggunaan angket atau kuesioner

Metode angket dapat digunakan untuk mengumpulkan data dalam jumlah yang banyak dengan waktu yang singkat. Keberhasilan metode ini sangat tergantung pada keahlian peneliti dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan yang mudah dipahami sehingga responden dapat mengetahui dan merasakan konteks permasalahan yang sedang diteliti.

c. Interview atau Wawancara

Metode interview dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan adanya penjelesan langsung tentang konteks atau area penelitian kepada responden. Unsur subjektivitas dari data yang diperoleh merupakan hal yang tidak dapat diabaikan. Keberhasilan metode ini sangat tergantung pada keahlian dari pengumpulan data dalam berkomunikasi dan dalam menyusun daftar pertanyaan sehingga dicapai fokus yang diperoleh.

Data yang berhubungan dengan perpindahan biasanya berhubungan dengan transportasi misalnya pejalan kaki, bis, kereta api, dan mobil. Data ini berkenaan dengan biaya dan

dalam perencanaan ini perlu dipertimbangkan dalam memilih alat transportasi sehingga fungsi efisiensi dan efektivitas tercapai.

Tentang data yang berkenaan dengan ekonomi, dinyatakan sebagai berikut ini.

- a. Pengembangan transportasi dan komunikasi memiliki berbagai bentuk yang dapat dipertukarkan untuk keperluan industri, pedagang kecil, distributor, toko-toko kecil dan lainnya.
- b. Beberapa aktivitas membutuhkan biaya tinggi dengan jarak yang terpendek dari lokasi sentral.
- c. Bentuk perusahaan yang terdahulu memperhitungkan jalur pelabuhan, penerbangan, kereta api, terminal dan bergantung kepada pelebaran jalur truk.
- d. Dengan bertambahnya pemilik mobil pribadi yang dibutuhkan untuk dialokasikan pada pemberhentian fasilitas umum, menarik datangnya para pekerja.
- e. Di pusat kota tidak diperkenankan memiliki lokasi parkir yang tidak terpusat.
- f. Dalam transportasi dan komunikasi banyak perusahaan yang memilih lokasi parkir yang berpusat pada bangunan-bangunan perkantoran atau bisnis.

Data yang berkaitan dengan pendidikan yang berhubungan dengan kependudukan, lokasi, perpindahan dan kegiatan ekonomi yang secara langsung dan tidak langsung berhubungan dengan pendidikan.

Data kependudukan merupakan data yang berhubungan dengan identifikasi pribadi adalah nama, umur, jenis kelamin, ras, suku bangsa, dan lain sebagainya. Sedangkan data yang berhubungan dengan lokasi merupakan data yang berkaitan

dengan tempat adalah alamat, nomor rumah, sekolah, dan lain sebagainya. Data karakteristik struktur tanah terdiri dari umur, warna, luas, kondisi dan sebagainya, dan penerapan sistem ekonomi saat ini. Data yang berhubungan dengan perpindahan merupakan data yang membutuhkan perpindahan dari asal ke tempat tujuan yang di capai. Data ekonomi merupakan data yang terdiri dari tahapan input dan output. Dari keempat data tersebut, harus disatukan di dalam perencanaan pendidikan.

Adapun metode-metode menimalisasi kesalahan data diantaranya:

- 1) memonitor secara keseluruhan dan langsung;
- 2) mempertimbangkan banyak kemungkinan baik data primer maupun sekunder;
- 3) memperhitungkan segala perubahan data yang terbaru.

d. Studi literatur

Studi literatur adalah memperoleh data dari literatur atau bacaan yang di jadikan bahan analisis. Kemampuan menganalisis dan mentafsirkan sebuah data tidak akan terlepas dari seberapa luas pengetahuan atau referensi yang dikuasai penulis. Untuk mempertajam analisis yang dilakukan, maka sangat penting dilakukan studi kepustakaan atau bibliografi. Studi bibliografi dilakukan dengan menggali dan mendapatkan informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti melalui penelaahan berbagai konsep atau teori yang dikemukakan para ahli, sehingga akan dapat mendukung pelaksanaan penelitian.

III. Cocokkan atau Tepatsuaikan Data

Data yang telah dikumpulkan harus diuji kebenaran dan keasliannya dilihat dari sifatnya. Kalau data yang diambil

bersifat kualitatif jelas harus mengikuti kaidah-kaidah kualitatif. Misalnya seluruh data ada kaitannya dengan konteks darimana data itu diambil. Misalnya suara jeritan wanita terdengar, jika diukur tampaknya suara tersebut memiliki frekuensi tertentu. Dengan frekuensi yang sama suara ini akan berbeda penafsirannya jika satu jeritan wanita berasal dari pasar yang penuh hiruk pikuk, maka asumsinya mungkin seseorang dijambret maling. Namun berbeda jika frekuensi yang sama suara datang dari kamar penganten mungkin lain persoalannya.

Pengumpulan data pendekatan kualitatif juga harus memperhatikan perspektif "*emic*" dan "*etik*". Perspektif emik adalah cara pandang terhadap objek data dengan membawakan situasi, pengalaman dan budaya dari objek itu sendiri. Artinya, pengambil data harus mempertimbangkan apa yang sesungguhnya telah berkembang lama pada sebuah entitas tertentu terutama budaya yang sudah menjadi sistem pada kehidupan mereka, maka ini menjadi pertimbangan dalam perencanaan.

Perspektif etik adalah cara pandang peneliti atau pengambil data pada objek data dengan membawakan pengalaman, pemikiran dan budaya yang dimiliki. Biasanya ini terjadi ketika membandingkan situasi, pengalaman, budaya seseorang dengan lingkungan yang dihadapinya. Perencanaan perspektif etik yang terlalu mendominasi mengurangi keterterimaan hasil program yang dibuat.

IV. Pemaparan dan Data

Informasi berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang didapat atau ditemukan dari observasi, membaca, dan berkomunikasi. Data adalah fakta sesuatu yang diketahui dalam bentuk-bentuk dasar untuk disimpulkan

didokumentasikan, diedit, dan diperlakukan oleh setiap subjek dan siap untuk mendukung perencanaan dalam suatu cara yang objektif. Untuk mempermudah memahami data yang telah diperoleh perlu dipaparkan dalam berbagai bentuk misalnya tabel dan diagram.

Proses tabulasi data harus lebih akurat dari tahun ke tahun sehingga diperlukan adanya survei tahunan untuk riset dan penelitian yang ada guna mendapatkan data yang terbaru. Tabulasi data sangat diperlukan didalam perencanaan pendidikan untuk berbagai analisis data.

Adapun fungsi tabulasi data adalah sebagai berikut:

1. membantu didalam menyederhanakan masalah dalam berkomunikasi antara sesama kelompok perencana;
2. memudahkan dalam menganalisis antara kelompok perencana;
3. sebagai perbandingan perkembangan pendidikan dari masa lalu, sekarang dan prediksi masa yang akan datang;
4. membantu mempermudah sistematika riset dan evaluasi di dalam pendidikan.

Tabulasi data dapat dibagi menjadi empat bagian besar:

a. Tabulasi data berdasarkan kondisi kependudukan

Ada beberapa karakteristik data kependudukan yang perlu diolah, yaitu:

- 1) struktur ekonomi dan sosial masyarakat, baik rencana perdagangan, daerah industri dan sebagainya;
- 2) perkembangan sensus kependudukan, baik kelahiran maupun kematian dan migrasi serta pertumbuhan kependudukan. Sensus penduduk membantu

menginventarisasi sistem dan sebagai alat yang penting di dalam analisis detail dari karakteristik populasi penduduk;

- 3) struktur fisik(tata ruang) dan sosial;
- 4) pemetaan dan kondisi demografi merupakan salah satu unsur yang terpenting dalam pengolahan data, salah satu informasi dasar demografi diantaranya mengenai umur, jenis kelamin, suku bangsa/ras.

b. Tabulasi data berdasarkan kondisi lokasi tempat

Data ini berhubungan dengan pola penggunaan bahan untuk kebutuhan manusia yang meliputi keperluan tempat tinggal, gedung-gedung, taman-taman, dan lain-lain. Dengan adanya pengaturan pola penggunaan lahan di wilayah perkotaan, akan dimudahkan dalam perumusan perencanaan pendidikan.

c. Tabulasi data berdasarkan migrasi

Komponen yang mempengaruhi perpindahan diantaranya kualitas, frekuensi, intensitas perpindahan, luas, metode perpindahan, dan lama perpindahan. Perpindahan merupakan hal yang penting antara lokasi aktivitas, yang aktivitas bisa digambarkan oleh lokasi asal dan tujuan, seperti dari wilayah tempat tinggal ke wilayah pasar, dari wilayah regional ke wilayah perkotaan, dari wilayah tempat tinggal ke wilayah industri dan, sebagainya. Tipe data yang dibutuhkan di dalam menganalisis wilayah perpindahan ini, yaitu waktu perjalanan dan kapasitasnya. Beberapa model perpindahan di gunakan di dalam perencanaan transportasi, salah satunya adalah merupakan Model Gravity.

Keterangan:

Perpindahan dari wilayah ke wilayah lain atau dari daerah asal ke daerah tujuan

K = Digambarkan untuk semua wilayah yang dipelajari

M = Sejumlah perjalanan
 P = Produksi pada wilayah
 A = Daya tarik antar wilayah
 K = Faktor penyesuaian terhadap tingkat sosial ekonomi
 F = Pergeseran dari wilayah i ke wilayah j

d. Tabulasi data berdasarkan kondisi sistem ekonomi

Harga dan tanah sangat mempengaruhi posisi pemilihan seperti kedudukan sekolah. Nilai tanah dipengaruhi oleh ekonomi dasar dan tingkat kepuasan pelanggan. Ada dua alat yang digunakan untuk mengukur indikator nilai tanah, yaitu luas tanah dan bangunan. Biasanya tanah untuk bisnis mempunyai nilai jual yang tinggi karena sebanding liner terhadap nilai bangunan. Faktor lain juga berpengaruh terhadap jarak ke pusat kota/wilayah bisnis.

Ada beberapa metode untuk menghitung nilai tingkat ekonomi masyarakat dan indikator dari tingkat kesiapan finansial dalam pendidikan diantaranya dengan pengukuran tidak langsung dan pengukuran langsung dari tingkat pendidikan.

1. Pengukuran Tidak Langsung

Metode ini didasari pada aktivitas ekonomi secara tidak langsung yang menjadi indikator adalah kemauan untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Metode ini dengan mengasumsikan pada klasifikasi ekspor, impor dan lokal adalah pekerja.

Merupakan potensi pekerja dengan asumsi keseragaman permintaan dan perhitungan indeks produktivitas. Artinya, potensi pekerja berbanding terhadap nilai total pekerja lokal sekolah dengan pekerja nasional dalam pendidikan dan berbanding terhadap total pekerja nasional.

2. Pengukuran Langsung

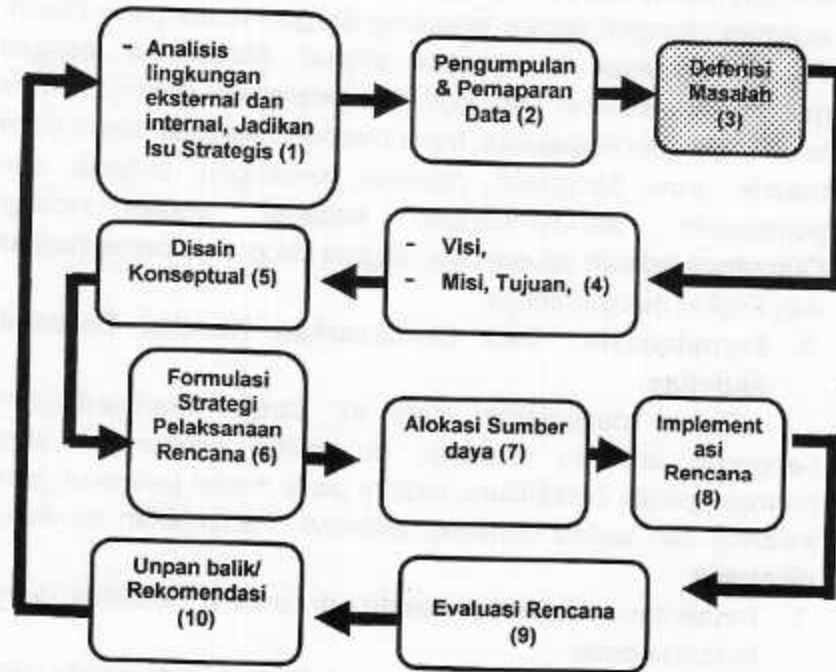
Salah satu metode pengukuran langsung dengan menggunakan metode input-output. Metode ini didasari pada aktivitas ekonomi secara langsung dengan hubungan industri. Tujuannya untuk mengontrol tingkat pendidikan dengan menjaga konsistensi sehingga mengeleminasi pekerja antara lulusan dengan kegagalan. Input metode ini adalah siswa yang masuk, guru, bangunan, material, keuangan, pekerja, dan pembuatan standar-standar sebagai undang-undang. Outputnya adalah lulusannya, tingkat drop out, pemeliharaan dan tingkat pelayanannya.

3. Pentabulasian Data Berdasarkan Kondisi Berbagai aktivitas

Dalam pengolahan data ini sangat memperhatikan pengaruh aktivitas kegiatan di sekitar lingkungan yang mempengaruhi pendidikan, seperti pada model pengaruh jenis kelamin dan waktu terhadap aktivitas. Pengolahan ini dapat diketahui:

1. Persentase distribusi waktu di antara aktivitas yang berbeda-beda.
2. Persentase distribusi waktu di antara periode waktu yang berbeda-beda.
3. Persentase distribusi individu terhadap aktivitas.
4. Persentase individu dari satu aktivitas dengan aktivitas lainnya.

C. Definisi Masalah



I. Mencari Masalah

Masalah memegang peranan yang sangat penting dalam mendefinisikan arti perencanaan pendidikan. Masalah utamanya meliputi: politik, ekonomi, dan waktu. Pada umumnya, masalah yang muncul pada proses perencanaan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi akan berdampak lebih besar pada tingkat di bawahnya.

Sudah menjadi pemahaman umum bahwa masalah pendidikan berkaitan erat dengan politik dan tidak jarang kebijaksanaan yang dihasilkan tentang pendidikan cenderung

dari proses politik. Antara politik dan pendidikan digambarkan dengan satu arah yang sangat mendasar sehingga proses perencanaan harus memainkan peranan yang penting dalam memberikan alternatif kebijakan dan tekanan untuk keputusan dari tingkat paling awal dan paling luas mulai dari perumusan kebijakan sampai kepada tingkat mikrooperasional.

Keterkaitan antara perencanaan pendidikan dan kebijakan pendidikan ini dinyatakan dengan sangat baik oleh struktur hierarki dari sebagian besar administrasi pendidikan, karena pada masa lalu praktek administrasi telah menegakkan hubungan antara perencanaan pendidikan. Arti hubungan ini adalah dijadikannya pendidikan sebagai konsumsi publik (*public good*) yang siap diamati dan dikomentari siapa pun. Ketika kebijakan pendidikan sebagai konsumsi publik ini tidak transparan, suatu malapetaka telah tercipta. Ini bukan lagi masalah perencanaan, tetapi perencanaan menjadi masalah.

Mencari masalah cenderung mudah, tetapi memilih masalah yang dianggap sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat secara politik dan ekonomi membutuhkan analisis yang tepat. Oleh sebab itu, definisi operasional masalah perencanaan pendidikan yang komprehensif adalah suatu yang mutlak.

Pada pembahasan yang lalu tentang perencanaan telah dijelaskan bahwa perencanaan ini adalah aktivitas individu yang tinggi baik tataran pemikiran maupun perbuatan dan hal itu dipengaruhi oleh karakter dari suatu lembaga itu sendiri, keinginan para top manajemen, begitu juga kondisi-kondisi eksternal yang terkait dan berpengaruh terhadap lembaga. Pembahasan masalah bisa datang dari perbedaan antara kenyataan dengan harapan terutama harapan pada visi, misi dan tujuan lembaga. Tugas perencana pada umumnya melakukan pencarian terhadap fenomena yang terjadi dalam

pendidikan dengan segala persoalan dan substansinya.

Masalah di dalam pendidikan itu harus diperlihatkan dan dikenali dengan jelas sehingga dapat dinyatakan secara ringkas dan cepat. Masalah itu apakah tentang keadaan sekarang yang memerlukan perbaikan atau berada di antara harapan dan kenyataan. Oleh karena itulah suatu rencana disusun. Terry (1972) mengemukakan beberapa pertanyaan dalam langkah ini.

- Apa sebenarnya tujuan atau keinginan dari rencana yang telah dirumuskan?
- Apa tujuan atau keinginan ini memerlukan rencana yang baru atau lebih baik memperbaiki yang ada sekarang?
- Apakah tujuan yang akan diselesaikan ini mempunyai makna bagi lembaga pendidikan?

Tujuan yang telah dibuat dengan sungguh-sungguh itu apakah berbenturan (*conflict*) dengan kenyataan sehingga perlu disesuaikan atau ada yang dihilangkan dari kondisi yang sekarang? Disini akan menjadi sumber masalah yang perlu dikenali dan dibutuhkan informasi yang lengkap tentang apa yang terkait. Pengetahuan tentang apa yang terjadi adalah hal yang penting dan apa akibat terhadap aktivitas intern dan ekstern bagi lembaga jika itu berlanjut. Dalam hal ini, perlu diperhatikan informasi dan semua data yang diperlukan serta mengenali staf operasi yang betul-betul mau diarahkan.

Untuk mengenali masalah secara baik, dapat juga dilakukan berpikir dari konsep rencana. Enam pertanyaan dasar yang perlu dijawab dalam mengenali masalah melalui konsep rencana adalah sebagai berikut ini.

- a. Mengapa rencana itu dibuat?
- b. Apa kegiatan yang perlu dilakukan?

- c. Di mana kegiatan berlangsung?
- d. Kapan kegiatan itu dilakukan?
- e. Siapa yang melakukan rencana itu?
- f. Bagaimana rencana itu akan dilakukan?

Selanjutnya substansi masalah sangat tergantung dari kondisi riil yang ada di lapangan. Namun, pada umumnya tidak lepas dari lima dimensi di bawah ini.

a. Pemerataan Kesempatan

- Persamaan kesempatan.
- Akses.
- Keadilan atau kewajaran.

Contoh-contoh perencanaan pemerataan kesempatan misalnya, bea siswa untuk siswa miskin, SD-SMP satu atap, pelatihan guru PLB, pembenahan SMP Terbuka, perencanaan bagi daerah-daerah terpencil dan jender, peningkatan APK & APM, peningkatan angka melanjutkan, pengurangan angka putus sekolah, dan lain sebagainya.

b. Peningkatan Kualitas

Kualitas pendidikan meliputi input, proses, dan output, dengan catatan bahwa output sangat ditentukan oleh proses, dan proses sangat dipengaruhi oleh tingkat kesiapan input. Contoh-contoh perencanaan kualitas, misalnya pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan (guru, kepala sekolah, konselor, pengawas, staf dinas pendidikan, dsb), peningkatan kapasitas dewan pendidikan dan komite sekolah, rasio (siswa/guru, siswa/kelas, siswa/ruang kelas, siswa/sekolah), pengembangan bahan ajar, pengembangan tes standar di tingkat kabupaten/kota, biaya pendidikan per siswa, pengembangan model pembelajaran (PAKEM, pembelajaran tuntas, pembelajaran dengan melakukan,

pembelajaran kontekstual, pembelajaran kooperatif), peningkatan NUAN, NUAS, karya ilmiah keterampilan kejuruan, kesenian, olah raga, keagamaan, akhlak, moral, budi pekerti, kedisiplinan, dsb.)

c. Peningkatan Efisiensi

Efisiensi merujuk pada hasil yang maksimal dengan biaya yang wajar. Efisiensi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu efisiensi internal dan efisiensi eksternal. Efisiensi internal merujuk kepada hubungan antara output sekolah (pencapaian prestasi belajar) dan input (sumber daya) yang digunakan untuk memroses/menghasilkan output sekolah. Efisiensi eksternal merujuk kepada hubungan antara biaya yang digunakan untuk menghasilkan tamatan dan keuntungan kumulatif (individual, sosial, ekonomik dan nonekonomik) yang didapat setelah kurun waktu yang panjang di luar sekolah. Contoh-contoh perencanaan peningkatan efisiensi, misalnya peningkatan angka kelulusan, rasio keluaran/masukan, angka kenaikan kelas/ transisi, penurunan angka mengulang, angka putus sekolah, dan peningkatan angka kehadiran.

d. Peningkatan Relevansi

Relevansi merujuk kepada kesesuaian hasil pendidikan dengan kebutuhan (*needs*), baik kebutuhan peserta didik, kebutuhan keluarga, dan kebutuhan pembangunan yang meliputi berbagai sektor dan subsektor. Contoh-contoh perencanaan relevansi, misalnya program keterampilan kejuruan/ kewirausahaan/usaha kecil bagi siswa-siswa yang tidak melanjutkan, kurikulum muatan lokal, pendidikan kecakapan hidup dan peningkatan jumlah siswa yang terserap di dunia kerja.

e. Pengembangan Kapasitas

Pengembangan kapasitas adalah upaya-upaya yang dilakukan secara sistematis untuk menyiapkan kapasitas (Sekolah, Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, dsb.) agar mampu dan sanggup menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam kerangka untuk menghasilkan output yang diharapkan. Pengembangan kapasitas meliputi pengembangan sumber daya manusia, kelembagaan, dan keterkaitan eksternal. Contoh-contoh pengembangan kapasitas, misalnya pengembangan kapasitas sumber daya manusia pada tingkat sekolah dan dinas pendidikan kabupaten/kota, pengembangan kapasitas perencanaan pendidikan, manajemen keuangan, dewan pendidikan, analisis regulasi pendidikan, pengembangan (organisasi, SIM pendidikan, dan tata kelola).

II. Defenisi Masalah

Perencanaan pendidikan yang komprehensif sangat memerlukan definisi masalah yang jelas. Situasi awal pada sebagian besar perencanaan pendidikan dipenuhi dengan ketidakpastiaan. Beberapa pertanyaan telah diajukan dari fanomema yang terjadi dan ini menuntut kemampuan perencana untuk memecahkan masalah yang harus segera diselesaikan. Namun persoalan yang sering timbul adalah para perencana pendidikan itu sendiri sering berbeda pendapat dalam masalah-masalah tersebut sehingga upaya yang dilakukan dapat dianggap sebagai suatu ungkapan ketidakpastiaan.

Kebodohan, kekacauan, krisis, kemiskinan dan stagnasi hanya sebagian contoh yang ada di masyarakat sebagai tanda agar dilakukan upaya-upaya mengatasinya melalui suatu

pendefinisian yang tepat. Pendidikan memiliki suatu struktur yang unik dengan wilayah kajian yang tidak terbatas (*open ended*). Masalah-masalah pendidikan pun luas dan selalu berkaitan dengan kegagalan yang terjadi dimasyarakat. Kegagalan ini terjadi mungkin disebabkan ketidakmampuan perencana mereduksi persoalan masyarakat menjadi sebuah definisi yang tepat suai. Tidak jarang banyak program dilakukan ternyata hanya menyelesaikan masalah yang bukan masalah.

Proses reduksi masalah adalah upaya membaca fenomena pendidikan menjadi simpulan atau fokus yang dapat dimengerti. Fokus masalah menurut Spradley (1977) harus mempertimbangkan beberapa alternatif berikut ini.

1. Membatasi masalah pada permasalahan yang disarankan oleh informasi dilapangan atau berdasarkan *informant's suggestion*
2. Membatasi masalah pada domain atau kategori simbolis tertentu yang cenderung banyak mencakup informasi dari domain-domain lain atau mempertimbangkan *organizing domains*
3. Membatasi masalah pada permasalahan yang mempunyai arti strategis nilai penemuannya bagi program peningkatan kualitas hidup subjek penelitian atau mengacu pada *strategic ethnography*.
4. Membatasi masalah pada permasalahan yang mempunyai cukup kaya sandaran teori dalam khazanah pengetahuan yang sudah ada atau bersandar pada pertimbangan *theoretical interest*.

Tugas utama perencana pendidikan adalah membuat definisi yang tepat terhadap pemecahan masalah yang terjadi berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang beragam. Banyak

perencana mempertentangkan masalah-masalah pendidikan karena tidak sepakat mengenai tujuan akhir yang diinginkan pendidikan, atau karena tidak bisa memahami bagaimana tujuan tersebut dirumuskan atau diterjemahkan menjadi sebuah definisi yang mudah dipahami dan diterjemahkan menjadi program dan kegiatan.

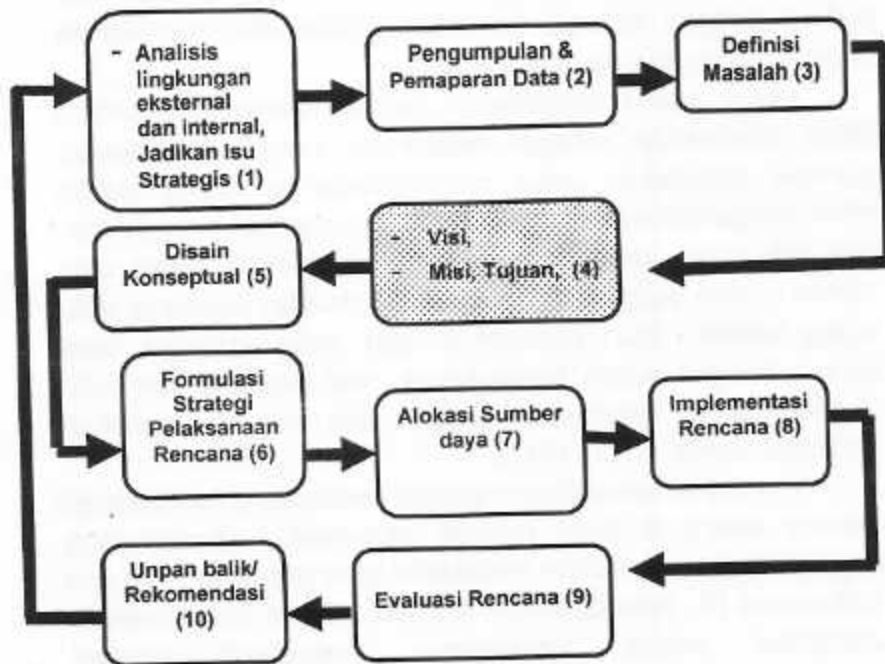
Sangat dibutuhkan sebuah rumusan singkat mengenai masalah yang terkait tugas-tugas dan pelaksanaan pendidikan serta perangkat pemecahannya melalui perencanaan. Tidak jarang masalah tersebut didefinisikan dengan mengacu tujuan pendidikan pada level makro strategis yang memuat filosofi pendidikan. Sesungguhnya, di samping jabaran filosofi, juga diperlukan jabaran mikrooperasional sebagai suatu definisi indikatif yang mungkin dilaksanakan secara tepat.

Definisi yang kurang tepat akan mengakibatkan penyelesaian yang kurang pas. Misalnya, dari data ditemukan bahwa daya serap murid pada sekolah A untuk bidang studi tertentu sangat rendah. Pada siapakah masalah ini kita tujukan? Pada murid kah? pada guru? atau keduanya? Jika didefinisikan, masalahnya adalah kemampuan muridlah yang sangat rendah, tujuan program adalah perlakuan pada anak didik. Maka seluruh kegiatan akan diarahkan bagaimana meningkatkan kemampuan anak didik. Sebaliknya, jika didefinisikan bahwa materi ini belum diajarkan guru secara maksimal, maka arah program jatuh pada guru. Dengan demikian kegiatan akan dirancang bagaimana guru mengajarkan materi dengan pemilihan metode yang tepat. Jadi, sasarannya adalah guru. Jika perencana salah mendefinisikan masalah, misalnya guru yang tidak mengajarkan materi, tetapi murid yang diberi perlakuan maka ini adalah menyelesaikan masalah yang bukan masalah dan ini adalah pekerjaan yang sia-sia.

Oleh sebab itu, keterkaitan antara data dan kemampuan menganalisis dari seorang perencana sangat dibutuhkan. Secara umum, hal yang patut dipahami seorang perencana dengan baik dengan metode yang tepat perencanaan meliputi:

- (a) lingkup dan cakupan bidang permasalahan;
- (b) rentang permasalahan termasuk di dalamnya perencanaan penyelesaian;
- (c) akibat yang ditimbulkan, analisis permasalahan serta upaya penyelesaiannya; dan
- (d) perhatian secara umum atas keberadaan masalah dan penyelesaiannya.

D. Menentukan Visi, Misi dan Tujuan



I. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang dihimpun dari berbagai fenomena sosial, tuntutan masyarakat, dan harapan pengambil kebijakan.

Tilaar (1999) mengatakan visi memuat tujuan dan target yang jelas rumusnya dan sifatnya komprehensif atau menyeluruh. Tujuan dan target tersebut dituangkan dalam kurun waktu (*time frame*), dalam kurun waktu inilah dirumuskan pembangunan pendidikan dan pelatihan nasional. Visi jangka panjang merupakan visi normatif yang sifatnya

abstrak sehingga perlu dirinci lebih lanjut, penerapannya dalam setiap rencana pembangunan jangka pendek. Artinya, bahwa visi normatif pendidikan nasional digali dari akar budaya bangsa sebagai penuntun (*guide line*) menjadikan manusia Indonesia yang berbudaya.

Majid (1999) mengatakan bahwa masyarakat madani dapat didefinisikan sebagai masyarakat yang berperadaban, memiliki kebebasan untuk merefleksikan kreativitas dalam dinamikanya secara egaliter dan komprehensif menuju cita-cita kehidupan yang disepakati bersama serta diatur oleh norma hukum yang kuat, lepas dari kekuatan kelompok atau orang tertentu. Jauh sebelum ini pun, pada dasarnya, para pendiri bangsa sudah menentukan visi dengan jelas yaitu "mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia" (UUD 1945).

Visi makro pendidikan nasional; menunjang transformasi menuju Indonesia baru sebagai *masyarakat madani* yang ditandai oleh suatu sistem kehidupan baru sesuai dengan jiwa proklamasi RI. Menghasilkan individu religius yang memiliki integritas pribadi terwujudnya masyarakat madani. Masyarakat madani (*civil society*) merupakan harapan suatu bangsa termasuk bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, berbagai strategi dan usaha dilakukan untuk mencapai harapan tersebut.

Pendidikan sebagai lembaga yang menangani sumber daya manusia dipandang sebagai investasi yang tepat untuk membentuk masyarakat madani. Persoalannya sistem pendidikan bagaimana yang dapat mengakomodasi seluruh aspek yang ada sehingga terakumulasi dalam visi yang suatu kehidupan masyarakat bangsa yang berakhlak mulia, memiliki keterampilan dan ilmu pengetahuan yang handal. Masyarakat

Indonesia baru tersebut memiliki sikap dan wawasan keimanan dan akhlak yang tinggi, kemerdekaan, demokrasi, toleransi kemanusiaan yang tinggi dan memiliki wawasan global.

Visi mikro pendidikan nasional adalah tampak pada terwujudnya *individu* manusia Indonesia baru yang memiliki sikap dan wawasan kebangsaan yang beriman dan berakhlak tinggi, kemerdekaan dan demokrasi, toleransi, menjunjung tinggi hak asasi manusia, bersikap sportif dan kompetitif, dan saling pengertian dan berwawasan global. Visi mikro ini menjadi rumusan umum mengenai kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

II. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai tindakan (upaya-upaya) yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi diharapkan muncul setelah melakukan langkah analisis sistem yang memberitahukan (1) apa yang dicapai, (2) kriteria apa yang akan digunakan untuk menentukan keberhasilan, dan (3) langkah apa yang dibutuhkan untuk menggerakkan seseorang dari situasi hubungan.

Suatu misi adalah suatu keseluruhan kegiatan produk, suatu jasa diselesaikan, atau suatu perubahan didalam kondisi sesuatu atau seseorang harus terpenuhi. Analisis misi adalah suatu penentuan, " di mana kita pergi?" Bagaimana kita mengetahui ketika kita sudah tiba? dan Apa langkah-langkah yang utama untuk mendapatkan dari sini ke sana?" Perencanaan bidang pendidikan secara konsisten berdasar pada memperoleh data analisis. Perencana harus tahu pasti bahwa data yang digunakan adalah lengkap, benar, dan harus mungkin. Suatu dasar yang tepat dan sah untuk membuat ini, lebih dulu komitmen hasil atau produk rumit (

Roger A (1975),

Kemudian, profil misi memberikan fungsi dasar, atau gambaran hal yang harus ditampilkan. Analisis fungsi adalah proses untuk menetapkan kebutuhan dan subfungsi untuk menetapkan unsur dalam profil misi.

Misi juga harus memuat analisis sistem pendidikan sebagai alat untuk menentukan nilai. Apakah solusi permasalahan dan langkah kedua dalam pendekatan sistem pada pendidikan adalah menetapkan solusi kebutuhan dan solusi alternatif? Mari, kita lihat pada sisa langkah analisis sistem - identifikasi metode yang memungkinkan dan alat untuk mencapai setiap kelompok kebutuhan penampilan.

Di samping analisis, misi juga memuat identifikasi strategi yang memungkinkan dan alat yang disediakan untuk mencapai setiap kebutuhan penampilan atau kelompok kebutuhan penampilan masing-masing untuk seleksi akhir dalam langkah pendekatan sistem lainnya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang misi, ada dua unsur yang perlu dipahami yaitu sasaran misi dan profil misi.

a. Sasaran Misi

Sasaran misi adalah suatu pernyataan tepat tentang terminologi pencapaian pemenuhan persyaratan hasil suatu misi. Sasaran misi bisa berasal dari suatu tujuan sehubungan dengan bertemunya suatu kebutuhan. Tujuan penyusunan suatu sasaran misi adalah untuk men terjemahkan tujuan seperti itu ke dalam yang terukur, paling umum kita dapat, termasuk pernyataan hasil (misi) bahwa dapat dibuat. Muatan misi untuk suatu perencana bidang pendidikan bisa meliputi tiga pilar pendidikan yaitu:

1. perluasan akses;
2. peningkatan mutu dan relevansi;
3. akuntabilitas dan pencitraan publik.

Untuk difahami bahwa sasaran hasil misi adalah sasaran hasil capaian yang menetapkan hasil di dalam terminologi terukur. Suatu misi sasarannya harus menyatakan dengan tepat kondisi-kondisi hasil akhir:

1. Kegiatan yang dilaksanakan menggambarkan penyelesaian.
2. Orang yang melaksanakan.
4. Syarat hasil yang dicapai.
5. Ukuran yang akan digunakan untuk menentukan hasil yang telah dapat dicapai.

Perencanaan bidang pendidikan dimulai dengan penilaian kebutuhan. Oleh karena, itu perencana mulai dengan mengenali instrumen yang mungkin digunakan untuk menentukan situasi apa dan apa yang seharusnya. Metoda yang lain dilanjutkan untuk mengidentifikasi apa hasil yang diharapkan seharusnya ada dan untuk menyatakan di dalam terminologi terukur, seperti indikator tujuan. Kemudian, tentang masing-masing indikator ini, suatu penyelidikan diselesaikan dengan diukur yang menandai situasi sekarang. Pada umumnya, dalam kaitan dengan keterampilan pelajar, memiliki pengetahuan, dan sikap seperti halnya perilaku mitra lain, pendidik, dan masyarakat.

Hasil yang terakhir pemenuhan suatu misi adalah ciptaan suatu produk atau prestasi hasil yang terukur seara spesifik. Kebutuhan capaian untuk misi menyediakan spesifikasi yang tepat, sukses atau kegagalan misi mungkin dapat terukur. Ini meliputi sebagai berikut.

1. Spesifikasi yang menyatakan ukuran-ukuran yang sukses terminal misi sasaran mungkin akan kelihatan seperti atau benar-benar terjadi.
2. Spesifikasi yang menyatakan konteks atau "peraturan gelanggang" di mana produk untuk diproduksi, seperti lingkungan, biaya-biaya, personil, dan lain "yang diberi."

Suatu kebutuhan capaian terdiri atas ukuran-ukuran yang terukur yang menguraikan produk misi atau hasil dari melakukan/menyelenggarakan suatu fungsi. Mereka boleh meliputi seperti kategori bagaimana produk untuk melaksanakan. Kondisi-kondisi di bawah ini adalah untuk melaksanakan, produk mendisain karakteristik dan spesifikasi capaian dan pembatasan atau aturan menempatkan pada pengembangan produk. Mereka menetapkan apa produk yang akan kelihatan seperti dan/atau lakukan, dan yang diberi kondisi-kondisi untuk pengembangannya bila ada.

Daftar kebutuhan pencapaian, kapan kebutuhan pencapaian dikenali, kita akan menjajaki. Ini sebaiknya dilaksanakan dalam format bentuk tabel yang menghubungkan kebutuhan pencapaian masing-masing, banyaknya fungsi, dan statemen kebutuhan pencapaian itu.

Analisis sistem mengidentifikasi semakin banyak fungsi, analisis akan memelihara kebutuhan pencapaian yang dihubungkan dengan fungsi dan tugas yang akan memerlukan beberapa halaman untuk suatu analisis lengkap. Ketika suatu kebutuhan capaian adalah sama untuk seseorang berfungsi untuk yang lain dinyatakan itu sasaran misi dan kebutuhan capaiannya bukanlah diperlukan untuk mendaftar kebutuhan capaian rintangan.

Rintangan potensial dikenali analisis misi. Mereka

menjadi kebutuhan pencapaian. Itu adalah, mereka menyediakan ukuran-ukuran untuk menetapkan karakteristik atau kondisi-kondisi di bawah di mana hasil misi harus terpenuhi. Identifikasi suatu batasan memerlukan keputusan untuk (1) menemukan, menginovasi, atau menciptakan, (2) merundingkan kembali atau (3) berhenti, tidak akan bisa dipertimbangkan untuk meneruskan suatu masalah, jika ada indikasi positif yaitu usaha akan menjadi suatu kegagalan.

Pekerjaan menulis suatu sasaran misi dan kebutuhan pencapaian dihubungkannya tanpa data dari suatu kebutuhan penilaian mengharuskan perencana bidang pendidikan untuk memperoleh data sah pada masalah dan karakteristik yang akan mengijinkan penentuan kegagalan atau sukses relatif sebuah misi. Pekerjaan tambahan ini untuk perencana atau perancang adalah penting untuk sukses usaha perencanaan sistem bidang pendidikan. Mengacu pada kuasa usaha (1961), "Jika kamu tidak mengetahui kamu sedang pergi, kamu mungkin berakhir di tempat lain."

Perencana boleh mengalami kesulitan untuk mendapatkan suatu laporan umum tujuan misi pada kebutuhan capaian yang terperinci melibatkan kelengkapan suatu analisis misi yang bermanfaat. Di dalam kejadian ini, mempertimbangkan kegunaan mungkin suatu piramida konseptual, analisis disebabkan sasaran hasil *gross* suatu sasaran misi dan kemudian kepada kebutuhan capaian yang terperinci untuk menguraikan karakteristik hasil misi. Ini adalah suatu proses berangsur-angsur untuk menuju keberhasilan meningkatkan ketegasan dan ketepatan bergerakan dari jenis yang spesifik.

Cara ini dipandang sbagai sasaran misi dan kebutuhan pencapaian yang dihubungkannya benar-benar membentuk suatu paket kesatuan apa yang akan dilaksanakan dan

bagaimana seseorang dapat menentukan ketika pekerjaan telah diselesaikan. Tanpa memasang kebutuhan pencapaian, suatu sasaran misi jarang tersedia ukuran untuk evaluasi. Hal itu tidak akan memberi perencana bidang pendidikan informasi yang diperlukan untuk memperoleh suatu relevansi dan rencana praktis untuk menuju keberhasilan sasaran dan kebutuhan capaian dihubungkannya. Sasaran misi dan kebutuhan capaian bersama sama menyediakan referensi dan spesifikasi untuk analisis sistem.

b. Profil Misi

Kedua unsur analisis misi adalah profil misi. Usaha perencanaan sejauh ini telah menghasilkan (1) apa yang akan dilaksanakan, (sasaran misi) dan (2) kebutuhan capaian untuk misi. Perencana sekarang harus menunjuk sendir, dari mana ia? ke tempat mana ia seharusnya? Ini melibatkan apa yang akan dilaksanakan, bukan "bagaimana" dan bukan "siapa yang akan melakukan itu."

Dalam diskusi awal, telah dicatat bahwa identifikasi kebutuhan adalah bagian dari penilaian kebutuhan. Dugaan ini merupakan suatu analisis pertentangan yang terlihat secara terus-menerus sebagai bagian dari analisis sistem karena di dalam beberapa kejadian kita ingin mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan untuk menghapuskan suatu pertentangan.

Dengan kata lain, profil misi adalah suatu fungsi statemen yang dilakukan sesuai mereka. Ia akan menghapuskan pertentangan dengan mengenali lebih dulu analisis pertentangan paling penting dan penilaian kebutuhan. Ada empat langkah untuk mengetahui profil misi seperti dijelaskan berikut ini.

Pertama:

Memperoleh sasaran misi dan kebutuhan capaian yang diceritakan tadi kita sudah menyelesaikan misi. Berikutnya uraikan keadaan tetap pada suatu saat tertentu.

Kedua:

Ketika lebih dulu fungsi utama di dalam misi profil telah dikenali, pertanyaan kemudian adalah, "Apa langkah logis berikutnya yang dapat diambil?" Fungsi berikutnya kemudian mengenali dan mendaftar. Proses ini dilanjutkan sampai dipastikan bahwa seseorang telah bergerak dari permulaan fungsi profil misi sampai fungsi akhir diperlukan untuk mencapai sasaran misi dan kebutuhan capaiannya.

Ketiga:

Ketika semua fungsi yang utama di dalam misi profil telah dikenali, mereka diperiksa kembali melawan terhadap kebutuhan, sasaran misi, dan kebutuhan capaian dalam rangka meyakinkan konsistensi internal di antara fungsi dan kebenaran eksternal berdasar pada kebutuhan.

Keempat:

Sekali ketika konsistensi internal telah ditentukan, menyusun fungsi di dalam suatu empat persegi panjang rapi atau bujur sangkar dan menghubungkan yang grafis "menghalangi" dengan suatu gerigi garpu padat sedemikian sehingga poin-poin panah mengikuti alir fungsi dari permulaan sampai akhir.

Keseluruhan proses melibatkan suatu analisis misi dalam wujud suatu profil misi. Fungsi yang utama telah

diuraikan dan hubungan di antara berbagai fungsi dijelaskan. Fungsi ini adalah:

- (1) menyatakan sasaran misi, kemudian;
- (2) menyatakan kebutuhan capaian dalam terminologi terukur berasal dari sasaran misi ;
- (3) memperoleh rencana manajemen dan menunjukkan fungsi utama yang diperlukan untuk memenuhi profil misi dan;
- (4) meninjau kembali manapun atau semua langkah-langkah yang sebelumnya diperlukan untuk memelihara konsistensi antara kebutuhan yang asli dan langkah-langkah subproduk untuk memperoleh dan menyelenggarakan suatu analisis misi.

Ketiga fungsi utama mengenali profil misi adalah:

- (1) menetapkan program perubahan direncanakan,;
- (2) melakukan proyek perubahan direncanakan dan;
- (3) mengevaluasi proyek perubahan direncanakan.

Suatu sasaran misi menghadiahi poin yang dengan tepat sebagai spesifikasi pencapaian, menyatakan apa yang akan terpenuhi, oleh siapa, dan dengan syarat apa derajat tingkat di mana misi diharapkan untuk terpenuhi juga ditetapkan.

Kebutuhan pencapaian menetapkan produk terukur tentang misi dan memasang permanen spesifikasi yang produk misi harus dicapai. Bersama-sama, sasaran misi dan kebutuhan pencapaian menyatakan *di mana kita pergi dan bagaimana kita mengetahui ketika kita sudah tiba*.

Di dalam suatu urutan profil, misi mengidentifikasi semua fungsi utama yang harus dilakukan untuk mencapai misi dan menghasilkan produk memuaskan spesifikasi terdapat di kebutuhan capaian. Ini adalah alur pusat untuk

memenuhi sasaran misi. Dengan penyelesaian sasaran misi, kebutuhan pencapaiannya, dan profil misi, perencana bidang pendidikan telah menyelesaikan analisis misi. Sekarang langkah diset untuk tahap analisis sistem yang kedua, yaitu berfungsi sebagai analisis.

Langkah-langkah berikut dilaksanakan dalam menyelenggarakan suatu analisis misi:

1. Memperoleh data kebutuhan dari penilaian kebutuhan dan statemen masalah yang memperoleh penilaian.
2. Memperoleh sasaran misi dan kebutuhan capaian sedemikian sehingga adalah mungkin untuk menjawab terminologi capaian terukur pertanyaan berikut: (1) apa yang akan dilaksanakan untuk mempertunjukkan penyelesaian? 2) (diharapkan) dipertunjukkan oleh siapa? (3) dengan syarat apakah dipertunjukkan? dan (4) ukuran-ukuran apa akan digunakan untuk menentukan jika telah dilaksanakan? Statemen "ke mana kita pergi?" dan "Bagaimana kita mengetahui ketika kita sudah tiba?" membentuk sasaran misi dan kebutuhan capaian.
3. Verifikasi sasaran misi dan kebutuhan capaian dengan teliti menghadirkan masalah yang terpilih berdasar pada kebutuhan yang didokumentasikan. Jika bukan, mendamaikan pertentangan berdasar pada data kebutuhan.
4. Siapkan profil misi, yang menunjukkan fungsi utama yang diperlukan.
5. Mendapatkan "dari apa?" dan "Untuk apa yang sebaiknya?" dinyatakan analisis pertentangan (penilaian kebutuhan). Ingat bahwa profil misi adalah suatu rencana manajemen menentukan fungsi yang

diperlukan untuk menghapuskan pertentangan yang mendasari masalah. Masing-masing fungsi yang hendak dikenali adalah sebagai berikut ini.

- a. Dinyatakan dalam perang terminologi dan mengidentifikasi suatu hasil (atau sub-produk) yang akan terpenuhi.
- b. Dengan nyata diposisikan untuk menunjukkan kemerdekaan sanak keluarganya dari fungsi lain di dalam profil misi.
- c. Dibuat nomor urut untuk menunjukkan hubungan antara fungsi masing-masing dan semua fungsi yang lain .
- d. Dihubungkan oleh bentuk padat dengan panah untuk menandakan arus yang tepat dan hubungan antara masing-masing berfungsi dan semua fungsi lain.

III. Menentukan Tujuan

Tujuan (baku) adalah rumusan mengenai apa yang diinginkan pada kurun waktu tertentu, Sasaran/tujuan situasional adalah rumusan spesifik mengenai apa yang diinginkan pada kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan tantangan nyata yang dihadapi (sasaran merupakan jabaran tujuan).

Untuk mewujudkan tujuan, dimungkinkan melalui adanya sasaran-sasaran merupakan pernyataan yang memungkinkan dari segi pengukuran maupun segi pencapaiannya. Dengan demikian, sasaran tidak dapat diubah secara kontinu, karena jumlah stabilitas minimum sangat penting dalam perencanaan pendidikan. Oleh karena itu, mempersiapkan sejumlah sasaran merupakan langkah penting dalam proses

perencanaan pendidikan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi sasaran adalah sumber daya pendidikan yang tersedia, komitmen yang ada, kebutuhan operas internal, trend dan kejadian eksternal, berbagai kebutuhan, dan antarmubungan semua faktor tersebut.

Tujuan (goal) adalah tujuan atau hasil ayng ingin dicapai dari pembuatan desain. Dengan demikian, desain ini harus memberikan arahan kepada partisipan dalam suatu perencanaan dalam artian tujuan tersebut memang ideal.

Tujuan mendorong tindakan yang menentukan seluruh pelaksanaan dalam perencanaan. Namun, tindakan ini tentu saja tidak terlepas dari berbagai kesulitan karena tidak ada tujuan yang tidak pernah dicapai secara sempurna dan tidak ada tujuan uang dapat dirumuskan secara sempurna. Selain itu, tujuan itu berkaitan dengan perubahan nilai budaya, terhadap perubahan teknologi terbaru dan terhadap perubahan tingkah laku orang yang terlibat di dalamnya. Dalam hal ini, nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai cara untuk menentukan tujuan.

Tujuan merupakan sejumlah pilihan di antara berbagai kemungkinan. Beberapa tipikal tujuan adalah sebagai berikut:

- a. tujuan itu merupakan optimalisasi dalam bentuk, misalnya: biaya yang paling rendah untuk keunggulan pendidikan;
 - b. tujuan itu memuaskan, misalnya: pemerataan pendidikan;
 - c. tujuan itu bentuknya incremental (semakin naik), misalnya: tambahan pasokan kelas;
 - d. tujuan itu bentuknya bisa positif atau negatif, misalnya memberikan ruang lebih untuk belajar.
- Suatu tujuan dalam pendidikan harus relevan, harus

dapat diwujudkan, memiliki kejelasan maksud, dan harus bersifat operasional. Walaupun begitu, tujuan juga harus bersifat umum, berorientasi pada masyarakat dan memiliki jangka panjang. Tujuan dalam perencanaan pendidikan hendaknya menjawab pertanyaan berikut:

- a. Masalahnya apa?
- b. Sasarannya siapa?
- c. Pada Level mana?
- d. Kondisi awal bagaimana?
- e. Dengan apa diukur?
- f. Tingkat prioritas dimana?
- g. Bagaimana mengetahui tingkat pencapaian?

Terdapat lima tahap dalam proses penentuan tujuan, berikut ini.

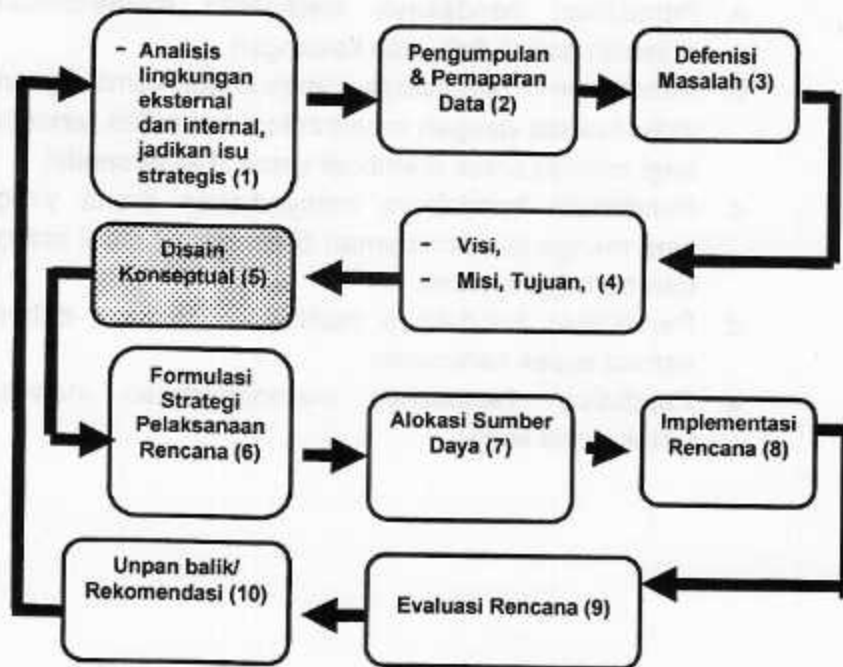
- a. Mendefinisikan batasan kemungkinan (contingency) yang membentuk batas-batas perencanaan dan porsi keputusan yang dipengaruhi oleh putusan perencana.
- b. Dari batasan tersebut, perencana lalu mengurangi berbagai alternatif dengan menghilangkan yang tidak bermanfaat dan tidak menguntungkan.
- c. Dengan membandingkan segi manfaat (merit) dari alternatif tersebut, perencana dapat menentukan dampak positif dan negatif dari berbagai kombinasi tujuan dan kemudian memilih alternatif terbaik.
- d. Perencana kemudian mengevaluasi manfaat tujuan itu dengan membandingkan faktor-faktor lingkungan dengan tujuan dan sasarannya. Tujuan hendaknya berkaitan dengan kondisi yang muncul.
- e. Bila putusan akhir telah dibuat dan tujuan serta sasaran telah ditetapkan, maka dibuatlah pernyataan

kebijakan (*statement of policy*) yang berfungsi sebagai pedoman.

Berikut ini merupakan beberapa saran tujuan umum dalam perencanaan pendidikan.

- a. Pendidikan hendaknya membantu memecahkan masalah sosial, fisik, dan keuangan.
- b. Pendidikan hendaknya menumbuh-kembangkan individualitas dengan memberikan kapasitas tertentu bagi individu untuk membuat keputusan tersendiri.
- c. Pendidikan hendaknya menyediakan arena yang luas mengenai pemahaman dan menghargai orang dari berbagai lapisan.
- d. Pendidikan hendaknya melibatkan individu dalam semua aspek kehidupan.
- e. Pendidikan hendaknya mempersiapkan individu untuk dunia kerja.

E. Disain Konseptual



Pekerjaan perencanaan pendidikan memerlukan interpretasi dan reduksi ringkas mengenai kebutuhan masyarakat akan pendidikan serta cara memenuhinya. Perencanaan haruslah bersifat komprehensif dan seorang perencana harus menyeimbangkan sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang memungkinkan terjadi.

Interprestasi ini yang disebut disain konseptual yang

dibuat berdasarkan pada visi, misi, dan tujuan perencanaan. Pertimbangan yang dibutuhkan tentang desain apa yang akan dirancang atau bagaimana konsepnya, ini diharapkan telah muncul ketika visi, misi dan tujuan telah terdefinisi secara jelas, dengan demikian telah mengarah pada suatu kecenderungan yang paling tepat dilaksanakan. Konsep disain perencanaan seharusnya dipilih dan dielaborasi secara rasional sehingga memberikan tentang gambaran kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai implementasi yang berhasil.

Disamping visi, misi konsep desain perencanaan hendaknya dikaitkan dengan "*What, Why, dan How*" dan filosofi, tujuan serta proses yang ada dalam skema pendidikan. Subyek-subyek ini tidak dapat didekati secara efektif, tapi suatu pemahaman mengenai hakikat desain itu sendiri. Definisi yang lengkap mengenai desain akan sangat berguna. Namun yang jelas desain itu luas dan sangat subyektif.

Di sini desain didefinisikan sebagai salah satu aspek dari proses pengembangan yang terdiri dari 6 (enam) fase untuk mengembangkan berbagai bentuk atau pola aktivitas baru yang dianalisis sebagai proses yang terdiri dari enam karakteristik yang saling berhubungan.

1. Riset yang sebagai analisis pada persoalan yang terjadi.
2. Desain sebagai sintesis terhadap apa yang ada.
3. Produksi sebagai formasi atau bentuk yang diharapkan.
4. Distribusi atau penyebaran akan bentuk atau informasi yang dihasilkan.
5. Utilisasi atau nilai guna sebagai bentuk kinerja.
6. Eliminasi atau pengurangan hal yang tidak dibutuhkan (penghentian).

Untuk mempermudah konsep desain perlu dipahami beberapa hal berikut ini.

1. Konsep Desain Perencanaan

Desain melibatkan tiga unsur penting yaitu bahan, bentuk, dan antarmubungan yang dinamis secara keseluruhan. Bahan adalah material yang didapatkan dari lingkungan fisik. Bentuk menunjukkan susunan bahan. Aspek terakhir adalah dinamika berbagai gerakan kedalam satu kesatuan.

2. Pengaruh-pengaruh Terhadap Perancangan Rencanarencana

Masalah desain merupakan masalah yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengaruh budaya dan politik serta lingkungan alami dan lingkungan buatan. faktor lain yang mempengaruhi perencanaan adalah iklim, faktor psikologi, teknologi dan pertukaran sosial dan pertukaran budaya. Pertukaran budaya ini sangat penting karena mempengaruhi kita dalam membuat struktur lingkungan.

Pertimbangan lain dalam desain perencanaan adalah penggunaan waktu, perencanaan dan pengembangan komprehensif wilayah kota, interaksi sosial, pertumbuhan ekonomi, dan cara-cara perencanaan pendidikan mempengaruhinya. Pendekatan seperti itu menentukan penggunaan teknologi, mutakhir untuk analisis dan perencanaan.

3. Proses Desain

Sebagai proses yang sifatnya pragmatis, aktivitas desain dimulai dengan pengenalan lingkungan desain dan penelitian pendahuluan selama mendapatkan data yang tepat mengenai

solusi dan susunan dokumentasi grafik. Proses desain perencanaan dilakukan melalui definisi awal, pengumpulan data, uji coba awal, modifikasi solusi tentatif, dan perencanaan akhir. Dalam seluruh periode tersebut, perencana mencoba menafsirkan kebutuhan sosial dan memenuhinya dengan bentuk fisik.

Dengan demikian perencana perlu mengembangkan jenis metodologi yang akan menunjukkan kemauan kliennya, yang dilakukan melalui beberapa jenis prosedur analitis dan menerjemahkan keinginan klien ke dalam bentuk desain. Dalam hal ini, perencana harus menyadari sifat perubahan dari bentuk fisik itu dan hubungannya dengan upaya manusia. Dengan demikian, perencana harus mendesain dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi, saat menginterpretasikan kebutuhan kliennya saat ini, perencanaan itu hendaknya memasukkan faktor kotingensi yang memungkinkan perencanaan mengatasi perubahan di masa depan.

Akhirnya, dari disain konseptual itu diharapkan telah ada suatu komitmen untuk menggunakan sebuah strategi yang diilhami visi, misi dan kebutuhan. Proses desain konseptual ini dilakukan melalui empat aktivitas penting, yaitu: 1) definisi, 2) analisis, 3) sintesis, 4) modifikasi. Aktivitas ini muncul secara berurutan, berikut ini.

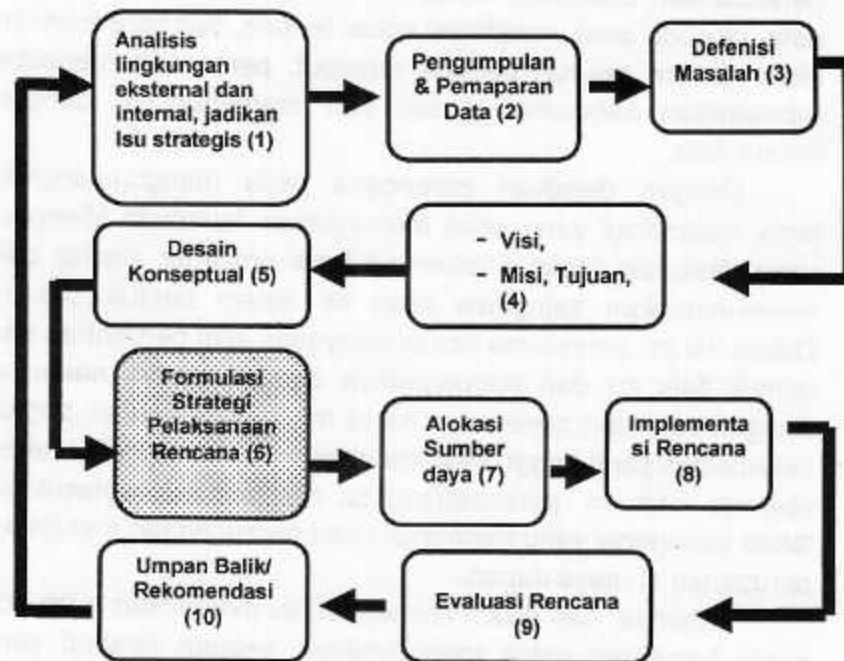
Pertama, definisi masalah telah dibentuk berdasarkan fenomena yang terjadi serta mengacu pada tujuan yang diharapkan.

Kedua, analisis variabel yang relevan dengan masalah atau substansi kajian.

Ketiga, sintesis variabel yang relevan tersebut ke dalam desain tentatif (sementara).

Keempat, modifikasi disain konsep sampai terbentuk sebuah konsep final sehingga layak untuk dijalankan.

F. Formulasi Strategi Pelaksanaan

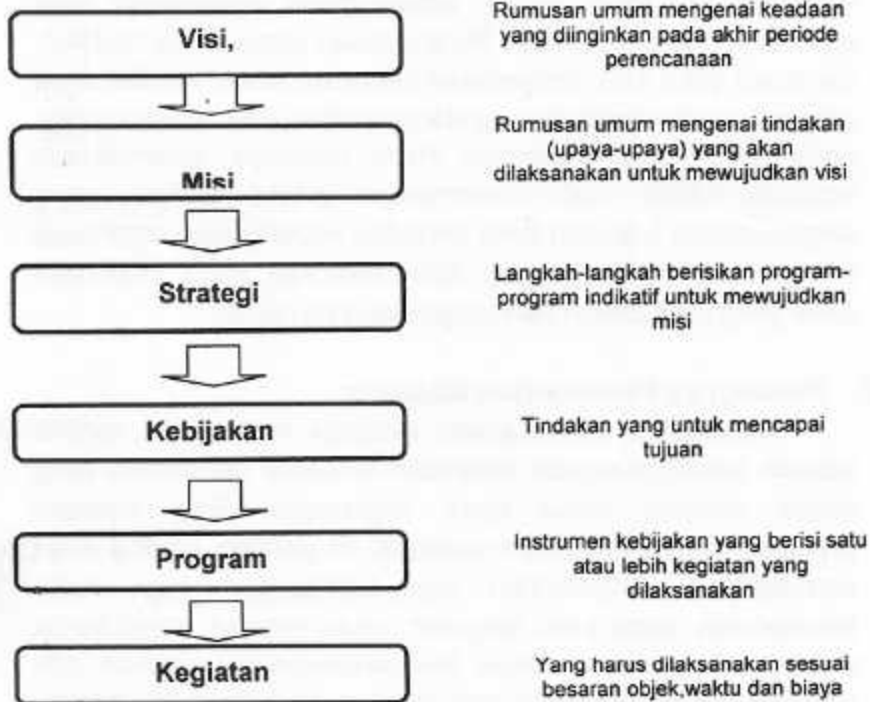


- a. Apa program yang paling tepat, jika dilakukan akan menyentuh berbagai elemen.
- b. Elaborasi menjadi beberapa kegiatan dengan segala perlengkapannya.

Formulasi strategi pelaksanaan perencanaan sangat dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pendidikan. Formulasi ini yang sangat dibutuhkan sebagai suatu formula yang memuat cara-cara mencapai tujuan serta kerjasama dan kesamaan pikiran sebelum suatu program dimulai. Sebagaimana dijelaskan bahwa strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan sebagai langkah mencapai misi atau tujuan harus didefensiskan secara jelas dan teryakini. Artinya, apabila kebijakan tersebut dilaksanakan maka maksud yang tersirat dalam misi akan terjawab dengan baik. Oleh sebab itu, proses elaborasi dari visi ke misi, dari misi menjadi strategi diharapkan memiliki benang merah yang jelas dan tegas, saling bertaut. Dari strategi, akan dibuat kebijakan sebagai arah tindakan yang diambil oleh pengambil kebijakan, kemudian dijadikan program sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Berikut ini adalah bagan formulasi turunan visi, misi, kebijakan, dan program.

Proses Elaborasi Visi Sampai pada Kegiatan



Untuk memahami lebih lanjut tentang formulasi strategis berikut ini akan dijelaskan pengertian perencanaan strategis dan pentingnya perencanaan strategis dan pertimbangan formulasi.

I. Pengertian Perencanaan Strategis

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa: perencanaan telah didefinisikan sebagai proses penentuan dalam waktu yang akan datang, hal apa yang harus diselesaikan dan bagaimana hal itu harus diwujudkan. Suatu perencanaan itu mencakup penyeleksian tujuan-tujuan dan menetapkan bagaimana mencapai tujuan-tujuan itu. Perencanaan strategis adalah sebuah rencana, tetapi tidak seperti *tactical planning* (perencanaan yang taktis), perencanaan operasional atau perencanaan jangka pendek. Perencanaan strategis itu meliputi: kerangka yang luas, penyebaran sebagian besar sumber daya organisasi, memperluas kegiatan-kegiatan dan adanya suatu dampak terhadap organisasi. Pada dasarnya, perencanaan strategis adalah suatu perencanaan jangka panjang, yang jangkauannya luas dan kritis terhadap keberhasilan organisasi seperti sumber dana yang diakibatkannya serta hasil-hasil akhir yang merupakan pandangan jauh ke depan.

II. Pentingnya Perencanaan Strategis

Keuntungan perencanaan strategis makin jelas apabila sebuah lembaga segera merespon terhadap perubahan yang terjadi dengan cepat pada lingkungan. Bagi manajer profesional, perencanaan strategis ini penting karena akan memberikan pertumbuhan dan keuntungan bagi suatu perusahaan. Juga para karyawan akan merasa tinggi harga diri mereka, jaminan kerja, kesejahteraan masyarakat dan keselamatan kerja karena adanya dana para penanam modal.

Perencanaan strategis ini mempunyai bahaya juga apabila para perencana secara tidak sadar menciptakan birokrasi yang hilang sentuhannya dengan berbagai pasar yang harus dilayani. Oleh sebab itu jangan terlalu banyak formalitas sehingga dapat melambatkan proses formulasi. Para manajer dapat berlaku rasional, mengambil keputusan dengan resiko yang minimum, walaupun usaha-usaha mereka agak terbatas inovasinya dalam rangka mencapai pasar, sehingga akan dapat keuntungan yang lumayan.

III. Pertimbangan Formulasi

Setiap perencanaan hendaknya mencapai tujuannya dengan memadukan semua unsur, sehingga tujuan itu tercapai secara wajar tanpa dipaksakan. Hasilnya harus menunjukkan imbalan yang berkaitan dengan harapan yang ditompangkan. Oleh sebab itu, beberapa aspek harus dipertimbangkan untuk membuat suatu formulasi strategi, diantaranya fisik wilayah, sosial ekonomi atau perpaduan keduanya secara komprehensif.

1) Pertimbangan Fisik

Pertimbangan fisik berkaitan dengan unsur-unsur tiga dimensi (3D). Namun, perencanaan fisik itu tidak berarti sekedar mendirikan bangunan saja. Pada dasarnya, perencanaan fisik adalah seni membentuk dan mengendalikan susunan dan struktur fisik wilayah agar selaras dengan kebutuhan sosial dan ekonomi yang sejalan dengan pencapaian pendidikan masyarakatnya. Sebenarnya, perencanaan fisik ini merupakan ekspresi fisik perancang atau perencanaan pendidikan di perkotaan.

Dengan prinsip-prinsip umum ini, sebagai pedoman, prosedur untuk memetakan serangkaian perencanaan fisik dapat dikelompokkan ke dalam tiga fase, berikut ini.

Fase *pertama* dari perencanaan fisik adalah persiapan-persiapan awal (*initial spadework*) yang melibatkan gambaran bidang kajian dan pengumpulan berbagai data yang diperlukan dalam menganalisis perencanaan fisik dari suatu sistem persekolahan. Selain itu, pertimbangan fisik lebih sesuai untuk menangani lingkungan sekitarnya. Terlepas dari kondisi sekarang atau masa depan, kajian bidang subperencanaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi bidang layanan suatu sekolah dasar, tetapi seringkali dimodifikasi sesuai dengan jumlah orang atau keluarga yang ada dan kepadatan penduduk dalam hubungannya dengan gedung sekolah yang ada dan kendala fisik yang ada di rel kereta api, jalan (tol,raya,alternatif, dan gang), aliran air (sungai, selokan, dan gorong-gorong) dan daerah-daerah nonperumahan (komersial dan industri). Dalam subarea yang pemetaannya tidak dibuat, sistem yang arbitrer bisa didasarkan pada batas-batas sistem sensus atau bidang terbatas lainnya, seperti zona lalu lintas.

Saat suatu sistem subarea telah didefinisikan, penyesuaian kajian yang dimulai sebelumnya harus sudah selesai atau lengkap. Berdasarkan pada informasi minimum, yang dibutuhkan sebagai berikut ini.

- a. Populasi "wilayah perencanaan" yang sekarang dan yang akan datang (ramalan).
- b. Kebutuhan manufaktur, usaha grosir, dan sumber daya manusia yang berkaitan dengan kantor, dan tuntutan sosial pada masa sekarang dan masa mendatang.
- c. Sebuah peta dan daftar ringkasan penggunaan tanah yang ada, yang mempengaruhi penggunaan tanah untuk hal yang berkaitan dengan pendidikan.
- d. Data tentang hubungan biaya pendapatan untuk pengembangan fisik pendidikan di berbagai lokasi,

diberbagai kepadatan dan intensitas penggunaan dan tentang pola umum nilai harga tanah.

Fase *kedua* dari perencanaan fisik adalah keperluan penggunaan tanah yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Aspek kualitas menunjukkan prinsip dan standar yang mengatur lokasi masyarakat dan hubungannya dengan masyarakat lain. Hal ini menunjukkan pola interaksi yang berlaku antara aktivitas sekolah dan aktivitas masyarakat, kecenderungan (*trend*) dalam aktivitas, misalnya dari kerja lalu bersantai, dan pengaruh teknologi terhadap interaksi tersebut.

Aspek kualitatif melibatkan estimasi kebutuhan ruang. Estimasi kebutuhan luas tanah, tuntutan padamas depan, dan penggantian penggunaan yang ada itu dimasukkan dan diungkapkan tidak saja dalam dimensi ruang, tetapi juga dalam jumlah orang yang terlibat, nilai dolar, unit struktur, dan sebagainya. Dengan tidak menghiraukan unit dimensi yang dipilih dan digunakan, area subperencanaan adalah skala yang paling sesuai untuk pemetaan dan perhitungan data.

Fase *ketiga* dari perencanaan fisik adalah fase desain fisik. Suatu perencanaan bagan dibuat sehingga sesuai dengan pola aktivitas, konsep kenyamanan dan pertimbangan biaya. Perencanaan bagan juga menggabungkan data yang dikumpulkan sebelumnya ke dalam lokasi yang ditetapkan dan pola distribusi normal. Disini mulai muncul konflik keterkiraan (*feasibility*) ekonomi, penentuan standar hukum dan penciptaan dan desain berbagai alternatif. Di luar semua itu, satu perencanaan fisik desain yang paling ekonomis dan yang paling menarik untuk semua penggunaan pendidikan, pola penggunaan tanah topografinya sesuai dan optimal, diiringi dengan jalannya sistem pergerakan dapat dipilih sebagai solusi yang paling baik.

2) Pertimbangan Sosial

Karena perencanaan pendidikan mengandung arti untuk memenuhi kebutuhan manusia, bentuk apa pun yang diambil perencanaan itu akan mempengaruhi aspek sosial dari situasi tersebut. Dengan demikian, walaupun perencanaan itu hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi memiliki implikasi sosial. Pertimbangan sosial kurang memiliki batasan yang jelas sehingga menimbulkan berbagai konotasi, jadi dapat dikatakan bahwa perencanaan pendidikan itu tidak akan lengkap jika tidak mempertimbangan masalah sosial.

Pertimbangan sosial berkaitan dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik dimana sistem pendidikan itu berjalan. Seperti perencana lainnya pendekatan sosial harus mempertimbangkan misi berdasarkan fakta, tidak hanya berorientasi pada ekonomi atau perilaku saja, putusan utama pada dasarnya adalah putusan politik yang berdasarkan pada nilai-nilai sosial dan memiliki pengaruh politis yang panjang.

Perencanaan bisa dikaji dengan pengamatan dari berbagai komponennya yang berbeda. Sebagai contoh, perencanaan fungsional memfokuskan pada aspek tertentu dari permasalahan total. Hal ini biasanya terpisah, tetapi dapat efektif bila dikoordinasikan dengan upaya dan bentuk perencanaan lain dalam kerangka perencanaan jangka panjang keseluruhan.

Model ini menekankan tentang fase perencanaan, berikut ini.

- a. Perumusan sasaran (*goal formulation*).
- b. Pengumpulan data (*data collection*).
- c. Sintesis (*syntesis*).
- d. Fase kreatif (*creative phase*).
- e. Persuasi (*persuasive*).
- f. Pencapaian pelaksanaan (*effectuation*).
- g. Umpan balik dan kaji ulang (*feed back and review*).

Terdapat berbagai variasi alternatif dalam sistem perencanaan pendidikan. Strategi perencanaan itu sendiri bisa diubah-ubah dari satu proyek ke proyek lain. Metode yang digunakan pada situasi tertentu mungkin tidak sesuai untuk situasi lainnya, dalam analisis sistem itu sendiri, administrator harus memilih, misalnya antara pendekatan *cost/benefit* atau *cost/effectiveness*. Ada beberapa alternatifnya yang termasuk dalam cakupan perencanaan. Salah satu dari empat komponen dasar perencanaan, yaitu: strategi, metode, teknik, dan cakupan isi, bisa menyempurnakan fleksibilitas dari proses perencanaan total.

3) Pertimbangan Ekonomi

Pertimbangan ekonomi dikaitkan dengan biaya (*cost*) yang akan dikeluarkan oleh seluruh *stake holder* yang terlibat dalam pendidikan, baik murid, guru, staf maupun masyarakat dari sebuah perencanaan. Misalnya jarak tempuh ke sekolah yang harus dilalui murid, guru dan staf lainnya yang harus memakan biaya besar dalam perjalanan sehingga menimbulkan keengganan atau memutuskan tidak pergi ke sekolah.

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (*instrumen input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peran biaya, sehingga dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan (di sekolah) tidak akan berjalan. Biaya pendidikan dalam hal ini memiliki cakupan yang sangat luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang, barang maupun tenaga (yang dapat dihargakan dengan uang). Kenyataannya di Indonesia banyak hal tentang pembiayaan pendidikan belum diketahui, dan kajian tentang hal ini belum banyak dilakukan. Sehingga pola

atau formula pembiayaan pendidikan yang diakui semua pihak masih belum ada, dapat dikatakan bahwa sistem pembiayaan pendidikan Indonesia masih kacau. Antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda-beda. Akibatnya, seringkali pengambilan keputusan mengalami kesulitan untuk mengambil kebijakan yang berbasis hasil studi. Kondisi ini semakin kompleks karena sistem anggaran di Indonesia masih terlalu rumit, birokratis, kaku dan fragmentaris yakni melibatkan banyak instansi, dengan menyertakan egoismenya masing-masing.

Pada tahun 1960 Theodore W. Schultz berpidato tentang *Investment in Human Capital* yang intinya bahwa apa yang dilakukan dalam proses pendidikan bukanlah bersifat konsumtif (terbuang percuma) tetapi suatu investasi yang memiliki nilai balik (*rate of return*) yang membutuhkan pemikiran dan perhitungan cermat. Lebih jauh Schultz menyebutkan bahwa "peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin tidak tergantung pada ketersediaan tanah, energi, dan fasilitas tetapi sangat tergantung kepada ilmu pengetahuan". Untuk gagasan tersebut Schultz meraih Nobel pada tahun 1979.

Melalui keterampilan, usaha, dan motivasi serta kemampuan memanipulasi peralatan, sesungguhnya *human capital* dapat merubah segala situasi secara berarti. Manusia dan informasi mempunyai hubungan yang sangat erat. Informasi, keterampilan dan inteligensi merupakan faktor yang membentuk potensi manusia melalui pendidikan. Sumber daya manusia sesungguhnya terdiri atas dimensi kuantitatif dan kualitatif. Jika pengeluaran untuk meningkatkan kapasitas tersebut ditingkatkan, nilai produktif dari SDM akan menghasilkan nilai balik (*rate of return*) yang semakin baik.

Seberapa besar manfaat balikan yang ingin dicapai

melalui investasi SDM, adalah penting perencanaan secara matang dan cermat. Artinya, bahwa diperlukan analisis dan kajian yang mendalam dalam perencanaan pendidikan, mulai dari level kebijakan tertinggi (perencanaan strategis) hingga unit-unit penyelenggara pendidikan (perencanaan operasional) itu sendiri. Investasi pendidikan itu sendiri benar-benar melalui kajian analisis *cost* dan *benefit* yang rasional.

4) Pertimbangan Komprehensif

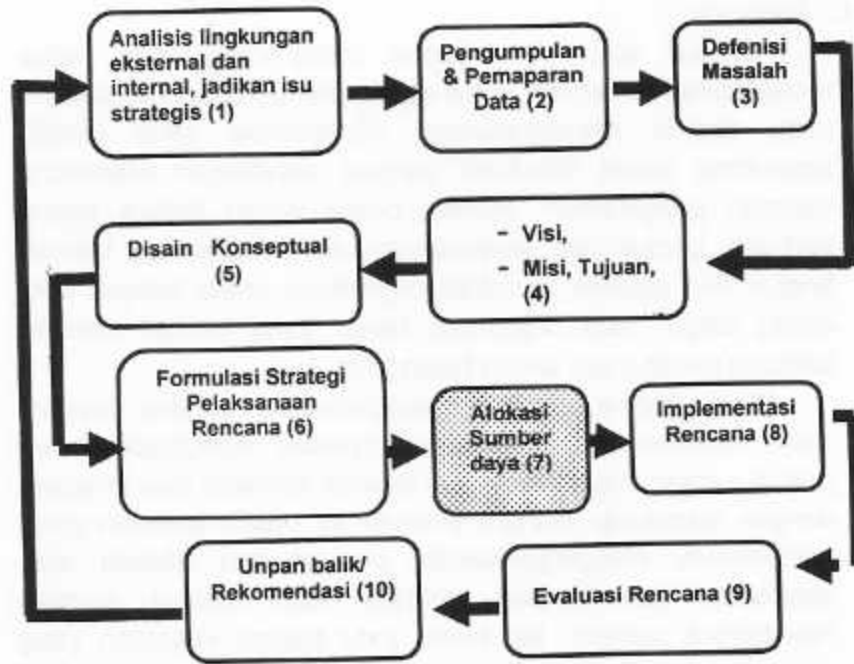
Pertimbangan komprehensif merupakan suatu variasi dalam pendekatan sistem pada perencanaan pendidikan, sebab akan melibatkan seluruh aspek yang terkait dengan sistem pendidikan, baik fisik, ekonomi dan sosial. Penekanan terletak pada totalitas dibandingkan dengan bagian per komponen.

Perencanaan memerlukan orientasi yang jelas, dan akibatnya akan berkembang dan meluas ke suatu sistem atau wilayah yang baru. Karakteristik dari pertimbangan komprehensif, adalah kajiannya proyektif, fleksibilitas, komitmen waktu. Perencanaan komprehensif memproyeksikan pendekatan suatu sistem ke masa depan yang mengaitkan berbagai unsur dengan suatu desain dan menerjemahkan ke dalam dimensi yang bermanfaat. Dengan monitoring yang terus menerus, perencanaan komprehensif memungkinkan dilaksanakannya urusan-urusan institusi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Produktivitas secara kontinu dapat dioptimalkan dalam hal ini.

Perencanaan komprehensif memungkinkan perencana pendidikan untuk melibatkan semua segmen dari sumber daya fisik masyarakat dan sumber daya manusia yang dialokasikan pada waktu dan ruang tertentu, dan melaksanakan pengalokasian tersebut dengan cara yang paling bermanfaat.

Perencana pendidikan komprehensif menunjukkan komponen-komponen yang bekerja dalam suatu sistem persekolahan secara menyeluruh. Setiap subperencanaan dalam sistem itu memuat beberapa fenomena umum. Saat sistem itu tumbuh, sub perencanaan yang baru akan ditambahkan karena tidak ada batasan yang kaku dalam sistem pendidikan. Pendidikan itu jelas merupakan suatu sistem terbuka.

G. Alokasi Sumber Daya



- a. Rencanakan apa sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan.
- b. Rencanakan biaya (jumlah, alokasi, dan sumber dana).

Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan yang telah ditentukan perlu mengalokasikan sumber daya secara benar, baik sumber daya manusia, peralatan maupun sumber daya keuangan. Ketiga aspek utama ini harus dipertimbangkan secara kolektif dan komprehensif, tidak parsial sebab ketiga aspek ini merupakan suatu kesatuan yang menjadi kekuatan

pelaksanaan program maupun kegiatan dalam mencapai tujuan.

I. Manusia

Alokasi atau penempatan orang-orang yang harus mengerjakan pekerjaan harus mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki masing-masing. Kompetensi yang dimiliki seseorang dapat dikaitkan dengan pendidikan seseorang maupun pengalaman. Semua orang setuju bahwa dalam berbagai bentuk dan perencanaan akan melibatkan banyak tingkat dan jabatan di dalam organisasi, maka banyak pula orang dalam satu organisasi harus yang terlibat memiliki tanggung jawab pada setiap bidangnya.

Pada tingkat lembaga, pengalokasian sumber daya ini salah satunya adalah pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses manajerial yang dibawa bersama dan tersusun dengan sistematis subunit individu ke dalam perintah yang menyeluruh. Pengorganisasian dimulai dari kreasi atau eksistensi dari bagian individu dan diakhiri dengan membentuk individu ke dalam satu bagian kesatuan yang utuh. Pengorganisasian bagaimanapun biasanya melibatkan kenyataan susunan dari subunit bagian yang ada. Yang paling penting adalah kreasi rohaniah dari komponen jaringan suatu pengorganisasian akan diawali dengan suatu rohaniah yang tersusun sebelum diterima pada subunit bagian manajerial; jabatan, posisi, departemen, dan pengurus tidak dapat diintegrasikan tanpa suatu pola mental atau menggunakan konsep mental, seperti; wibawa, kekuasaan, tanggapan, perhitungan dan sebagainya.

Penempatan anggota melibatkan penyesuaian pada sebuah karakteristik tertentu sesuai dengan persyaratan tertentu dan permintaan dari posisi yang ditawarkan dalam

sebuah organisasi. Situasi kerja yang mengharuskan berbagai tingkatan kemampuan intelektual, kemampuan secara fisik, kemampuan bekerja sama, kemampuan secara teknikal dan kemampuan secara teoristik.

Dalam penempatan kepegawaian, terkadang muncul anggapan "apa" untuk "apa" atau "siapa" untuk "siapa". Apakah karyawan yang mencocokkan diri dengan pekerjaan (posisi) atau apakah pekerjaan yang mencocokkan diri dengan si karyawan. Harusnya antara si karyawan dan pekerjaannya haruslah saling mencocokkan diri.

Sayangnya, kepentingan dari penempatan karyawan terkadang sering diabaikan. Banyak organisasi yang membuat proses penempatan karyawan sebagai sebuah pemilihan fungsi. Terkadang banyak perusahaan menghabiskan banyak waktu dan uang dalam pengkrekrutan dan pemilihan calon karyawan. Setelah memilih si calon karyawan, mereka hanya menghabiskan sedikit waktu untuk melatih si karyawan tersebut untuk ditempatkan pada tempat yang tepat atau melatih masuk dalam situasi kerja yang tepat.

Karena seringnya mereka mengabaikan proses penempatan karyawan, banyak perusahaan yang gagal melakukan proses penempatan secara alami. Hanya karena si Akaryawan cocok ditempatkan pada suatu posisi tertentu saat itu, bukan berarti mereka akan mampu mempertahankannya kemasa yang akan datang. Kondisi yang berbeda, pekerjaan yang berbeda disebabkan kemajuan teknologi, kondisi ekonomi, waktu, tekanan politik, tekanan sosial (masyarakat) dan faktor lingkungan lainnya. Manusia terkadang suka ditempatkan disatu posisi yang dibutuhkan dan kemudian pindah keposisi berikutnya yang lebih tinggi. Pengaktualisasian diri manusia itu terkadang berubah. Sebagian besar karyawan menginginkan promosi disuatu masa

tertentu, oleh karena itu proses penempatan harus dilakukan untuk kepentingan yang berkelanjutan, yakni merupakan proses yang dinamis (berubah-ubah) bukan proses yang statis (tetap).

Berbagai teknik digunakan dalam proses penempatan karyawan. Analisa pekerjaan lebih mengacu pada berbagai pembagian, yakni pembagian pekerjaan (*job description*) dan spesifikasi pekerjaan (*job specification*). Pembagian kerja bisa berupa jenis pekerjaan, tempat, kewajiban, kondisi pekerjaan, resiko kerja dll. Perincian kerja biasa berupa pendidikan, pengalaman, kemampuan fisik, pelatihan, tanggung jawab dll.

Banyak karyawan dan organisasi tidak konsisten menggunakan pembagian kerja ini. Terkadang pembagian kerja dan spesifikasi pekerjaan diletakkan bertukar dan terkadang orang-orang tidak membedakan antara keduanya dan hanya memperluas analisa kerja.

II. Peralatan

Pengalaman dan kemampuan dalam kegiatan penyusunan rencana merupakan syarat untuk memperoleh suatu rencana yang baik. Makin cermat suatu rencana disusun akan makin baik kemungkinan kegiatan-kegiatan, waktu, peralatan, tenaga dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka mewujudkan rencana itu, baik dalam bentuk jasa maupun dalam bentuk produk yang dapat menghasilkan manfaat.

Suatu hal yang berguna dalam menyusun suatu rencana ialah adanya dua pertimbangan dasar, yaitu faktor-faktor yang dapat dilihat, dihitung dan diraba (*tangible factors*), dan faktor-faktor yang tidak dapat dilihat, dihitung dan diraba (*intangible factors*). Dalam *tangible factors* termasuk antara lain: peralatan yang terkait dengan: biaya, jumlah, bentuk,

warna dan ukuran. Faktor-faktor ini dapat memperkirakan berapa biaya satuan kerja dan berapa kemungkinan keuntungan yang dapat diperoleh. Sebaliknya, dari *intangible factors* seperti rasa simpati pelanggan, selera, kepuasan layanan, rasa kebanggaan dan harapan para petugas dan pelanggan. Semua faktor ini sangat berpengaruh terhadap rencana yang disusun. Oleh sebab itu diharapkan para perencana agar peka terhadap faktor-faktor ini dan semaksimal mungkin dimasukkan dalam rencana, terutama yang menyangkut isu-isu utama.

Para perencana dinasihatkan agar belajar pada kesalahan-kesalahan dan jangan mengulangnya lagi. Tujuan utama dari perencanaan adalah untuk menentukan kegiatan-kegiatan dengan peralatan yang dibutuhkan yang dikaitkan dengan tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan sekarang dan nanti. Untuk itu, sungguh diperlukan suatu analisa akan dijadikan tumpuan dalam menentukan peralatan yang ideal. Peralatan sangat mendukung suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, maka pemilihan peralatan secara tepat sangat dibutuhkan. Peralatan ini digunakan sesuai item-item pekerjaan pada setiap kegiatan.

III. Uang atau Biaya

Peranan uang atau biaya dalam perencanaan baik secara individu ataupun organisasi masih menjadi isu pokok. Kegiatan hampir identik dengan uang atau biaya, tidak ada uang tidak ada aktivitas. Banyak yang memperdebatkan tentang benar atau tidaknya uang bisa menjadi motivasi. Uang itu lebih dari insentif secara ekonomis, meskipun itu terkadang dikaitkan dengan kejelasan sosial dan status. Orang mengharapkan uang lebih bukan untuk memenuhi kebutuhan nilai ekonomi tetapi lebih pada pemenuhan nilai sosial. Uang

dianggap sebagai pengukur besaran sebuah kegiatan dan bahkan, kontribusi seseorang dalam nilai sosial. Banyak orang-orang yang sudah dianggap milioner tetap mencari uang karena untuk penanaman modal dimana saja ada anggapan bahwa orang yang mempunyai modal besar yang dikagumi. Orang dengan gaji tinggi selalu memiliki posisi yang tinggi.

Dalam perencanaan secara umum, baik perencanaan pendidikan biaya selalu mengikuti kegiatan sehingga pada setiap program cenderung diikuti rencana anggaran biaya (RAB). Untuk skop yang lebih luas RAB pada setiap kegiatan akan terkumpul menjadi anggaran biaya lembaga, pemerintah daerah yang dikenal dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan untuk tingkat negara atau nasional dikenal dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Kesemuanya ini menggambarkan bahwa setiap kegiatan, program dan kebijakan membutuhkan biaya.

Alokasi biaya atau anggaran menjadi penting dalam setiap kegiatan sebab biaya berkaitan dengan peralatan, fasilitas serta jasa yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, taksiran biaya pada setiap kegiatan harus dibuat sedetil mungkin sehingga tidak ada satu pun pekerjaan dalam sebuah kegiatan tidak terlaksana. Taksiran biaya ini bisa dinamis terkait dengan waktu maupun daerahnya, terutama untuk kegiatan konstruksi sehingga ada dikenal Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) sebagai suatu pengali terhadap objek yang dibiayai.

Untuk mempermudah gambaran tentang keterkaitan biaya dengan kegiatan sebaiknya dibuat dalam tabel seperti matriks biaya di bawah ini.

Matrik biaya

Kegiatan	Biaya Setiap Bulan		
	Januari	Februari	Maret
Pelatihan Guru	Rp	Rp	Rp
Pembelian Peralatan	Rp	Rp	Rp
Biaya Fasilitas	RP	RP	RP
Dan seterusnya	Rp	Rp	Rp

Matrik merupakan kombinasi dalam satu pengukuran bahwa tidak mungkin perencanaan pendidikan meletakkan ini semua di dalam susunan order yang memiliki tingkatan pilihan. Mengkombinasikan biaya tidak sukar selama itu semua diartikan dengan uang, hubungan keuntungan umumnya diartikan menjadi unit yang berbeda. Membuat perbandingan lebih sulit. Sebagai alternatif perencanaan di dalam susunan tingkatan dari susunan tingkatan sasaran yang diperlihatkan di sini.

IV. Waktu atau Jadwal

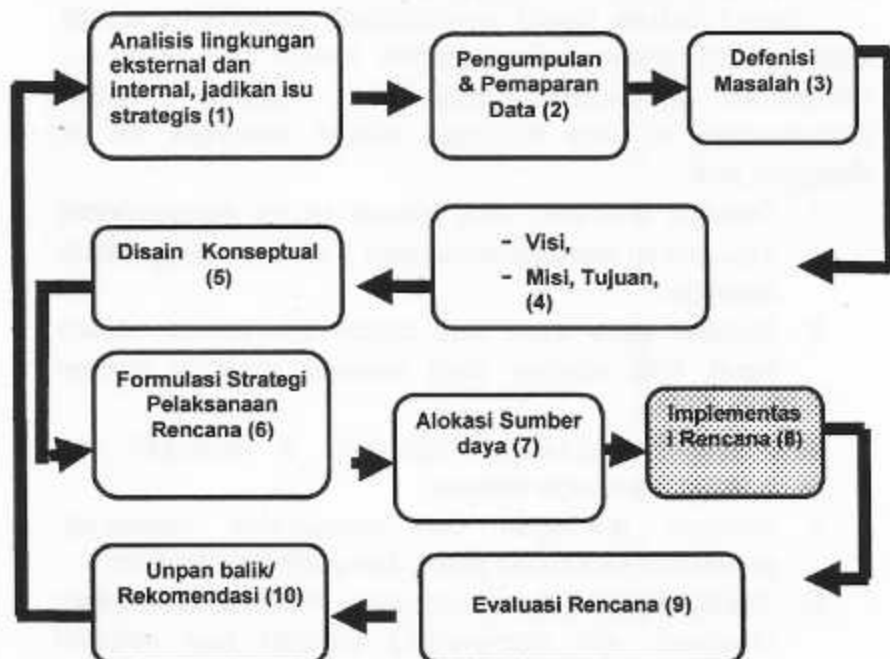
Dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan waktu dan penjadwalan menjadi variabel kritis. Dalam penentuan kebijakan pendidikan, masalah pembangunan fisik misalnya maka waktu sebagai variabel penghukum bagi elemen seperti; material atau bahan bangunan kapan harus sudah sampai dilokasi, berapa lama tukang harus bekerja. Dalam suatu kegiatan lain, misalnya elemen siswa, dan materi dijadwalkan dengan mempertimbangkan bentuk dan ukuran sekolah, tipe jadwal yang digunakan dalam komunitas, kebutuhan dan kemauan dari guru dan spesialis, kekuatan dan kelemahan guru, dan pendanaan.

Perlu dipahami bahwa rencana adalah sarana pengalokasian (waktu, ruang, staf, dan sumber daya) untuk memberikan pengajaran, jadwal melambangkan apa yang diyakini penting di sekolah oleh pendidik, menetapkan prioritas sekolah, dan merupakan mengalokasikan waktu pengajaran yang menjadi ekspresi utamanya akademik sekolah. Jadwal adalah alokasi waktu yang berkaitan dengan hasil belajar siswa dipengaruhi faktor: kecerdasan (*aptitude*) menggunakan waktu secara optimal, kemampuan (*ability*) untuk mempelajari, ketekunan (*perseverance*) untuk mencerahkan kegiatan belajar secara aktif, kesempatan (*opportunity*), dan jumlah waktu untuk belajar dituntut kemampuan kepala sekolah membuat konsep, mengatur, dan menjalankan perencanaan yang matang.

Menyusun urutan terinci dan waktu untuk rencana yang diusulkan. Selanjutnya, terjemahan dari rencana itu dan hubungannya dengan semua aktivitas yang diakibatkannya agar dapat dikerjakan. Secara rinci, perlu ditentukan yang tindakan akan dilakukan, oleh siapa, kapan waktunya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perlu juga diperhatikan hal-hal berikut : jadwal waktu, rincian instruksi tertulis, kertas format, alat serta barang yang harus tersedia. Misalnya seperti tabel berikut ini.

Kegiatan	Waktu					
	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1						
2						
3						
4						
5						

H. Mengimplementasikan Rencana



Langkah berikutnya dalam perencanaan pendidikan menyangkut implementasi rencana, ini terkait dengan pengembangan pedoman umum implementasi yang akan dilakukan oleh sekelompok orang. Implementasi perencanaan pendidikan menyangkut juga persiapan rencana-rencana yang spesifik disertai prosedur-prosedur untuk diterapkan oleh institusi atau organisasi pendidikan yang terlibat dalam pelaksanaan rencana. Semua lembaga atau unit pelaksana masih dalam kerangka sistem pendidikan yang ada. Implementasi rencana pendidikan akan mengarahkan proses

pembuatan keputusan dengan memperhatikan pengembangan program-program pendidikan serta aturan-aturan yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya.

Diakui bahwa dalam perencanaan pendidikan proses implementasi rencana adalah bagian tersulit oleh sebab itu, konsentrasi perencana harus lebih terfokus pada implementasi ini. Ada beberapa alasan mengapa hal ini dianggap sulit.

1. Defenisi masalah yang dibuat belum komprehensif atau belum merangkum segala persoalan yang ada di lapangan.
2. Sumber daya yang ada belum terdistribusi secara tepat, baik sumber daya manusia maupun sumber daya uang.
3. Adanya pertentangan kebijakan di lapangan dari berbagai lembaga relevan.
4. Kecilnya dukungan dari masyarakat akademisi, pengambil keputusan politik dan praktisi pendidikan.
5. Seringkali bersifat *esoteric* yakni hanya diketahui atau dipahami oleh orang-orang tertentu saja sebagai upaya bersama untuk program tindakan yang efektif.

Namun demikian, berikut ini akan dijelaskan empat tahapan di dalam implementasi rencana yakni merancang program, pembentukan panitia, pengesahan program, dan pelaksanaan program.

I. Rencana Program

Rencana program adalah penyusunan dokumen yang memuat sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai penuntasan program. Penyusunan kegiatan dilaksanakan

sekaligus menganalisis apakah ada hambatan-hambatan pada setiap langkah kegiatan yang akan dilalui.

Walaupun sebelumnya rencana telah dipresentasikan kepada pelaksana untuk mendapatkan pemahaman dan persetujuan, sampai terjadinya debat terus menerus tentang tujuan, namun kendala yang sering ditemui dalam dokumentasi program tetap saja berkaitan dengan ketidakmampuan atau ketidakmauan personil dalam memahami langkah yang sesungguhnya untuk memperoleh cara atau pendekatan yang berarti dalam pelaksanaan rencana yang disiapkan sebelumnya.

Ada perbedaan antara perencanaan kebijakan pendidikan dengan perencanaan program pendidikan. Perencanaan kebijakan pendidikan menyangkut pengembangan pedoman umum tindakan oleh sekelompok orang tertentu, sedangkan perencanaan program pendidikan menyangkut persiapan rencana-rencana yang khusus disertai langkah-langkah untuk dilaksanakan sebuah lembaga atau kepanitiaan pendidikan.

Recana program harus dibuat dan diyakini adalah solusi yang tepat atas masalah yang terjadi atau jabaran kebijakan yang dibuat. berikutnya dibuat dalam satu kesatuan yang utuh dengan pertimbangan hierarkikal yakni memberi urutan pekerjaan secara terstruktur supaya pekerjaan yang di awal dikerjakan lebih dahulu, lalu kegiatan lain pada tahap berikutnya.

Rencana yang dibuat juga telah melalui tahapan pertimbangan norma dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat sehingga tidak ada ruang perdebatan dalam tataran politik.

Ada delapan langkah dalam melakukan penyusunan perencanaan program, sebagai berikut ini.

1. Renungkan misi; Apa saja yang menjadi tujuan dasar yang melatarbelakangi pendirian organisasi? Misi menguraikan maksud keberadaan usaha. Demi kepentingan siapa, kehadiran organisasi di lapangan.
2. Lengkapi data *position audit*; Apa yang sudah kita lakukan di masa lalu? Berada di mana organisasi ini sekarang? Cara-cara apa saja yang digunakan untuk mencapai tujuan?
3. Lakukan *environmental scanning*; Peluang seperti apa yang ada? Ancaman seperti apa yang sedang dihadapi? Bagaimana dengan peluang dan ancaman di masa yang akan datang?
4. Lakukan *organizational diagnosis*; Apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan kita bila dibandingkan dengan negara lain? Apa saja faktor kunci keberhasilan dalam menjalankan organisasi ini? Apa yang menjadi tantangan dan hambatan yang dapat kita hadapi dalam mencapai tujuan yang kita inginkan? Apa saja ukuran kunci kinerja untuk mengukur keberhasilan kita dalam mengelola organisasi ini?
5. Renungkan visi; Kondisi apa saja yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang? Bila diukur, ukuran kinerja kunci yang sudah ditetapkan pada tahap sebelumnya menunjukkan nilai berapa saja? Secara bertahap, repelita demi repelita, tonggak-tonggak apa yang dapat mengukur kemajuan upaya organisasi mendekati ke kondisi yang diinginkan tersebut?

6. Lengkapi rencana pembangunan jangka panjang; Dalam rangka mendekatkan kondisi usaha ke arah yang telah ditetapkan sebelumnya, perubahan apa saja yang perlu diterapkan dalam repelita yang pertama? Perubahan apa yang akan diusahakan?
7. Rumuskan rencana pembangunan jangka menengah; Langkah-langkah besar apa saja yang dituntut dalam situasi yang sedang ditelaah, repelita demi repelita, program, kegiatan, organisasi, dan manusia? Teknologi apa yang akan diusahakan?
8. Rumuskan kegiatan dan program tahunan; Secara rinci, langkah-langkah apa saja yang dituntut untuk dilaksanakan dari tahun ke tahun, di program, kegiatan, organisasi, dan manusia? Khusus untuk tahun pertama, langkah tindakan apa saja yang dibutuhkan? Prioritasnya? Nilai investasinya? Keuntungan apa saja yang dapat membenarkan investasi tersebut? Kapan dapat memastikan bahwa pelaksanaannya berjalan sesuai harapan?

II. Pembentukan Panitia

Panitia pelaksana dibutuhkan sebagai ujung tombak pelaksana kegiatan untuk mencapai tujuan program pendidikan yang direncanakan. Hal ini dilakukan untuk dapat membagi habis semua kegiatan yang dibuat, serta memilih personil yang tepat guna menjalankan semua program. Pembentukan panitia pelaksana diharapkan yang telah memahami rencana-rencana yang dibuat atau telah memiliki pengalaman yang relevan sehingga tidak menemui kesulitan ketika kegiatan dijalankan.

Pemahaman teori organisasi diharapkan membantu di dalam pembentukan panitia sebab kaitannya akan menempatkan personil yang memiliki kompetensi relevan dengan bidang pekerjaan yang akan dilaksanakan. Penempatan personil yang akan duduk pada kepanitiaan diupayakan subjektif mungkin dengan pertimbangan profesionalisme personil. Misalnya, untuk panitia pembangunan sebuah sekolah baru diharapkan personil yang memiliki kemampuan teknis bidang teknologi bangunan, sementara untuk bendahara dibutuhkan yang memiliki kemampuan akuntansi.

Pembentukan panitia kadangkala tidak lepas dari unsur politik. Politik adalah merupakan alat negosiasi, debat, diskusi dengan menggunakan kekuatan dalam mempengaruhi dan memberi rasional terhadap sebuah program. Dalam konteks ini, kemampuan panitia juga diperdebatkan dalam mencapai maksud program oleh sebab itu di perlukan strategi. Strategi dilakukan untuk meminimalkan konflik pada masa yang akan datang dengan cara mempengaruhi panitia dan yang lainnya agar rencana-rencana pendidikan tidak terombang-ambing oleh kepentingan kelompok minoritas yang tendensius, tetapi kepentingan umum sesuai, kriteria dan nilai-nilai yang dirumuskan bersama.

Ada beberapa kelompok panitia yang dibutuhkan dalam implementasi rencana seperti dijelaskan berikut ini.

a. Pelaksana

Pelaksana adalah personil yang disiapkan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana. Tugas dan fungsinya menerjemahkan dan melaksanakan seluruh item pekerjaan yang tertuang dalam dokumen rencana yang dibuat secara tertulis dan sistematis. Pelaksana juga diharapkan bekerja sama dengan tim lain dalam bentuk

koordinasi, dialog untuk setiap kendala yang terjadi dan kemajuan yang dicapai.

b. **Konsultan Perencana**

Konsultan pelaksana bertugas membuat rencana program yang dielaborasi dari kebijakan atau harapan lembaga. Proses penjabaran kebijakan dibuat dalam rencana kegiatan secara bertahap, dimulai dari rencana awal, rencana konsultatif dan rencana final. Rencana awal masih bersifat labil dan memang sebagai bahan untuk didiskusikan dengan pengguna atau pemesan dalam hal ini pembuat gagasan atau kebijakan. Rencana konsultatif adalah rencana yang telah mendapat respon dari pengguna, sementara rencana final ini akan menjadi rujukan dalam setiap langkah kegiatan.

c. **Konsultan Pengawas**

Konsultan pengawas adalah personil yang bertugas mengawasi pelaksanaan setiap item kegiatan pada sebuah program. Pengawas selalu merujuk pada rencana final yang dibuat oleh konsultan perencana dalam mengawasi perjalanan setiap item pekerjaan.

III. Pengesahan Program

Suatu program yang akan diimplementasikan harus mendapat legitimasi dan pengesahan dari lembaga yang berwenang agar memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak terjebak dalam program liar. Sebuah rencana pendidikan yang baik biasanya melibatkan banyak orang oleh karena itu harus diajalkan dalam kerangka hukum. Ketidak mampuan memperoleh persetujuan hukum akan menggagalkan sebuah rencana sebaik apa pun.

Program yang dibuat terkait dengan banyak hal, di antaranya anggaran. Kegiatan yang menggunakan anggaran

baik yang kecil maupun besar menjadi dokumen publik. Untuk Indonesia, secara umum, dokumen anggaran ini menjadi sah apabila mendapat persetujuan dari pihak legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat baik daerah maupun pusat yang diatur dalam sebuah peraturan. Untuk dana yang menggunakan biaya dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pengesahannya oleh DPR RI sehingga hasilnya disebut sebagai Peraturan Pemerintah. Sementara dana yang bersumber dari APBD, disahkan oleh DPRD dan produk hukumnya disebut Peraturan Daerah (Perda).

Setelah pengkajian berbagai masalah pendidikan dari sisi perencanaan dan implikasi legalnya, prosedur persetujuan perencanaan dapat dievaluasi. Pertanyaannya menjadi "Apakah perencanaan pendidikan yang komprehensif, jika disetujui dapat mengalokasikan sumber daya komunitas untuk kebutuhan pendidikan secara rasional?" Seperti apapun penyelesaiannya, perencanaan pendidikan yang komprehensif telah meraih kemenangan pertamanya, yaitu persetujuan legislatif. Masa perencanaan pendidikan yang komprehensif dilaksanakan masih terlalu pendek untuk membuktikan dampak potensialnya. Perencanaan pendidikan yang komprehensif dilaksanakan masih terlalu pendek untuk membuktikan dampak potensialnya. Perencanaan pendidikan yang komprehensif adalah untuk memberikan pedoman kontrol terhadap program-program pendidikan.

Isi rencana pendidikan, prosedur persetujuan dan implementasi sangat berbeda antarnegara. Mengesampingkan perbedaan tersebut, beberapa pertanyaan mendasar memerlukan jawaban. Apa tujuan perencanaan pendidikan yang komprehensif?. Apakah tujuan dan sasaran jelas atau implisit? Untuk siapa perencanaan ditujukan: siswa, komunitas warga negara, guru, administrator

pendidikan, dewan sekolah? Apakah perencanaan pendidikan yang komprehensif berhubungan dengan banyak kekuasaan legal untuk kontrol pendidikan dan pedoman?

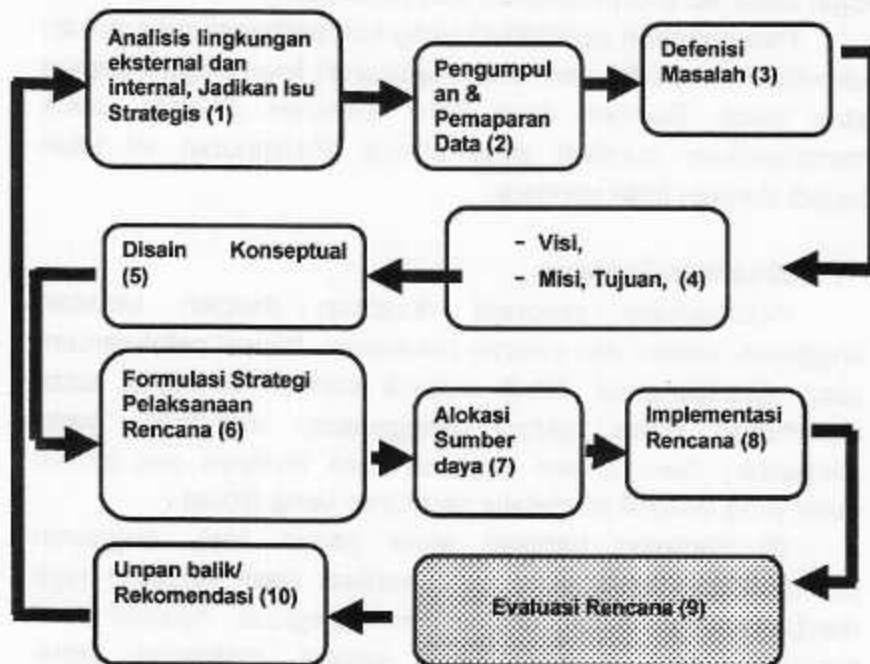
Perencanaan pendidikan yang komprehensif merupakan konstitusi yang tidak permanen, apakah di level negara bagian atau lokal. Sumber daya dan kekuatan dikelola untuk menghasilkan manfaat yang utama. Pengaturan ini tidak terjadi dengan tidak sengaja.

IV. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program dikaitkan dengan batasan anggaran, waktu, dan volume pekerjaan. Jadwal pelaksanaan yang direncanakan diikuti secara cermat sehingga tidak melampau batas akhir penggunaan anggaran yang ditetapkan. Semua item kegiatan tidak terlepas dari aturan main yang disepakati melalui peraturan yang dibuat.

Di samping batasan akhir (*dead line*), anggaran pertimbangan daya guna dan manfaat hasil kegiatan juga menjadi pertimbangan pelaksanaan program. Apakah hasil program akan termanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat pendidikan atau sekadar penyelesaian program.

I. Mengevaluasi Rencana



Sistem evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan. Evaluasi ini selalu terkait dengan pemantauan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam perencanaan dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan melalui kegiatan dan atau program pendidikan di setiap satuan, jenjang, jenis, dan jalur pendidikan secara berkala. Evaluasi dan pemantauan dilakukan dalam konteks analisis, yang ditempuh melalui proses perancangan, perencanaan, dan pelaksanaan pendidikan di berbagai kegiatan. Proses ini sekaligus sebagai

upaya pemberdayaan serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparat. Pemantauan dan evaluasi di berbagai tingkatan dilakukan secara sinergis dan berkesinambungan sehingga program pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik dalam waktu yang ditentukan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi;
- 2) pelaksanaan dilakukan secara objektif;
- 3) dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi agar hasilnya sah dan terandal;
- 4) pelaksanaan dilakukan secara terbuka (transparan), sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan hasilnya dapat dilaporkan kepada *stakeholders* melalui berbagai cara;
- 5) melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif (partisipatif);
- 6) pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal (akuntabel);
- 7) mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran pemantauan dan evaluasi (komprehensif);
- 8) pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi;
- 9) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;
- 10) berbasis indikator kinerja, yaitu kriteria/indikator yang dikembangkan berdasarkan rencana;

- 11) efektif dan efisien, artinya target pemantauan dan evaluasi dicapai dengan menggunakan sumber daya yang ketersediaannya terbatas dan sesuai dengan yang direncanakan.

I. Memonitor Perencanaan

Monitoring perencanaan yang sedang berlangsung memungkinkan suatu alat pengendalian yang baik dalam seluruh proses implementasi. Dalam kasus pertama, outputnya hanya merupakan apa yang diprediksi oleh perencanaan, outputnya secara signifikan tentu saja berasal dari apa yang telah dimaksudkan. Dalam kasus kedua, perencana pendidikan memiliki dua pilihan, yaitu pilihan pertama adalah menggunakan semua upaya di bawah komandonya untuk menunjukkan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk meletakkan sistem tersebut kembali ke jalurnya, dan pilihan kedua adalah mempertimbangkan perlunya mempertahankan jalur yang menyimpang dan memikirkan dari awal lagi mengenai tujuan utama dari perencanaan pendidikan komprehensif dalam kaitannya dengan pengembangan yang belum tampak.

Penjadwalan proyek idealnya sesuai dengan dua pilihan tersebut. Penjadwalan dapat digunakan untuk mengidentifikasi setiap aktivitas yang dilaksanakan dan pendekatan komprehensif. Penjadwalan mengidentifikasi berbagai tahap yang diperlukan untuk menjadwalkan aktivitas yang akan dilaksanakan oleh orang-orang pendidikan. Penjadwalan juga mengidentifikasi berbagai sumber daya yang diperlukan dalam suatu periode untuk berbagai aktivitas pendidikan. Penjadwalan juga mengidentifikasi berbagai sumber daya yang diperlukan dalam suatu periode untuk berbagai aktivitas pendidikan. Penjadwalan memberikan gambaran nyata

mengenai jumlah waktu dan uang yang diperlukan untuk setiap aktivitas dan sumber daya manusia yang tersedia. Jaringan aktivitas dan kejadian menentukan periode waktu penyelesaiannya sehingga penentuan waktu perencanaan secara keseluruhan bisa berjalan lancar

Tindakan ini memberikan suatu gambaran yang realistis tentang waktu dan uang yang dibutuhkan untuk setiap aktivitas dan banyaknya sumber daya manusia yang tersedia. Dismping itu mengidentifikasi dengan jelas urutan-urutan aktivitas, yaitu aktivitas-aktivitas yang harus diakhiri sebelum aktivitas dapat dimulai. Jaringan aktivitas-aktivitas dan kejadian-kejadian membentuk masa waktu penting untuk penyelesaiannya sehingga perhitungan waktu menjadi salah satu dari seluruh pekerjaan.

Monitoring perencanaan yang sedang berlangsung memungkinkan suatu alat pengendalian yang baik dalam seluruh proses implemntasi. Penjadwalan dapat digunakan untuk mengidentifikasi setiap aktivitas yang dilaksanakan dan pendekatan komprehensif. Teknik penjadwalan antara lain: (a) CPM (*Critical Path Method*), dan (b) PERT (*Program Evaluation Research Task*). Diagram penjadwalan yang digunakan untuk aktivitas monitoring, yaitu: (a) diagram Grantt, (b) diagram PERT, dan (c) *Precedence diagram*.

II. Hakikat dan Pengertian Evaluasi

Evaluasi pada dasarnya menegaskan begitu pentingnya perencanaan pendidikan dan hasil-hasil potensinya. Sesuai kebutuhannya, lebih jauh evaluasi sebaiknya muncul sepanjang proses perencanaan. Pada sejumlah kasus, evaluasi parsial dibuat dengan menggunakan uji-uji kuantitatif atau pembenarannya didasarkan pada pengalaman untuk

menolak, memodifikasi, mengkombinasi, atau menerima hasilnya.

Evaluasi merupakan suatu aktivitas pengendalian yang memungkinkan intervensi yang positif. Evaluasi memeriksa arah yang diambil dan mengevaluasi hasil atau penyimpangannya dari perencanaan sebelumnya. Evaluasi harus bersifat komprehensif dan terbuka terhadap berbagai kritikan. Lima faktor penting dalam setiap aktivitas pendidikan, yaitu: (a) tempat aktivitas yang dilakukan, (b) waktu aktivitas dilakukan, (c) orang yang terlibat dalam aktivitas, (d) sumber daya yang diperlukan untuk aktivitas tersebut, dan (e) proses pelaksanaan aktivitas.

Perencana pendidikan harus mengetahui nilai-nilai relatif yang dimasukkan ke dalam berbagai sasaran yang dibuat untuk perencanaan. Tidak hanya harus mengetahui nilai-nilai yang menjadi fokus perhatian tetapi juga yang ada pada latar belakangnya yang sebaiknya tidak mengganggu sementara sasaran-sasarannya tercapai. Karena itu, tehnik evaluasi tidak sederhana.

Satu faktor, yaitu bagaimana seorang perencana disiapkan untuk mengorbankan pandangannya untuk mencapai sasaran-sasaran lainnya yang lebih baik. Jenis evaluasi ini sangat susah dan banyak membuat kesulitan bagi perencana yang tidak akrab dengan manfaat teori.

Beberapa evaluasi komparatif dibuat jika sebuah perubahan muncul yang diakibatkan oleh tindakan yang direncanakan. Akibatnya, mungkin dapat diantisipasi atau tidak dapat diantisipasi, tetapi mungkin dapat dievaluasi hanya berkaitan dengan hasil-hasilnya. Ini pada akhirnya dapat diungkapkan pada banyak kesempatan sebagai keuntungan atau biaya tergantung pada model-model kepentingan

masyarakat yang terlibat. Sasaran-sasaran kepentingan masyarakat ini sebagai sebuah tujuan tunggal terakhir.

Di dalam situasi yang demokratis sebuah kepentingan umum mungkin terlihat samar-samar, untuk masyarakat yang beragam dapat diterapkan tanpa memandang kepentingan individu. Dengan demikian evaluasi dapat muncul dalam tiga cara berikut ini.

- a. Cara pandang untung rugi, kepentingan publik dapat ditentukan oleh pendapatan, dan pengeluaran bergantung pada apa yang sangat penting bagi individu yang berbeda.
- b. Cara tertuju, menganggap manfaat untuk individu relevan dengan jumlahnya, tetapi nilai terbesar diberikan kepada beberapa orang yang tertarik dari pada yang lainnya.
- c. Cara individu yang berkualitas, dalam hal lain menganggap bahwa akhir dari kepentingan publik, sebagai pertimbangan dari banyak pilihan kelas-kelas tertentu yang mempertimbangkan dengan cepat.

Mekanisme sebaiknya dipilih untuk pengevaluasian, sehingga hasilnya menjadi sangat memuaskan. Mula-mula evaluasi mengenai nilai harus dijalankan, bentuk dasar harus ditentukan dan sasaran harus dikurangi kesamarannya sehingga menjadi kongkrit. Kedua, pandangan waktu kedepan harus tepat. Dalam perencanaan jangka pendek, penggunaan nilai-nilai yang dipilih harus diterima secara apolitik, sehingga perencanaan dapat diimplementasikan. Perencanaan jangka menengah maksudnya menyeleksi nilai-nilai hasil pendidikan atau public relation yang dapat ditolak, yang tentu saja menjadi kepentingan masyarakat. Perencanaan jangka panjang harus

dievaluasi didalam bentuk baku, baru, atau program radikal dari efektivitas pendidikan sesuai keinginan masyarakat.

Beberapa metode identifikasi nilai untuk evaluais telah tersedia. Ini berisi mengenai opini masyarakat, survei antropologi dan dengar pendapat, interviu dengan pemimpin non forma, analisis yang menekankan isi, belajar ukuran dan undang-undang pembelajaran yang baru, tingkah laku administratif dan pembelajaran dan anggaran sekolah terdahulu. Karena evaluasi menggunakan keseluruhan urutan pendidikan, gagasan berkaitan dengan sasaran yang tepat sangat tergantung pada inti masalah tugas perencana pendidikan. Jadi, evaluasi terhadap sasaran ini harus diberikan pertama-tama dengan menekankan pada proses-proses perencanaan pendidikan yang komprehensif.

Banyak kerja pada bidang evaluasi diakui dan berada pada level filosofis yang tinggi. Aspek praktik dari sasaran-sasaran membawa pada definisi-definisi dan detail operasional masalah evaluasi. Metode teknis yang dibahas lebih dapat diterima dan makin sering digunakan oleh para perencana pendidikan.

III. Beberapa Teknik Evaluasi

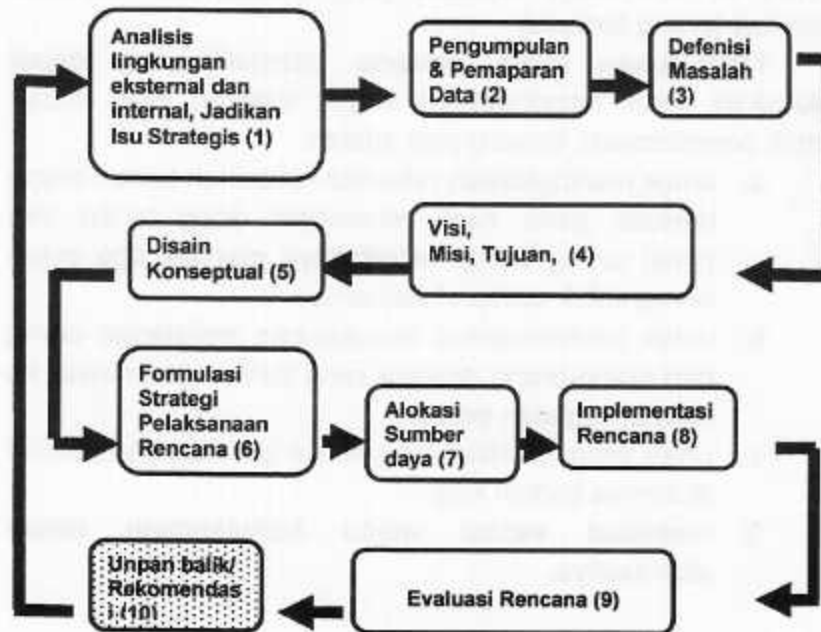
Sekumpulan teknik, seperti perbandingan biaya *cost/efectivitiess*, *cost/benefit*, *cost/efectiveness*. Pendekatan *cost/efectiveness* digunakan umumnya apa situasi dimana hasil alternatifnya didesain untuk menghasilkan tingkat efektivitas relatif yang tinggi terhadap biaya. Pendekatan *cost/benefit* berbeda dan pendekatan pertama pada praktiknya terhadap situasi dimana hasil alternatifnya ditentukan berkaitan dengan keuntungan. Penggunaan dari pendekatan *cost/utility* memerlukan formuasi numerik menggunakan angka-angka untuk menentukan aktivitas-

aktivitas juga formulasi dan penugasan dari faktor-faktor biaya yang spesifik untuk aktivitas-aktivitas yang sama. *Utility* pada kasus ini maksudnya manfaat yang penting dari aktivitas-aktivitas (orang tertentu).

Menentukan enam rencana alternatif yang dapat dilakukan untuk menghadapi empat sasaran yang dibuat untuk perencanaan. Sasarannya adalah:

- a. untuk meningkatkan rata-rata kehadiran harian orang dewasa pada suatu komunitas yang terdiri dari (lima) orang setiap aktivitasnya menjadi tiga puluh orang untuk setiap aktivitasnya;
- b. untuk meminimalkan keseluruhan perjalanan orang dari orang-orang dewasa yang terlibat dari rumah ke tempat kegiatan belajar;
- c. untuk meningkatkan banyaknya aktivitas yang dipilih di semua bagian kota;
- d. membuat variasi waktu keikutsertaan dalam aktivitasnya.

J. Umpan Balik dan Rekomendasi



Setelah evaluasi dilaksanakan baik evaluasi hasil maupun evaluasi akan diperoleh informasi apakah rencana yang telah dibuat telah mencapai sasaran atau belum. Orbex mengarahkan agar pengambil kebijakan dalam membentuk (*shape*), menyelaraskan (*align*), dan menyetel (*attune*) eksistensi organisasi mereka setelah mendapat informasi dari evaluasi. Pemaknaan yang sama atas visi, misi, nilai-nilai, strategi, gaya, infrastruktur, dan hasil menjadi pemersatu dan pemberi semangat bagi semua orang yang terlibat dalam mendapatkan informasi. Perhatian dan langkah-tindak mereka

dapat diarahkan, dipantau, dan dievaluasi secara sistematis, periodik maupun spesifik.

Evaluasi hasil menunjukkan perlunya dilakukan salah satu dari tiga jenis transformasi—*retooling*, revitalisasi atau *redirection*. *Retooling* dilakukan ketika penelaahan terhadap hasil yang dicapai organisasi menemukan bahwa infrastruktur dan gaya kepemimpinan menjadi kunci utama. Revitalisasi dilakukan apabila strategi dan tata nilai organisasi perlu untuk ditinjau ulang agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. *Redirection* hanya dilakukan apabila dianggap keberadaan organisasi perlu dikaji lebih lanjut. Ketiga tahapan ini merupakan tingkatan dalam melakukan organisasi. Dari informasi hasil evaluasi yang diperoleh, perencana dapat mengarahkan rekomendasi pada tiga aspek, yakni menyesuaikan, mengubah rencana, atau mendesain ulang rencana.

I. Menyesuaikan

Perencanaan pendidikan sebagaimana disebut sebelumnya semakin lebih banyak digunakan membentuk sejumlah aktivitas komunitas yang semakin luas. Perencana pendidikan harus juga menggabungkan gagasan yang familiar dan tradisional dengan berbagai inovasi yang berkembang. Oleh sebab itu, perencanaan tidak boleh mengkristal kedalam suatu bentuk rencana yang statis karena perencanaan pada akhirnya akan menjadi elastis dan bisa beradaptasi terhadap perubahan agar efektivitasnya semakin baik. Apabila ternyata sebuah rencana harus mengalami penyesuaian, maka dengan suatu orientasi yang terbatas (*open ended*), perencana pendidikan akan lebih mampu melaksanakan penyesuaian rencana sesuai dengan kondisi yang relevan. Dengan acuan

pada lingkungan, tujuan perencanaan akan dicapai secara lebih efektif.

Untuk mengetahui kelemahan rencana pendidikan yang telah dibuat dilakukan analisa sebagai berikut ini.

- a. Survei dan kajian yang seksama mengenai kondisi yang ada dan kemungkinan pertumbuhan pada masa depan pendidikan ditingkat , wilayah, regional, dan nasional.
- b. Peta, bagan, dan bahan deskripsi yang menyajikan informasi dasar, lokasi, dan tingkat serta karakteristiknya.
- c. Laporan, peta, bagan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan perencanaan untuk pengembangan, pengembangan ulang, peningkatan, perluasan, dan perbaikan pendidikan untuk mencapai tujuan nasional, dan harapan orang tua.
- d. Program pengembangan pendidikan jangka panjang berdasarkan rekomendasi dari dewan pendidikan, penyuluh pendidikan untuk tujuan mengeliminasi proyek-proyek pendidikan yang tidak terencana, tidak tepat waktu, dan boros, dengan pandangan untuk menstabilkan pendidikan untuk memberdayakan perubahan budaya dan teknologi dan revisi tahunan dari perencanaan seperti itu agar tetap baru (up to date).
- e. Program pengeluaran (pembiayaan) pendidikan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang yang tetap diperbaharui agar memungkinkan penggunaan dana publik yang ada secara optimal.

II. Mengubah

Jika ternyata informasi dari hasil evaluasi menyatakan bahwa rencana yang dibuat harus dirubah maka ada dua yang menjadi dasar penyusunan perubahan ini. Pertama adalah keadaan yang diinginkan pada masa depan (*das sollen*) yang disesuaikan dengan rencana dan program yang diinginkan. Kedua adalah kondisi saat sekarang, termasuk isu-isu tentang kebijakan pembangunan pendidikan nasional (*das sein*). Setelah kedua hal ini digambarkan, barulah kemudian disusun perubahan rencana sesuai kebijakan, program, kegiatan, dan strategi pelaksanaannya.

Selain hal tersebut di atas, juga diperhitungkan tantangan dan hambatan yang akan dihadapi dalam mencapai keadaan yang diinginkan tersebut, diantaranya adalah kondisi politik, ekonomi, sosial-budaya, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pekerjaan mengubah perencanaan pada umumnya memiliki ciri-ciri dengan langkah-langkah dasar tertentu sebagai berikut ini.

- a. Memperjelas masalah.
- b. Masalah itu diperlihatkan dengan jelas dan dinyatakan secara ringkas dan cepat, tentang keadaan sekarang yang memerlukan perbaikan dan oleh karena itulah suatu rencana disusun. apa sebenarnya tujuan atau keinginan dari rencana yang telah dirumuskan dengan tepat.
- c. Adakah tujuan yang telah dipikirkan dengan sungguh-sungguh itu berbenturan dengan tujuan-tujuan yang sudah ada, sehingga perlu disesuaikan atau ada yang dihilangkan dari rencana yang sekarang? Memperoleh informasi yang lengkap tentang kegiatan-kegiatan yang terlibat. Pengetahuan tentang aktivitas-aktivitas yang

direncanakan adalah hal yang penting dan apa akibat terhadap aktivitas-aktivitas intern dan ekstern bagi perusahaan dalam rangka menyusun perencanaan yang baik. Dalam hal ini, perlu diperhatikan semua data yang diperlukan dan tenaga operasi yang betul-betul mau diberi saran-saran.

- d. Mengklasifikasi dan menganalisis informasi. Tiap komponen dari informasi perlu diuji secara terpisah sehubungan dengan keseluruhan data. Semua informasi itu harus ada keterkaitan satu sama lainnya, kemudian ditabulasi agar mudah dianalisis dan memilih data yang dapat dipakai agar dimasukkan.
- e. Memantapkan dugaan-dugaan yang menjadi pegangan dan hambatan-hambatan. Dari data yang kuat hubungannya dengan masalah dan juga dengan keyakinan akan ikut menentukan rencana, maka dugaan-dugaan itu dijadikan dasar pembuatan rencana. Dalam hal ini dugaan-dugaan dan hambatan-hambatan merupakan latar belakang yang perlu ada atau ikut ambil bagian memvalidasikan/mensahihkan rencana itu.
- f. Menentukan rencana pilihan. Biasanya tersedia beberapa pilihan rencana untuk mencapai pekerjaan yang akan dilaksanakan, dan berbagai kemungkinan untuk dikembangkan dalam langkah ini. Dalam hal ini, perlu dipertimbangkan waktu, biaya dan mutu yang diharapkan dapat dicapai, di samping perlunya para manajer puncak memahami rencana-rencana yang mungkin memiliki tujuan-tujuan serta cara-cara operasinya.
- g. Memilih rencana yang diusulkan. Atas dasar

- pertimbangan yang cermat, pelaksanaan, dan biaya, yang dapat diserap maka keputusan rencana mana yang diambil. Juga perlu dipertimbangkan, apakah rencana itu sederhana atau rumit. Selanjutnya, bisakah rencana itu dilaksanakan oleh petugas operasi, dapatkah rencana itu menyesuaikan diri dengan kondisi yang beragam serta perlukah alat-alat baru, ruangan, tenaga, latihan dan supervisi?
- h. Menyusun urutan terinci dan waktu untuk rencana yang diusulkan. Selanjutnya, terjemahan dari rencana itu dan hubungannya dengan semua aktivitas yang diakibatkannya agar dapat dikerjakan. Secara rinci, perlu ditentukan dimana tindakan yang akan dilakukan, oleh siapa, kapan waktunya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perlu juga diperhatikan hal-hal berikut : jadwal waktu, rincian instruksi tertulis, kertas format, alat serta barang yang harus tersedia.
 - i. Menyediakan pemeriksaan atas kemajuan dan rencana yang diusulkan. Keberhasilan suatu rencana harus diukur dan setelah itu perlu dipersiapkan usul-usul atau saran-saran tindak lanjut. Selain dari hasil evaluasi dan juga dari kegiatan pengawasan, berbagai catatan serta laporan sangat perlu bagi para pelaksana untuk masa yang akan datang terutama jika terdapat kelemahan-kelemahan pada rencana semula.

III. Mendesain Ulang Rencana

Jika ternyata rekomendasi terhadap rencana yang dibuat harus mengalami proses desain ulang rencana, maka perencanaan pendidikan akan lebih mampu melaksanakan

kajian rencana sesuai dengan kondisi yang relevan. Pertimbangan lain yang sangat mempengaruhi penyusunan rencana ulang ini adalah memperhatikan kebijakan yang belum terakomodir yang dikeluarkan pengambil kebijakan. Oleh sebab itu, langkah-langkah perencanaan tetap mengikuti langkah-langkah perencanaan dengan tepat.

BAB VI

ARAH PERENCANAAN PENDIDIKAN

Arah perencanaan pendidikan sangat tergantung dari kepentingan suatu bangsa atau daerah yang dituangkan dalam visi, misi maupun renstra yang telah dibuat sehingga dapat dicapai melalui mekanisme tertentu. Misalnya, untuk Indonesia oleh Departemen Pendidikan Nasional arah perencanaan pendidikan ditentukan dengan tiga pilar pembangunan, yaitu pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, dan penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Inilah menjadi arah perencanaan pendidikan di Indonesia secara nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Otonomi daerah pada dasarnya memberi ruang bagi kabupaten/kota untuk menentukan arah perencanaannya sepanjang kabupaten/kota mampu membuat arah dan melaksanakannya.

A. Pemerataan dan Perluasan Akses

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan sesuai dengan prioritas nasional, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Indonesia untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era global, serta meningkatkan peringkat IPM hingga

mencapai posisi sama dengan atau lebih baik dari peringkat IPM sebelum krisis. Untuk itu, sampai dengan tahun 2009 dilakukan upaya-upaya sistematis dalam pemerataan dan perluasan pendidikan, dengan mempertahankan APM-SD pada tingkat 94%, memperluas SMP/MTs hingga mencapai APK 97,4% atau APM 75,5% serta menurunkan angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas hingga 5%.

Penuntasan wajar dikdas 9 tahun memperhatikan pelayanan yang adil dan merata bagi penduduk yang menghadapi hambatan ekonomi dan sosial-budaya (yaitu: penduduk miskin, memiliki hambatan geografis, daerah perbatasan, dan daerah terpencil), maupun hambatan atau kelainan fisik, emosi, mental serta intelektual peserta didik. Untuk itu, diperlukan strategi yang lebih efektif antara lain dengan membantu dan mempermudah mereka yang belum bersekolah, putus sekolah, serta lulusan SD/MI/SDLB yang tidak melanjutkan ke SMP/MTs/SMPLB yang masih besar jumlahnya, untuk memperoleh layanan pendidikan. Di samping itu, akan dilakukan strategi yang tepat untuk meningkatkan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan, khususnya pada masyarakat yang menghadapi hambatan tersebut.

Penuntasan wajar, dikdas 9 Tahun akan menambah jumlah lulusan SMP/MTs/SMPLB setiap tahunnya sehingga juga akan mendorong perluasan pendidikan menengah. Dengan bertambahnya permintaan pendidikan menengah, Pemerintah juga melakukan perluasan pendidikan menengah terutama bagi mereka yang karena satu dan lain hal tidak dapat menikmati pendidikan SMA yang bersifat reguler, melalui SMA Terbuka dan Paket C, sehingga pada gilirannya mendorong peningkatan APM-SMA. Oleh karena SMA cenderung semakin meluas jauh di atas SMK, maka

Pemerintah lebih mempercepat pertumbuhan SMK diiringi dengan upaya mendorong peningkatan program pendidikan kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Pemerintah akan memperluas akses pendidikan tinggi untuk menjawab meningkatnya partisipasi sekolah menengah. Meningkatnya angka partisipasi PT tersebut akan diiringi oleh kebijakan yang mengarah pada pencapaian daya saing lulusan PT secara global. Secara bersamaan, dilakukan upaya untuk meningkatkan proporsi jumlah keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Salah satu upaya untuk pemenuhan tersebut di antaranya melalui peningkatan jumlah keahlian bidang vokasi melalui institusi politeknik. Selain itu, dikembangkan program *community college* yang merupakan upaya harmonisasi antara pendidikan kejuruan di SMK, pendidikan nonformal berkelanjutan, dan PT vokasi. Di samping itu, untuk meningkatkan APK PT dapat dicapai dengan memberikan kesempatan kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk dapat mendapat pelayanan pendidikan yang memadai.

Dengan mempertimbangkan keterbatasan kapasitas fisik pemerintah, strategi pemerataan dan perluasan akses pendidikan tinggi lebih diarahkan pada peran partisipasi swasta dalam mendirikan lembaga pendidikan tinggi baru. Namun strategi perluasan akan dikaitkan dengan pencapaian mutu yang lebih baik dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era global. Untuk itu, pemerintah akan terus membenahi peraturan dan perundang-undangan serta memperkuat kapasitas kelembagaan yang terkait dengan fungsi pengendalian dan penjaminan mutu.

Kebijakan perluasan pendidikan tinggi juga dilakukan searah dengan upaya membuka kesempatan bagi calon

mahasiswa yang berasal dari penduduk di atas usia ideal pendidikan tinggi (> 24 th) seperti karyawan, guru sekolah, tenaga spesialis industri, termasuk dalam pendidikan non-gelar dan pendidikan profesi yang mengutamakan penguasaan pengetahuan, keterampilan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja industri.

Perluasan akses pendidikan tinggi juga dilakukan melalui pengembangan kapasitas pembelajaran digital jarak jauh yang semakin luas dan efektif. Universitas Terbuka dan institusi sejenis lainnya ditugaskan untuk mengimplementasikan strategi ini, dengan memanfaatkan secara optimal ICT dalam proses pembelajaran, pengelolaan, dan akses informasi. Dalam kaitan itu, Ditjen Pendidikan Tinggi memprioritaskan investasi infrastruktur ICT untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh pada Universitas Terbuka dan perguruan tinggi lainnya serta Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan.

Beberapa kebijakan strategis yang disusun dalam rangka memperluas pemerataan dan akses pendidikan adalah sebagai berikut.

- (a) Memperluas akses bagi anak usia 0–6 tahun, baik laki-laki maupun perempuan untuk memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimiliki dan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam mengikuti pendidikan sekolah dasar.
- (b) Menghapus hambatan biaya (*cost barriers*) melalui pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi semua siswa pada jenjang pendidikan dasar (dikdas) baik pada sekolah umum maupun madrasah yang dimiliki oleh pemerintah atau

masyarakat, yang besarnya dihitung berdasarkan *unit cost* per siswa dikalikan dengan jumlah seluruh siswa pada jenjang tersebut. Di samping itu, dilakukan kebijakan pemberian subsidi biaya personal terutama bagi siswanya berasal dari keluarga miskin pada jenjang dikdas melalui pemanfaatan BOS untuk tujuan tersebut. Secara bertahap, BOS akan dikembangkan menjadi dasar untuk penentuan satuan biaya pendidikan berdasarkan formula (*formula-based funding*) yang memperhitungkan siswa miskin maupun kaya serta tingkat kondisi ekonomi daerah setempat.

- (c) Membentuk "**SD-SMP Satu Atap**" bagi daerah terpencil yang berpenduduk jarang dan terpencar, dengan menambahkan ruang belajar SMP di SD untuk menyelenggarakan program pendidikan SMP bagi lulusannya. Untuk mengatasi kesulitan tenaga pengajar dalam kebijakan ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan guru SD untuk mengajar di SMP pada beberapa mata pelajaran yang relevan atau dengan meningkatkan kompetensi guru sehingga dapat mengajar di SMP. Selain itu, dilakukan upaya memaksimalkan fasilitas yang sudah ada, baik ruang kelas maupun bangunan sekolah dengan membuat jaringan sekolah antara SMP dengan SD-SD yang ada di wilayah layanannya (*catchment areas*) serta menggabungkan SD-SD yang sudah tidak efisien lagi.
- (d) Memperluas akses bagi anak usia sekolah 7–15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak/belum terlayani di jalur pendidikan formal

untuk memiliki kesempatan mendapatkan layanan pendidikan di jalur nonformal maupun program pendidikan terpadu/inklusif bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus terutama untuk daerah-daerah yang tidak tersedia layanan pendidikan khusus luar biasa. Di samping itu, untuk memperluas akses bagi penduduk usia 13-15 tahun dikembangkan SMP Terbuka melalui optimalisasi daya tampung dan pengembangan SMP Terbuka model maupun melalui model layanan pendidikan alternatif yang inovatif.

- (e) Memperluas akses bagi penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas baik laki-laki maupun perempuan untuk memiliki kesempatan mendapatkan layanan pendidikan keaksaraan melalui jalur pendidikan nonformal. Perluasan kesempatan bagi penduduk buta aksara dilakukan dengan menjalin berbagai kerjasama dengan *stakeholder* pendidikan, seperti organisasi keagamaan, organisasi perempuan, dan organisasi lain yang dapat menjangkau lapisan masyarakat, serta PT.
- (f) Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam memperluas akses SMA, khususnya pada daerah-daerah yang memiliki lulusan SMP cukup besar. Di sisi lain dikembangkan SM terpadu, yaitu pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dalam satu satuan pendidikan. Bagi siswa yang berkebutuhan khusus, dilakukan kebijakan strategis dalam melaksanakan program pendidikan inklusif.

- (g) Memperluas akses terhadap pendidikan di SMK sesuai dengan kebutuhan dan keunggulan lokal. Perluasan SMK ini dilaksanakan melalui penambahan program pendidikan kejuruan yang lebih fleksibel sesuai dengan tuntutan pasar kerja yang berkembang. Di samping itu, dilakukan upaya penambahan muatan pendidikan keterampilan di SMA bagi siswa yang akan bekerja setelah lulus.
- (h) Memperluas daya tampung PT yang ada dengan memberikan fasilitas pada universitas untuk membuka program-program keahlian yang dibutuhkan masyarakat dan mengalihfungsikan atau menutup sementara secara fleksibel program-program yang lulusannya sudah jenuh.
- (i) Memperluas kesempatan belajar pada perguruan tinggi yang lebih dititikberatkan pada program-program politeknik, pendidikan tinggi vokasi dan profesi yang berorientasi lebih besar pada penerapan teknologi tepat guna untuk kebutuhan dunia kerja.
- (j) Memperluas kesempatan belajar sepanjang hayat bagi penduduk dewasa yang ingin meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan hidup yang relevan dengan kebutuhan masyarakat melalui program-program pendidikan berkelanjutan. Perluasan kesempatan belajar sepanjang hayat dapat juga dilakukan dengan mengoptimalkan berbagai fasilitas pendidikan formal yang sudah ada sebagai bagian dari harmonisasi pendidikan formal dan nonformal.
- (k) Memperhatikan secara khusus kesetaraan gender, pendidikan untuk layanan khusus di daerah

terpencil dan daerah tertinggal, daerah konflik, perbatasan, dan lain-lain, serta mengimplementasikannya dalam berbagai program secara terpadu.

- (l) Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi (KIE), serta advokasi kepada masyarakat agar keluarga makin sadar akan pentingnya pendidikan serta mau mengirimkan anak-anaknya ke sekolah dan/atau mempertahankan anaknya untuk tetap bersekolah.
- (m) Memanfaatkan secara optimal sarana radio, televisi, komputer dan perangkat ICT lainnya untuk digunakan sebagai media pembelajaran dan untuk pendidikan jarak jauh sebagai sarana belajar alternatif selain menggunakan modul atau tutorial, terutama bagi daerah terpencil dan mengalami hambatan dalam transportasi, serta jarang penduduk.

B. Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing

Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pada masa depan diharapkan dapat memberikan dampak bagi perwujudan eksistensi manusia dan interaksinya sehingga dapat hidup bersama dalam keragaman sosial dan budaya. Selain itu, upaya peningkatan mutu dan relevansi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta daya saing bangsa. Mutu pendidikan juga dilihat dari meningkatnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai humanisme yang meliputi keteguhan iman dan takwa serta berahlak mulia, etika, wawasan kebangsaan, kepribadian tangguh, ekspresi estetika, dan kualitas jasmani. Peningkatan mutu dan relevansi

pendidikan diukur dari pencapaian kecakapan akademik dan nonakademik yang lebih tinggi yang memungkinkan lulusan dapat proaktif terhadap perubahan masyarakat dalam berbagai bidang baik di tingkat lokal, nasional maupun global.

Kebijakan peningkatan mutu pendidikan diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan yang semakin meningkat yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP meliputi berbagai komponen yang terkait dengan mutu pendidikan mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Pemerintah memberikan intervensi kepada satuan-satuan dan program (studi) pendidikan untuk mencapai standar yang diamanatkan oleh UU Sisdiknas. Standar-standar tersebut digunakan juga sebagai dasar untuk melakukan penilaian terhadap kinerja satuan dan program pendidikan, mulai dari PAUD, Dikdas, Pendidikan Menengah (Dikmen), PNF, sampai dengan Pendidikan Tinggi (Dikti).

Peningkatan mutu pendidikan semakin diarahkan pada perluasan inovasi pembelajaran baik pada pendidikan formal maupun non-formal dalam rangka mewujudkan proses yang efisien, menyenangkan dan mencerdaskan sesuai tingkat usia, kematangan, serta tingkat perkembangan anak. Pengembangan proses pembelajaran pada PAUD serta kelas-kelas rendah sekolah dasar lebih memperhatikan prinsip perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak anak dengan lebih menekankan pada upaya pengembangan kecerdasan emosional, sosial, dan spiritual dengan prinsip bermain sambil belajar. Peningkatan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi semakin memperhatikan pengembangan kecerdasan rasional dalam rangka memacu

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi disamping memperkokoh kecerdasan emosional, sosial, dan spritual peserta didik.

Upaya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan secara berkelanjutan akan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan secara terpadu yang pengelolaannya dikoordinasikan secara terpusat. Dalam pelaksanaannya koordinasi tersebut didelegasikan kepada Gubernur atau aparat vertikal yang berkedudukan di provinsi. Manajemen mutu tersebut akan dilaksanakan melalui kebijakan strategis sebagai berikut:

- (a) Mengembangkan dan menetapkan standar nasional pendidikan sesuai dengan PP SNP No. 19/2005, sebagai dasar untuk melaksanakan penilaian pendidikan, peningkatan kapasitas pengelolaan pendidikan, peningkatan sumber daya pendidikan, akreditasi satuan dan program pendidikan, serta upaya penjaminan mutu pendidikan.
- (b) Melaksanakan evaluasi pendidikan melalui ujian nasional yang dilakukan oleh sebuah badan mandiri yaitu Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Ujian nasional mengukur ketercapaian kompetensi siswa/ peserta didik berdasarkan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan secara nasional (*benchmark*). Hasil ujian nasional tidak merupakan satu-satunya alat untuk menentukan kelulusan siswa pada setiap satuan pendidikan tetapi terutama sebagai sarana untuk melakukan pemetaan dan analisis mutu pendidikan yang

dimulai dari tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi sampai tingkat nasional.

- (c) Melaksanakan penjaminan mutu (*quality assurance*) melalui suatu proses analisis yang sistematis terhadap hasil ujian nasional dan hasil evaluasi lainnya yang dimaksudkan untuk menentukan faktor pengungkit dalam upaya peningkatan mutu, baik antarsatuan pendidikan, antar kabupaten/kota, antar-provinsi, atau melalui pengelompokan lainnya. Analisis dilakukan oleh pemerintah bersama pemerintah provinsi yang secara teknis dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) pada masing-masing wilayah. Berdasarkan analisis itu, diberikan intervensi terhadap satuan dan program (studi) pendidikan di antaranya melalui: pendidikan dan pelatihan terutama pengembangan proses pembelajaran efektif, pemberian bantuan teknis, pengadaan dan pemanfaatan sumber daya pendidikan, serta pemanfaatan ICT dalam pendidikan. Di samping itu untuk mempercepat tercapainya pemerataan mutu pendidikan dilakukan pemberian subsidi yang diarahkan pada satuan pendidikan yang belum mencapai standar nasional.
- (d) Melaksanakan akreditasi satuan dan/atau program pendidikan untuk menentukan status akreditasinya masing-masing. Penilaian dilakukan setiap lima tahun dengan mengacu pada SNP. Akreditasi juga dapat menggunakan rata-rata hasil ujian nasional dan/atau ujian sekolah sebagai dasar

pelayanan masyarakat yang profesional.

Kebijakan perwujudan tata kelola pemerintahan yang sehat dan akuntabel dilakukan secara intensif melalui Sistem Pengendalian Internal (SPI), pengawasan masyarakat, serta pengawasan fungsional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pemerintah mengembangkan dan melaksanakan SPI pada masing-masing satuan kerja dalam mengelola kegiatan pelayanan pendidikan sehari-hari. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan RI, dan BPKP terhadap hasil pembangunan pendidikan, sedangkan pengawasan masyarakat dilakukan langsung oleh individu-individu atau anggota masyarakat yang mempunyai bukti-bukti penyalahgunaan wewenang.

Sejalan dengan pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan berdasarkan otonomi dan desentralisasi, pemerintah pusat mengkoordinasikan manajemen mutu pendidikan, sementara pemerintah daerah berperan dalam manajemen sarana/prasarana dan operasional layanan pendidikan. Untuk peningkatan efisiensi dan mutu layanan, diperlukan pengembangan kapasitas daerah serta penataan *tata kelola* pendidikan yang sehat dan akuntabel, baik pada tingkat satuan pendidikan maupun tingkat kabupaten/kota. Dalam kaitan itu, pemerintah daerah lebih berperan dalam mendorong otonomi satuan pendidikan melalui pengembangan kapasitas dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu.

Berdasarkan pembagian kewenangan tersebut di atas terdapat fungsi-fungsi baru yang harus dijalankan oleh pusat maupun daerah. Untuk itu, dikembangkan mekanisme yang akan mengatur berbagai fungsi baru yang telah diidentifikasi tersebut dalam suatu struktur, sistem dan mekanisme yang baru

didukung oleh peraturan perundangan yang sesuai. Berbagai identifikasi dan kajian mengenai pentingnya fungsi dan institusi baru yang diperlukan untuk pelayanan pendidikan dalam masa otonomi dan desentralisasi dilakukan secara komprehensif oleh Depdiknas.

Sesuai dengan kerangka pengaturan dan kerangka institusional, disusun kebijakan untuk mendorong terjadinya penguatan kapasitas satuan dan program pendidikan yang ada pada setiap tingkatan pemerintahan. Penguatan kapasitas satuan atau program pendidikan diorientasikan untuk mencapai status kapasitas tertinggi suatu satuan pendidikan, yaitu jika dapat memenuhi atau di atas SNP. Pengembangan kapasitas dilakukan untuk mendorong agar sebagian besar satuan pendidikan yang masih berada di bawah SNP secara bertahap akan diperkuat sehingga mampu melampaui SNP. Bagi satuan-satuan pendidikan yang sudah memenuhi SNP, akan didorong untuk memacu mutunya lebih tinggi lagi hingga dapat mencapai standar internasional. Pada tahun 2009, Pemerintah akan mendorong peningkatan proporsi satuan pendidikan untuk dapat mencapai sama atau di atas SNP setidaknya mencapai 25% SD, 40% SMP, 50% SMA, dan 50% SMK pada tahun 2009.

Pengembangan kapasitas diarahkan pada peningkatan kemampuan Kabupaten/kota secara sistematis untuk memberikan pelayanan pendidikan yang efektif dan akuntabel sesuai dengan SNP. Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan pendidikan pada kabupaten/kota dikembangkan dan diremajakan indikator-indikator kinerja pengelolaan layanan pendidikan, baik pada jalur formal maupun non-formal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam jangka menengah diperkuat kapasitas pengelolaan layanan pendidikan terhadap kabupaten/kota sehingga dapat menambah kabupaten/kota

yang memiliki kapasitas pelayanan sesuai dengan SNP.

Penguatan kapasitas pendidikan tinggi dilakukan melalui pengembangan mekanisme untuk mewujudkan kesehatan organisasi dan otonomi masing-masing perguruan tinggi. Secara keseluruhan, upaya tersebut dilakukan dengan menetapkan sistem, mekanisme, norma-norma, dan standar yang relevan yang dapat dijadikan acuan bagi masing-masing perguruan tinggi untuk meningkatkan kesehatan institusinya. Pada tahun 2009, diharapkan mekanisme kerja institusi dan aturan perundangan yang diperlukan sudah dapat diselesaikan.

1) Pemerataan Kesempatan

- Persamaan kesempatan
- Akses
- Keadilan atau kewajaran

Contoh-contoh perencanaan pemerataan kesempatan misalnya, bea siswa untuk siswa miskin, SD-SMP satu atap, pelatihan guru PLB, pembenahan SMP Terbuka, perencanaan bagi daerah-daerah terpencil dan jender, peningkatan APK & APM, peningkatan angka melanjutkan, pengurangan angka putus sekolah, dsb.

2) Peningkatan Kualitas

Kualitas pendidikan meliputi input, proses, dan output, dengan catatan bahwa output sangat ditentukan oleh proses, dan proses sangat dipengaruhi oleh tingkat kesiapan input. Contoh-contoh perencanaan kualitas misalnya, pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan (guru, kepala sekolah, konselor, pengawas, staf Dinas Pendidikan, dsb), peningkatan kapasitas dewan pendidikan dan komite sekolah, rasio (siswa/guru, siswa/kelas, siswa/ruang kelas, siswa/sekolah), pengembangan bahan ajar, pengembangan

tes standar di tingkat kabupaten/kota, biaya pendidikan per siswa, pengembangan model pembelajaran (PAKEM, pembelajaran tuntas, pembelajaran dengan melakukan, pembelajaran kontekstual, pembelajaran kooperatif), peningkatan NUAN, NUAS, karya ilmiah keterampilan kejuruan, kesenian, olahraga, keagamaan, akhlak, moral, budipekerti, kedisiplinan, dsb.)

3) Peningkatan Efisiensi

Efisiensi merujuk pada hasil yang maksimal dengan biaya yang wajar. Efisiensi dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu efisiensi internal dan efisiensi eksternal. Efisiensi internal merujuk kepada hubungan antara output sekolah (pencapaian prestasi belajar) dan input (sumber daya) yang digunakan untuk memproses/menghasilkan output sekolah. Efisiensi eksternal merujuk kepada hubungan antara biaya yang digunakan untuk menghasilkan tamatan dan keuntungan kumulatif (individual, sosial, ekonomik dan non-ekonomik) yang didapat setelah kurun waktu yang panjang diluar sekolah. Contoh-contoh perencanaan peningkatan efisiensi misalnya, peningkatan angka kelulusan, rasio keluaran/masukan, angka kenaikan kelas/transisi, penurunan angka mengulang, angka putus sekolah, dan peningkatan angka kehadiran.

4) Peningkatan Relevansi

Relevansi merujuk kepada kesesuaian hasil pendidikan dengan kebutuhan (needs), baik kebutuhan peserta didik, kebutuhan keluarga, dan kebutuhan pembangunan yang meliputi berbagai sektor dan sub-sektor. Contoh-contoh perencanaan relevansi misalnya, program keterampilan

kejuruan/kewirausahaan/usaha kecil bagi siswa-siswa yang tidak melanjutkan, kurikulum muatan lokal, pendidikan kecakapan hidup dan peningkatan jumlah siswa yang terserap di dunia kerja.

5) Pengembangan Kapasitas

Pengembangan kapasitas adalah upaya-upaya yang dilakukan secara sistematis untuk menyiapkan kapasitas (Sekolah, Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, dsb.) agar mampu dan sanggup menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam kerangka untuk menghasilkan output yang diharapkan. Pengembangan kapasitas meliputi pengembangan sumber daya manusia, kelembagaan dan keterkaitan eksternal. Contoh-contoh pengembangan kapasitas, misalnya pengembangan kapasitas sumber daya manusia pada tingkat sekolah dan dinas pendidikan kabupaten/kota, pengembangan kapasitas perencanaan pendidikan, manajemen keuangan, dewan pendidikan, analisis regulasi pendidikan, pengembangan (organisasi, SIM pendidikan), dan tata kelola.

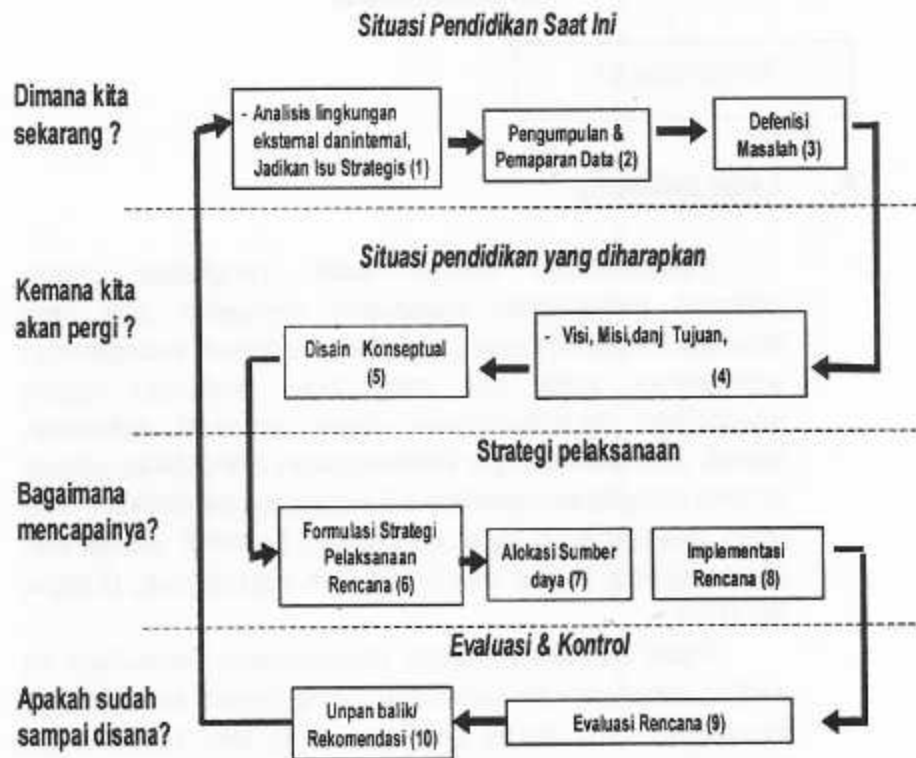
DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Andrew F. Sikula (1973)**, *Management and Administration*, University of Illinois at Chicago Circle, Inc., Columbus, Ohio, 43216
- Banghart, W. Frank at al. 1967. *Educational Planning*, The Macmillan, Company. London .
- Blaug, M. (1976). *Economic of Education*. Ontario Canada. The Allen Lane Pinguin Press.
- Coombs, H. Philips. 1970. *What is Educational Planning*. Unesco.
- 1985. Materi Kuliah Akta V. IKIP Padang
- Dachnel Kamars, 2001. *Administrasi Pendidikan*, Suryani. Padang
- Depdiknas. 2007. *Permen No. 41 tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta:
- De Porter, Bobby, and friend. 2002. *Quantum Teaching*. Bandung: Kaifa
- Kaufman, Roger A (1975), *Educational System Planning*, Penerbit Prentice Hall, Inc., New Jersey, USA
- Tim. 2007. *Model-Model Pembelajaran yang Efektif*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional

- Udin Syaefudin, Dkk 2005. *Perencanaan Pendidikan suatu pendekatan Komprehensif*. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Sergiovani J. T. dan Coom, S. F. (1992-) *Educational Governance and Administration*. Massachusetw, PrentiteM- all..
- Sofyan, Herminanto. 2004. *Pedoman Khusus Penelusuran Potensi Siswa*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Nasional
- Yahya (2003). *Sistem manajenen Pembiayaan Pendidikan suatu studi di Sekolah Dasar Sumatera Barat*. Disertasi Universitas Pendidik-an Indoesia, Bandung.
- Zymelman, M. (1973). *Financing and Efficiency in Education*. BostonHarvard University.

Contoh Perencanaan pada Tataran Mikro

LANGKAH PERENCANAAN PENDIDIKAN



**PEMBERIAN MOTIVASI PADA SISWA UNTUK BERTANYA
DAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SECARA LISAN DALAM
SETIAP PROSES PEMBELAJARAN DI KELAS**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Situasi Saat Ini

A. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi seperti peristiwa, keadaan, suasana dan sebagainya, serta apa yang akan dilakukan seperti intensifikasi, eksistensifikasi, revisi, renovasi, substitusi, kreasi, dan sebagainya. Perencanaan Pendidikan adalah proses penyiapan seperangkat kebijakan pendidikan yang akan dilaksanakan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien sesuai tujuan dan kebutuhan masyarakat, (Yahya, 2008;20)

Pada prinsipnya, tujuan perencanaan pendidikan itu adalah menegaskan kebenaran yang berarti menemukan kenyataan yang dapat diterima orang lain, menentukan serangkaian tindakan, serta membujuk yang membutuhkan sehingga dapat memunculkan sikap personal, kegemaran, prasangka dan emosi yang dapat menentukan tindakan. Keterkaitan lainnya adalah mendukung koordinasi antarpelaku pendidikan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antara sekolah dengan dinas pendidikan, dinas pendidikan

propinsi dan pusat, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, kemudian mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Perencanaan pendidikan muncul akibat semakin ruwet dan kompleksnya permasalahan pendidikan yang timbul dalam masyarakat sehingga membutuhkan suatu pengelolaan yang terstruktur dan komprehensif. Di samping itu ada keinginan positif untuk membawa pendidikan pada situasi tertentu yang lebih baik dan bermutu dan tentu saja merupakan hasil kajian dan analisis situasi terbaru. Pendidikan merupakan sistem didalamnya ada proses yang akan membentuk subsub sistem dalam lingkungan pendidikan. Sistem pendidikan itu antara lain sistem aktifitas pendidikan, sistem komunikasi pendidikan, sistem fasilitas pendidikan, dan sistem operasi pendidikan (Udin Syaefudin Sa'ud, 2007:85).

Secara nasional masalah rendahnya mutu pendidikan di sekolah merupakan sebuah isu nasional, dan harus segera dicari alternatif solusi pemecahannya. Diantara permasalahan pendidikan di Indonesia adalah menyangkut masalah 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan PP No.19 tahun 2005 Pasal 2, diantaranya (1). Standar Isi, (2). Standar Proses, (3). Standar Kompetensi Kelulusan, (4). Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5). Standar Sarana dan Prasarana, (6). Standar Pengelolaan, (7). Standar Pembiayaan dan (8). Standar Penilaian pendidikan.

Berdasarkan delapan permasalahan di atas, maka fokus permasalahan yang akan dikupas hanya dikhususkan kepada standar proses. Standar proses amat

menentukan keberhasilan guru dalam menacapai tujuan. Dalam penilaian afektif, acuan standar proses justru menjadi titik sentral dalam melakukan penilaian. Standar proses yang dimaksud adalah proses dalam kegiatan pembelajaran. Perencanaan proses pembelajaran tersebut meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Secara umum, struktur RPP tersebut mencakup seperti identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, peniaian hasil belajar dan sumber belajar (Permen 41 Tahun 2007).

Kenyataan di lapangan, ditemui permasalahan seperti dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia atau mata pelajaran lainnya dalam kegiatan pembelajaran. Permasalahan ditemui berdasarkan keluhan dari guru-guru mata pelajaran, bahwa 65 % siswa pada umumnya kurang berani mengemukakan pendapat atau mengajukan pertanyaan secara lisan. Untuk meningkatkan daya serap siswa tiap mata pelajaran, diharapkan dalam pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan secara interaktif sehingga memunculkan partisipasi aktif untuk mencapai kemadirian.

B. Analisis Masalah

Salah satu contoh sampel yang dapat diambil adalah SMA Negeri 1 Palupuh, Kabupaten Agam. Dari hasil pendataan, dilihat hasil sebagai berikut ini.

No	Kelas	Jml Siswa	Siswa yang Bertanya		Siswa yang Kurang Berani Bertanya
			Jumlah	Prosetase	
1	X.1	33	5	15,15%	84,85%
2	X.2	32	6	18,75%	81,25%
3	X.3	31	4	12,90%	87,10%
4	XI. IA	15	11	73,33%	26,67%
5	XI. IS.1	35	9	25,71%	74,29%
6	XI.IS.2	34	9	26,47%	73,53%
7	XII.IA	14	10	71,43%	28,57%
8	XII.IS.1	33	7	21,21%	78,79%
9	XII.IS.2	34	6	17,65%	82,35%

Berdasarkan data di atas, jelas terlihat bahwa prosentase jumlah siswa yang kurang berani bertanya untuk kelas X rata-ratanya adalah 15,60%. Kelas XI.IA cukup tinggi yaitu sekitar 73,33% dan IS sebanyak 26,09%. Kelas IA cukup tinggi karena siswa yang duduk di kelas tersebut adalah hasil seleksi dari kelas X yang memang tergolong kepada siswa yang cukup tinggi kemampuan akademiknya. Hal yang sama juga terlihat pada kelas XII. IA, yaitu sekitar 71,43%. Sedangkan IS rata-ratanya adalah 19,43%.

Penyebab terjadinya permasalahan di atas diperkirakan adalah sebagai berikut ini.

1. Dari faktor siswa
 - a. Siswa takut salah dan diejek oleh teman-teman.
 - b. Siswa takut salah dan kena marah oleh guru.
 - c. Siswa merasa gentar bila semua mata tertuju kepadanya.

- d. Siswa kurang mengerti dengan apa yang ditanyakan/dipermasalahakan.
 - e. Siswa merasa takut, jangan-jangan komentar saya justru malah makin menyimpang menurut anggapan guru.
 - f. Siswa sering tidak bisa memilih kata-kata yang tepat dalam menyampaikan argumentasinya.
 - g. Siswa mencontek punya teman karena itu malu rasanya menampilkan hasil contekan.
 - h. Siswa malas bila disuruh ke depan.
 - i. Siswa memcampuradukkan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah/kampung, akibatnya guru dan teman-teman malah mentertawakan.
 - j. Siswa merasa ragu dengan pendapat sendiri.
2. Dari faktor guru
- a. Guru kurang mampu memotivasi siswa untuk aktif dalam pembelajaran.
 - b. Guru agak pelit merespon pendapat siswa.
 - c. Guru tidak memberi *reward* atau mungkin saja *fanisimen*.
 - d. Guru malah mencemooh pendapat siswa apalagi bagi mereka yang tidak lancar dalam berbahasa.
 - e. Guru tidak memberi kesempatan untuk bertanya atau memberikan pendapat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang perlu segera dicari solusi penyelesaiannya di antaranya: "KURANGNYA KEBERANIAN SISWA DALAM BERTANYA DAN MENGEMUKAKAN

PENDAPAT SECARA LISAN DALAM SETIAP PROSES PEMBELAJARAN DI KELAS".

Demikianlah permasalahan-permasalahan yang timbul berkenaan dengan terhalangnya proses pembelajaran di kelas, dari segi keberanian dan kemauan dalam memberikan/mengemukakan pendapat oleh siswa.

Kondisi yang Diharapkan

BAB II DESAIN RENCANA

- A. Tujuan
1. Pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
 2. Merubah paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran.
- B. Sasaran
1. Guru secara individual
 2. KKG
- C. Desain Perencanaan
- Dengan mempedomani beberapa fakta pada bab terdahulu, maka salah satu upaya dalam meningkatkan kemampuan dan kemauan untuk bertanya, menjawab dan meminta klarifikasi pada siswa adalah dengan menerapkan teknik pembelajaran melalui debat, dan mengintegrasikannya ke dalam metode partisipatori dan komunikatif, memperbaiki pengelolaan kelas serta mengaplikasikan standar pelaksanaan proses pembelajaran yang dirumuskan oleh BSNP.
- D. Spesifikasi Perencanaan
- Faktor penunjang dalam efektifitas berbicara dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu sudut kebahasaan dan sudut non kebahasaan. Yang termasuk sudut kebahasaan adalah: 1) ketepatan ucapan atau vokalisasi, 2) penempatan tekanan, nada dan intonasi, 3) diksi yang menarik dan tepat, 4) tepat

ke sasaran, dan 5) sesuai dengan target durasi ketersediaan waktu.

1. Metode Partisipatori

Lahirnya metode partisipatori didasari atas pemikiran, bahwa di samping sebagai objek, peserta didik seharusnya juga diposisikan sebagai subjek dari pendidikan itu sendiri. Seorang guru harus berusaha ke arah demikian. "Partisipatori beranggapan, bahwa: (1) setiap siswa adalah unik, mempunyai kelebihan dan kekurangan. Karena itu penyeragaman dan penyamarataan justru akan membunuh keunikan tersebut. Keunikan harus diberi tempat dan dicarikan peluang agar dapat le-bih berkembang, (2) anak bukanlah orang dewasa dalam bentuk kecil. Jalan pikiran anak tidak selalu sama dengan jalan pikiran orang dewasa. Karena itu orang dewasa harus dapat menyelami cara merasa dan cara berpikir anak, (3) dunia anak adalah dunia bermain, dan 4) usia anak merupakan usia yang paling efektif dalam hidup manusia. Ciri-ciri metode partisipatori adalah: (1) belajar dari realitas dan pengalaman, (2) tidak menggurui, dan (3) bersifat dialogis" (Suyanto,2004:36).

Selanjutnya, sesuai dengan terapan konsep partisipatori yang mana siswa adalah sebagai subjek, maka pendekatan prosesnya dilakukan dengan menerapkan pola induktif, dengan tahapan sebagai berikut: (1) persepsi, (2) identifikasi diri, (3) aplikasi diri, (4) penguatan diri, 5) pengukuhan diri, dan (6) refleksi diri.

2. Metode Komunikatif

Ada banyak pakar yang mengemukakan pendapat tentang komunikatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Komunikatif berasal dari makna leksikal yaitu komunikasi. Komunikasi adalah pengiriman dan

penerimaan pesan atau berita dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikatif sudah merupakan kata sifat (adjektif) yang berarti mudah dipahami dan dimengerti. Selanjutnya Maidar G Arsyad dan Mukti U.S mengategorikan komunikasi sesungguhnya terbagi dua, yaitu: 1) komunikasi ilmiah dalam dunia pendidikan dan formal dan 2) komunikasi nonilmiah dalam dunia non pendidikan.

Metoda komunikatif diistilahkan dengan desain. Desain yang sengaja diciptakan guru dalam membelajarkan siswa. Desain bermuatan komunikatif harus mencakup semua aspek keterampilan berbahasa, termasuk aspek keterampilan berbi-cara. Setiap tujuan pembelajaran dispesifikasikan ke dalam produk akhir, berupa sebuah informasi yang dapat dipahami, ditulis, diutarakan atau disajikan (Suyanto,2004:24).

3. Debat

Secara etimologis debat berasal dari bahasa Inggris, yaitu *debate* (noun). Debating berarti perdebatan. Debater adalah orangnya; orang yang suka berdebat (Echlos, M.John dan Hasan Shadili, 2003:167).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), debat diartikan sebagai pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Berdebat adalah bertukar pikiran tentang suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat (Alwi, dkk, 2000:242).

Bagi seorang guru bahasa, keriuhan kelas karena siswanya sedang berdebat jelas merupakan sebuah keberhasilan. Berdebat yang dimaksud adalah berdebat dalam batas toleransi yang terkendali dalam pengelolaan.

Keberhasilan dimaksud adalah siswa berani berargumentasi dengan alasan-alasan yang logis, ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. Bila hal ini tercipta, maka satu masalah dalam hal aktualisasi diri siswa dalam kompetensi berbicara sudah teratasi.

Terlepas dari kekurangan dan kelemahannya, teknik debat cocok diintegrasikan ke dalam metode partisipatori dan komunikatif. Partisipatori lebih fokus ke dukungan moral, sedang komunikatif fokus kepada proses.

Secara umum Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran Menurut BSNP adalah:

a) Pengelolaan Kelas

- 1) Guru mengatur tempat duduk sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, serta aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan.
- 2) Volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran harus dapat didengar dengan baik oleh peserta didik.
- 3) Tutur kata guru santun dan dapat dimengerti oleh peserta didik.
- 4) Guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik.
- 5) Guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, keselamatan, dan keputusan pada peraturan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran.
- 6) Guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respons dan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung.
- 7) Guru menghargai pendapat peserta didik.
- 8) Guru memakai pakaian yang sopan, bersih, dan rapi.

- 9) Pada tiap awal semester, guru menyampaikan silabus mata pelajaran yang diampunya.
 - 10) Guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.
- b) Pelaksanaan Pembelajaran
- Kegiatan Pendahuluan
- Dalam kegiatan pendahuluan, guru melakukan sebagai berikut ini.
- 1) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran.
 - 2) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari.
 - 3) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai.
 - 4) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.
- Kegiatan Inti
- Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.
- c) Eksplorasi
- Dalam kegiatan eksplorasi, guru:
- 1) melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam takambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber;
 - 2) menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain;

- 3) memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya;
 - 4) melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran;
 - 5) memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan.
- d) **Elaborasi**
- Dalam kegiatan elaborasi, guru:
- 1) membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna;
 - 2) memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis;
 - 3) memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut;
 - 4) memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif;
 - 5) memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar;
 - 6) memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok;
 - 7) memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan variasi; kerja individual maupun kelompok;
 - 8) memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, serta produk yang dihasilkan;
 - 9) memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik.

e) Konfirmasi

Dalam kegiatan konfirmasi, guru melakukan kegiatan sebagai berikut.

- 1) memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik;
- 2) memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber;
- 3) memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan;
- 4) Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar;

Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan penutup, guru:

- a) bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran;
- b) melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram;
- c) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;
- d) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik;
- e) menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

Strategi Pelaksanaan

BAB III IMPLEMENTASI RENCANA

A. Rancangan Program

Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, perlu dilakukan kegiatan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses. Materi kegiatan ini difokuskan pada latihan praktik pengelolaan kelas dan pelaksanaan pembelajaran menurut standar proses BSNP serta lebih ditekankan pada cara guru memotivasi siswa untuk bertanya atau mengemukakan pendapat secara lisan. Contoh, format materi sosialisasi tersebut sebagai berikut ini.

NO	Waktu	Materi	Fasilitator	Sasaran
1.		Menyiapkan Administrasi	Panitia	KKG Bhs.
2.		Pengadaan Bahan	Panitia	KKG Bhs
3.		Pencarian dana	Panitia	KKG Bhs
4		Pelaksanaan Program	Panitia	KKG Bhs

B. Menyiapkan Administrasi

Untuk penyelenggaraan kegiatan ini disiapkan segala administrasi yang dibutuhkan antara lain berikut ini.

1. Persetujuan Kepala Sekolah
2. Menerbitkan SK Panitia Pelaksana
3. Menyurati dan Menentukan Nara Sumber / Fasilitator
4. Surat pemberitahuan pada masing-masing KKG.

C. Pengadaan Bahan

Bahan dan alat yang diperlukan untuk kegiatan ini adalah:

1. Copy Permen nomor 41 tahun 2007
2. ATK
3. CD demonstrasi pembelajaran.

D. Sumber Dana

Sumber dana untuk operasional kegiatan ini, berasal dari dana Komite Sekolah

E. Pelaksanaan Program

Yang perlu diperhitungkan dalam pelaksanaan program ini adalah batasan anggaran, ketersediaan waktu, dan volume pekerjaan. Di samping batasan akhir atau (dead line) anggaran, perlu juga dipertimbangkan daya guna dan mamfaat hasil kegiatan; apakah bermamfaat bagi guru, sekolah dan pemangku kepentingan.

BAB IV PENUTUP

A. Evaluasi.

Evaluasi terkait dengan pemantauan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam perencanaan dengan hasil yang dicapai. Proses ini sekaigus sebagai upaya pemberdayaan serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparat pemantauan dan evaluasi di berbagai tingkatan secara sinergis dan berkesinambungan sehingga program pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik dalam waktu yang ditentukan.

Evaluasi dilakukan dengan cara berikut ini.

1. Membandingkan keberhasilan proses sebelum dan sesudah memperbaiki metode, berupa metode partisipatori, metode komunikatif dengan mengintegrasikan debat ke dalam dua metode tersebut.
2. Membandingkan perubahan tingkah laku siswa dalam kemauan bertanya dan mengemukakan pendapat secara lisan sebelum dan sesudah melaksanakan proses.

B. Monitoring

1. Monitoring proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilai hasil pembelajaran.
2. Monitoring dilakukan dengan cara diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara dan dokumentasi.

3. Kegiatan monitoring dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas serta dibantu oleh wakil kepala urusan kurikulum.

C. Rekomendasi

Berdasarkan uraian pada tahapan-tahapan yang dilakukan pada bagian terdahulu, maka rekomendasinya berikut ini.

- a. Guru perlu terus menerus memantau dan mengevaluasi keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran.
- b. Guru perlu memperbaiki cara, strategi, metode yang tepat untuk memancing siswa terlibat aktif dalam pembelajaran khususnya dalam bertanya dan mengemukakan pendapat secara lisan.
- c. Guru secara kreatif perlu terus menerus berupaya mencari dan menemukan metode yang tepat untuk diimplementasikan dalam proses pembelajaran.
- d. Guru perlu memahami amanat Permen No. 41 tahun 2007 tentang Standar Proses sebagai bagian dari delapan Standar Nasional Pendidikan yang juga merupakan amanat dari PP No. 19 Tahun 2005.

**“UPAYA PENINGKATAN DAYA SERAP MATA PELAJARAN
IPA
SISWA SMP KOTA SUNGAI PENUH”**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana kita ketahui bahwa perencanaan merupakan sebuah proses penentuan dalam waktu yang akan datang, hal apa yang harus diselesaikan dan bagaimana hal itu harus diwujudkan. Suatu perencanaan itu mencakup penyelesaian tujuan-tujuan dan menetapkan bagaimana mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Perencanaan pendidikan itu mulai dimaknai ketika sesuatu dibutuhkan untuk tujuan tertentu yang melibatkan keterampilan dan pengetahuan manusia. Kebutuhan tertentu itu lah yang menjadi satu tujuan atau sasaran yang menuntut langkah-langkah pencapaiannya. Perencanaan untuk memberikan keterampilan dan kemampuan untuk tujuan tertentu merupakan peran dari perencanaan pendidikan.

Dapat diartikan bahwa asal mula perencanaan erat hubungannya dengan rencana dan tujuan pendidikan itu sendiri, walaupun perencanaan maupun pendidikan dahulu belum seperti yang ada sekarang, tetapi kegiatan yang ada dalam perencanaan pendidikan selalu mendukung terhadap kemajuan pendidikan sehingga meninggalkan warisan mengenai cara-cara pemecahan permasalahan dalam pendidikan.

Perencanaan pendidikan muncul akibat semakin ruwet dan kompleksnya permasalahan pendidikan yang timbul dalam masyarakat sehingga membutuhkan suatu

pengelolaan yang terstruktur dan komprehensif. Disamping itu, ada keinginan positif untuk membawa pendidikan pada situasi tertentu yang lebih baik dan bermutu dan tentu saja merupakan hasil kajian dan analisis situasi terbaru.

Secara nasional masalah rendahnya mutu pendidikan di sekolah merupakan sebuah isu nasional, dan harus segera dicari alternatif solusi pemecahannya. Di antara permasalahan pendidikan di Indonesia adalah menyangkut masalah 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan PP No.19 tahun 2005 Pasal 2, di antaranya (1). Standar Isi, (2). Standar Proses, (3). Standar Kompetensi Kelulusan, (4). Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5). Standar Sarana dan Prasarana, (6). Standar Pengelolaan, (7). Standar Pembiayaan dan (8). Standar Penilaian pendidikan.

Berdasarkan data, bahwa di Kota Sungai Penuh terdapat 10 (sepuluh) buah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan 3.841 orang siswa dan 48 orang guru IPA, semuanya sangat perlu diperhatikan karena masih banyak persoalan-persoalan yang berkaitan dengan peningkatan mutu sekolah yang perlu disentuh dan diperbaiki serta dikembangkan. Di antara persoalan-persoalan yang banyak ditemui di SMP Kota Sungai Penuh adalah kurangnya pemerataan guru, kualifikasi guru yang masih kurang, disiplin dan etos kerja guru yang masih rendah, serta masih banyak guru yang mengajar dengan menggunakan metode konvensional serta kurang lengkapnya fasilitas perpustakaan dan laboratorium. Yang pada muaranya menyebabkan rendahnya daya serap siswa dalam pembelajaran. Daya serap mata pelajaran IPA pada SMP Negeri dalam Kota Sungai Penuh berdasarkan hasil survey data yang kami peroleh masih sangat rendah, dan perlu

dengan segera di atasi dan cari jalan keluar, agar daya serapnya bisa meningkat, melebihi Standar Ketuntasan Belajar Minimal (SKBM) mata pelajaran IPA yang telah ditetapkan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada sekolah masing-masing.

1.2. Kondisi Rill dengan Data

Dari hasil pendataan pada SMP Negeri dalam Kota Sungai Penuh diperoleh data nilai rapor siswa semester ganjil tahun pelajaran 2007/2008 sebagai berikut ini.

No	Nama Sekolah	Rom- bel	Jumlah Guru IPA	Jumlah Siswa	Nilai IPA Siswa		Daya Serap MP IPA
					≤ 6	> 6	
1.	SMPN 1 Sungai Penuh	18	5	634	309	325	51,26%
2.	SMPN 2 Sungai Penuh	20	8	743	423	320	43,07%
3.	SMPN 3 Sungai Penuh	14	7	359	212	147	40,95%
4.	SMPN 4 Sungai Penuh	12	4	326	203	123	37,73%
5.	SMPN 5 Sungai Penuh	7	5	255	136	119	46,67%
6.	SMPN 6 Sungai Penuh	8	3	256	144	112	43,75%
7.	SMPN 7 Sungai Penuh	9	4	295	189	106	35,93%
8.	SMPN 8 Sungai Penuh	11	3	415	212	203	48,91%
9.	SMPN 9 Sungai Penuh	9	6	293	197	96	32,76%
10.	SMPN 10 Sungai Penuh	9	3	265	154	111	41,89%
Jumlah / Rata-rata		117	48	3.841	2.179	1.662	43,27%

Berdasarkan hasil pendataan di atas, rendahnya daya serap mata pelajaran IPA pada siswa SMP di Kota Sungai Penuh diperkirakan disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya sebagai berikut ini.

1. Banyaknya guru yang mengajar tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki.
2. Masih banyak guru yang dalam proses pembelajaran masih menggunakan metode konvensional (metode ceramah) yakni berkisar 37 dari 48 orang guru IPA (77,08 %).

Tidak lengkapnya fasilitas (alat dan bahan) laboratorium IPA di SMP dalam Kota Sungai Penuh.

1.3. Definisi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan data di atas dapat kami ambil permasalahan yang perlu segera dicari solusi penyelesaiannya di antaranya: **“RENDAHNYA DAYA SERAP MATA PELAJARAN IPA SISWA SMP KOTA SUNGAI PENUH TAHUN PELAJARAN 2007/2008”** .

BAB II DESAIN RENCANA

2.1. Konsep dan Desain Perencanaan

Berdasarkan kenyataan yang ada, kondisi laboratorium IPA SMPN dalam Kota Sungai Penuh sangat memprihatinkan. Dari 10 buah SMPN dalam Kota Sungai Penuh semuanya sudah memiliki ruang laboratorium IPA, namun fasilitas yang mendukung kelancaran proses pembelajaran semuanya masih sangat kurang, sehingga proses pembelajaran IPA di SMPN dalam Kota Sungai Penuh tidak berjalan sebagai mana yang diharapkan. Misalnya: pokok bahasan IPA yang seharusnya diajarkan melalui metode praktek di laboratorium dilakukan dengan metode ceramah (metode konvensional), sehingga hasil pembelajaran tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan nilai rapor siswa SMPN dalam Kota Sungai Penuh Kelas VII sampai dengan kelas IX (semester 1 s/d 5) ternyata diperoleh lebih kurang 56,73 % siswa SMPN dalam Kota Sungai Penuh yang memperoleh nilai mata pelajaran IPA ≤ 6 , sedangkan yang memperoleh nilai mata pelajaran IPA > 6 hanya lebih kurang 43,27 % dari 3.841 orang siswa SMPN dalam Kota Sungai Penuh.

Berdasarkan data di atas, dapat disampaikan bahwa daya serap Mata Pelajaran IPA siswa SMPN dalam Kota Sungai Penuh yang tuntas dalam proses pembelajaran yakni yang memperoleh nilai di atas Standar Ketuntasan Belajar Minimum (SKBM) adalah sebesar 43,27 %. Salah satu faktor dominan penyebab rendahnya daya serap siswa SMPN dalam Kota Sungai Penuh adalah Fasilitas (alat dan bahan) Laboratorium sehingga membuat guru dalam melaksanakan proses pembelajaran masih menggunakan metode

konvensional seperti metode ceramah, yang tidak sesuai dengan tuntutan kurikulum, yang seharusnya dilakukan dengan menggunakan metode praktikum.

Solusi yang kita harapkan, dengan melengkapi fasilitas (alat dan bahan) laboratorium IPA SMP, guru-guru IPA bisa mengajarkan atau melakukan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum, dan pada muaranya daya serap siswa dalam pembelajaran IPA dapat meningkat.

2.2. Evaluasi Perencanaan

Dalam rangka meningkatkan daya serap mata pelajaran IPA SMP Negeri dalam Kota Sungai Penuh, salah satu solusi yang paling tepat yang perlu diselesaikan sesegera mungkin adalah melengkapi fasilitas (alat dan bahan) laboratorium IPA, disamping pelatihan guru-guru IPA dalam menggunakan fasilitas laboratorium. Karena dengan melengkapi fasilitas (alat dan bahan) laboratorium IPA, guru-guru IPA bila melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum dan sebagian besar materi pelajaran di ajarkan dengan metode praktikum di laboratorium. Pada akhirnya daya serap siswa terhadap materi pelajaran IPA dapat meningkat sesuai dengan yang diharapkan, atau memenuhi SKBM.

2.3. Spesifikasi Perencanaan

Untuk terlaksananya proses pembelajaran mata pelajaran IPA di SMP Negeri dalam Kota Sungai Penuh dengan baik sesuai dengan tuntutan kurikulum dan Standar Nasional Pendidikan tentang Standar sarana dan prasarana khususnya laboratorium, maka melengkapi fasilitas (alat dan bahan) merupakan solusi yang tidak bisa tawar-tawar lagi. Sehingga kesulitan guru-guru IPA dalam pembelajaran mata

pelajaran IPA dapat teratasi, akhirnya siswa diharapkan mampu menyerap materi ajar lebih banyak dan ketuntasan belajar sesuai dengan Standar Ketuntasan Belajar Minimum dapat terpenuhi.

Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan maka Standar Sarana dan Prasarana fasilitas laboratorium IPA untuk masing-masing SMP adalah berikut ini.

a. Bidang Materi Biologi

No.	Nama Alat dan bahan	Jumlah	Harga / paket (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1.	Alat Peraga Biologi 1	10 paket	3.975.000,-	39.750.000,-
2.	Alat Peraga Biologi 2	10 paket	6.400.000,-	64.000.000,-
3.	Alat Peraga Biologi 3	10 paket	8.750.000,-	87.500.000,-
Jumlah		30 paket	19.125.000,-	191.250.000,-

b. Bidang Materi Fisika

No.	Nama Alat dan bahan	Jumlah	Harga / paket (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1.	Alat Peraga Mekanika	10 paket	2.475.000,-	24.750.000,-
2.	Alat Peraga Kelistrikan & Magnetika	10 paket	2.850.000,-	28.500.000,-
3.	Alat Peraga Optika	10 paket	1.250.000,-	12.500.000,-
4.	Alat Peraga Hidrostatika & Panas	10 paket	1.250.000,-	12.500.000,-
5.	Alat Penunjang Fisika	10 paket	1.900.000,-	19.000.000,-
Jumlah		50 paket	9.725.000,-	97.250.000,-

Berdasarkan data di atas, untuk melengkapi fasilitas (alat dan bahan) pada laboratorium IPA sebuah SMP diperlukan dana sebesar Rp.288.500.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Untuk melengkapi fasilitas (alat dan bahan) laboratorium untuk 10 unit SMP Negeri dalam Kota Sungai Penuh diperlukan dana sebesar Rp. 2.885.000.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Daftar nama-nama Alat dan Bahan Laboratorium dan harga sebagaimana pada terlampir.

No	Nama Alat/Bahan	Satuan	Harga Satuan	Total Harga
1
2
3
4
5

Daftar nama-nama Alat dan Bahan Laboratorium dan harga

No	Nama Alat/Bahan	Satuan	Harga Satuan	Total Harga
6
7
8
9
10

...

BAB III IMPLEMENTASI RENCANA

3.1. Implementasi Rencana

Untuk lebih terarahnya, perencanaan ini maka ada beberapa hal yang perlu di dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan di atas.

a. Program Pelaksanan Perencanaan

Untuk menyelesaikan permasalahan di atas dilakukan dengan pengadaan fasilitas (alat dan bahan) laboratorium pada tiap-tiap SMP Negeri dalam Kota Sungai Penuh.

Mengingat besarnya dana yang diperlukan dalam pelaksanaan pengadaan fasilitas ini yakni sebesar Rp. 2.885.000.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah), maka kami menargetkan dalam waktu 3 (tiga) tahun anggaran semua fasilitas laboratorium pada 10 buah SMP Negeri dalam Kota Sungai Penuh telah terpenuhi sesuai dengan tuntutan Standar Sarana dan Prasarana pada Standar Nasional Pendidikan, dengan rincian tahapan pengadaan sebagai berikut ini.

NO	Tahap	Tahun Anggaran	Nama Alat & Bahan	Jumlah Dana (Rp)
1.	I	2009	Alat Peraga Biologi 1 & 2	1.037.500.000,-
2.	II	2010	Alat Peraga Fisika	875.000.000,-
3.	III	2011	Alat Peraga Biologi 3	972.500.000,-
Jumlah Dana Keseluruhan				2.885.000.000,-

b. Menyiapkan Administrasi

Untuk terarahnya pelaksanaan perencanaan ini disiapkan semua administrasi berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan alat dan bahan laboratorium diantaranya: Persetujuan dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh, yang termuat dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh untuk 5 (lima) tahun mendatang, yang pelaksanaannya terinci dalam mulai tahun 2009 s.d 2014.

c. Pelaksana Pengadaan Barang

Alat dan Bahan laboratorium IPA SMP dalam Kota Sungai Penuh akan dilaksanakan oleh pihak ketiga (CV atau PT) yang memenuhi kriteria dalam pengadaan Alat dan Bahan Laboratorium sesuai dengan Permendiknas No. 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan.

d. Sumber Dana

Dana yang dibutuhkan dalam pengadaan Alat dan Bahan Laboratorium IPA SMP dalam Kota Sungai Penuh akan diperoleh dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Sungai Penuh tahun Anggaran 2009, 2010 dan 2011, sesuai dengan tahapan pengadaan di atas.

Jadwal Pelaksanaan

No	Kegiatan	2008	2009
1	Menyiapkan Administrasi	v	v
2	Pengadaan Barang		v
3	Pelaksanaan		

3.2. Memantau dan Umpan Balik Perencanaan

Setelah selesai pelaksanaan pengadaan alat dan bahan laboratorium IPA SMP dalam Kota Sungai Penuh setiap tahapan akan dipantau dan diawasi serta dibimbing untuk penggunaan alat dan bahan tersebut oleh pihak terkait, mulai tahap I : 2009, tahap II : 2010 dan tahap III : 2011.

Dalam rangka memantau pelaksanaan rencana dan umpan balik, akan dilakukan monitoring pelaksanaan pengadaan alat dan bahan laboratorium IPA SMP, sekaligus mengevaluasi tentang alat dan bahan laboratorium IPA SMP yang telah dibeli oleh pihak ketiga yang ditunjuk, apakah sudah sesuai dengan standar alat dan bahan atau tidak.

Setelah pengadaan tahap I dilakukan pada tahun 2009, maka untuk tahun 2010 akan dilaksanakan lebih sempurna lagi setelah mengevaluasi pelaksanaan tahap I pada tahun 2009, begitu pula untuk tahap III tahun 2011.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah selesai pengadaan alat dan bahan laboratorium IPA SMP Negeri dalam Kota Sungai Penuh dapat disimpulkan sebagai berikut ini.

1. Pada tahun 2011 semua alat dan bahan laboratorium IPA SMP dalam Kota Sungai Penuh telah tersedia sesuai dengan Permendiknas No. 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan (Sarana dan Prasarana Laboratorium IPA).
2. Dengan lengkapnya sarana dan prasarana laboratorium IPA SMP, diharapkan para guru-guru IPA dapat melaksanakan proses pembelajaran IPA SMP sesuai dengan ketentuan kurikulum, dengan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SMP dalam Kota Sungai Penuh.
3. Setelah proses pembelajaran IPA SMP dapat dilaksanakan sesuai dengan tuntutan kurikulum, diharapkan **daya serap siswa** pada mata pelajaran IPA SMP dapat meningkat yakni memperoleh nilai di atas Standar Ketuntasan Belajar Minimum (SKBM).

Lampiran 2

PENGHITUNGAN INDEKS PENDIDIKAN (APK,APM)

Depdiknas memberikan indikator pemerataan (dan perluasan) pendidikan pada tiga hal yaitu:

1. Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), yaitu persentase jumlah siswa pada suatu satuan pendidikan terhadap jumlah penduduk usia yang berkaitan, baik secara agregat maupun menurut karakteristik siswa. Data Susenas 2003 menunjukkan, sampai dengan tahun 2003, rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun sampai ke atas mencapai 7,1 tahun, dan proporsi penduduk berusia 10 tahun yang berpendidikan SLTP ke atas masih sekitar 36,2%. Sementara, angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas sebesar 10,12%.

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Definisi : Persentase jumlah siswa seluruhnya terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang tertentu.

APK SM dihitung dengan rumus:

$$APK \text{ SM} = \frac{(\text{S Siswa Seluruhnya})}{(\text{S Penduduk 16-18})} \times 100\%$$

APK Dikdas dihitung dengan rumus :

$$APK \text{ Dikdas} = \frac{(\text{S Seluruhnya})}{(\text{S Penduduk 7-15})} \times 100\%$$

2. Angka Partisipasi Murni (APM) yaitu jumlah persentase jumlah siswa pada usia sekolah tertentu terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada suatu satuan pendidikan, baik secara agregat maupun menurut karakteristik siswa. Data Susenas 2003 menunjukkan bahwa APM pada tahun 2003 mencapai hampir 93% untuk SD, 63,5% untuk SMP, 54,32% untuk SM lanjutan, dan 14,26% untuk Perguruan Tinggi.

Angka Partisipasi Murni (APM)

Definisi : Persentase jumlah siswa usia sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada suatu jenjang sekolah.

Siswa Usia Sekolah Pendidikan Dasar (DIKDAS) 7-15 Tahun.
Siswa Usia Sekolah Menengah (SM) 16-18 Tahun.

Besarnya APM Dikdas dihitung dengan rumus:

$$\text{APM Dikdas} = \frac{(\text{S Siswa 7-15})}{(\text{S Penduduk 7-15})} \times 100\%$$

Besarnya APM SM dihitung dengan rumus:

$$\text{APM SM} = \frac{(\text{S Siswa 16-18})}{(\text{S Penduduk 16-18})} \times 100\%$$

3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) yaitu jumlah siswa pada kelompok usia tertentu yang terepresentasikan pada beberapa satuan pendidikan, baik secara agregat maupun menurut karakteristik siswa. Susenas 2003 menunjukkan APS penduduk kelompok usia 7-12 tahun adalah 9,4%, untuk kelompok usia 13-15 tahun adalah 81,0%, untuk kelompok usia 16-18 tahun mencapai 51,0%. Ditambah dengan dua indikator: 3 Khusus untuk perguruan tinggi, APM Indonesia di bawah Malaysia (28,26%) dan Thailand (31,92%).
4. Jumlah penerima beasiswa pada suatu satuan pendidikan atau suatu daerah tertentu, dengan tanpa membedakan beberapa variabel karakteristik siswa, seperti jenis kelamin, daerah, status sosial ekonomi, dan sejenisnya.
5. Kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan pada setiap satuan pendidikan, baik yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dari masyarakat Apabila dicermati, indikator-indikator dari isu pemerataan pendidikan di atas adalah baik, maju, dan canggih.

Kelemahannya adalah terlalu rumit untuk dilakukan penilaian sehingga tidak mudah bagi publik untuk menilai seberapa merata pembangunan pendidikan. Indikator pemerataan ini dapat disederhanakan sehingga mudah difahami dan diukur oleh publik. Dari berbagai model pengukuran pemerataan di bidang pembangunan ekonomi dapat dipergunakan, sehingga paling tidak ada dua indikator-sebagai berikut:

1. Jumlah sekolah per penduduk usia sekolah pada suatu kabupaten atau kota. Indikator ini dapat ditetilkkan menjadi jumlah sekolah jenjang tertentu terhadap usia sekolah pada jenjang sekolah tertentu. Misalnya, jumlah SD adalah 20, sementara anak usia SD adalah 8.000. Jika setiap SD hanya punya satu kelas pada setiap jenjang, dan setiap kelas mempunyai murid maksimum 50 orang, maka daya tampung

dari SD di daerah tersebut adalah 20 (sekolah) x 50 (murid per kelas) x 6 (Kelas I sd VI) = 6000 orang. Artinya, tingkat pemerataan di daerah tersebut untuk pemerataan pendidikan SD adalah $6.000/8.000 \times 100\%$, atau 75%. Formula ini pun dapat dikembangkan dengan kapasitas pendidikan dengan angka partisipasi. Jadi, seandainya terdapat kapasitas 6.000, dan terdapat murid sekolah hanya 5.000, maka angka partisipasi adalah 83,33%. Tentu saja, formula ini dapat disempurnakan dengan memproyeksikan terhadap total jumlah anak usia sekolah dasar di daerah tersebut.

2. Jumlah guru per sekolah, per kabupaten atau kota. Apabila sebuah SD memerlukan 6 orang guru, dan terdapat 20 SD, maka diperlukan 120 orang guru. Jika terdapat hanya 80 orang guru, maka angka pemerataan adalah 66,67%

Angka Melanjutkan APM

Definisi : Persentase Jumlah lulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi

Besarnya AM pada tahun-*i*, dihitug dengan menggunakan rumus:

$$AM_i = \frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I Pada jenjang SLTP tahun- } i}{\text{Jumlah lulusan tingkat SD pada tahun } i} \times 100\%$$

Angka Mengulang (AU)

Definisi : Persentase jumlah siswa mengulang terhadap jumlah siswa

Besarnya AU pada tahun-*i*, dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AU_i = \frac{\text{Jumlah siswa mengulang tingkat pada Jenjang SD atau SLTP tahun- } i}{\text{Jumlah siswa pada jenjang SD Atau SLTP pada tahun } (i-1)} \times 100\%$$

Angka Putus Sekolah (APS)

Definisi : Persentase jumlah siswa yang berhenti sekolah (sebelum lulus) terhadap jumlah siswa

Besarnya APS pada tahun-*i*, dihitung dengan rumus:

$$APS_i = \frac{\text{Jumlah putus sekolah pada jenjang Pendidikan SD atau SLTP tahun } i}{\text{Jumlah siswa pada jenjang SD Atau SLTP pada tahun ajaran } (i-1)} \times 100\%$$

BIODATA PENULIS



Yahya, lahir di Kecamatan Porsea Kabupaten Tapanuli Utara (*sekarang menjadi Kabupaten Toba Samosir*) pada tanggal 7 Januari 1964. Putra ke tujuh dari sepuluh bersaudara pasangan Une Tambunan dan Koidah Marpaung (*keduanya almarhum*). Menikah dengan Sartiah Pulungan Guru SMPN 12 Padang dan dikaruniai dua orang putra dan seorang putri, Rahmat Feryadi (Mahasiswa), Anggi Aran Putra (Kls III SMP) dan Dian Lestari (Kelas 6 SD).

Pendidikan SD hingga SMP di Aek Kanopan, Kabupaten Labuhan Batu (Sumatera Utara) selesai tahun 1976 dan 1980. STM Jurusan Mesin Produksi di Balige Tapanuli Utara (Sumatera Utara) selesai tahun 1983. S1 Spesialisasi Pendidikan Teknik Mesin (dengan biaya Ikatan Dinas selama empat tahun) di FPTK IKIP Padang sekarang menjadi Universitas Negeri Padang (UNP) selesai tahun 1988 (ada penambahan 1 tahun untuk mahasiswa jalur tesis). S2 di IKIP Padang dengan Konsentrasi Manajemen Pendidikan dengan biaya TMPD dan selesai tahun 1998, S3 pada Program Studi Administrasi Pendidikan PPs di IKIP Bandung sekarang Universitas Pendidikan Indonesai (UPI) dan juga tercatat sebagai penerima BPPS, lulus tahun 2003.

Sejak tahun 1989 menjadi staf pengajar di Jurusan Pendidikan Seni Rupa FPBS IKIP Padang (sebagai tenaga luar biasa) sekaligus membantu mengelola peralatan dan mesin-mesin bantuan Bank Dunia XI di Jurusan itu. Diangkat menjadi staf pengajar (PNS) tahun 1990 di Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FPTK IKIP Padang dan juga tetap mengajar di Jurusan Pendidikan Seni Rupa. Sejak tahun 1993 atas izin PR II (waktu itu Bapak Dr. Sutjipto) pindah resmi ke Jurusan Pendidikan Seni Rupa FPBS IKIP Padang sampai sekarang dengan jabatan Lektor Kepala. Setelah lulus Program Doktor tahun 2003 mengajar pada PPs UNP untuk mata kuliah Ekonomi Pendidikan dan perencanaan pendidikan sampai sekarang.

Kegiatan di luar jam mengajar adalah Ketua Jurusan Seni Rupa FBSS UNP tahun 2003-2006, anggota senat Universitas 2004-sekarang, kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Sumbar 2006-sekarang dan Ketua LSM Educational Management System Watch (EMSW) 2004-sekarang, Sekretaris Umum Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan (ISMAPI) wilayah Sumatera Barat 2004-sekarang.

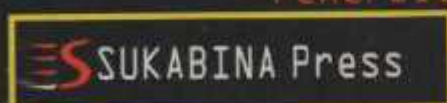
Karya Ilmiah; (1) *Pengenalan Logam-Logam Nonferro 1998* (buku), (2) *Pengaruh latar belakang pendidikan terhadap mata kuliah menggambar teknik 1998* (penelitian), (3) *Manajemen Pembiayaan Pendidikan (2003, Disertasi)* (4) *Satuan Biaya Pendidikan Padang Panjang (2004 Penelitian)*, *Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Kota Bukittinggi (2005 Penelitian)*, (5) *Anak kencing di batang pohon, analisis terhadap pengelolaan sekolah dasar* (artikel) *Pembiayaan Pendidikan di masa Krisis, suatu analisis* (artikel).

Buku *PERENCANAAN PENDIDIKAN: Pendekatan Empat Sepuluh* ditulis oleh Dr. Yahya, M.Pd. Seorang Doktor di bidang Ilmu Administrasi Pendidikan. Teori Perencanaan pendidikan dikembangkan dalam kegiatan sebagai dosen Program Studi Teknologi Pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang. Jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat memberikan pengalaman yang berharga untuk menerapkan teori Perencanaan Pendidikan. Keunggulan buku ini adalah paduan hasil perenungan teori perencanaan dari berbagai literatur dengan pengalaman penulis sebagai perencana, pelaksana, dan pengevaluasi kegiatan pendidikan.

Peningkatan kualitas hidup masyarakat lebih ditentukan oleh kualitas pendidikan masyarakat daripada ketersediaan fasilitas dan sumber daya alam. Sebagai kegiatan investasi, pelaksanaan pendidikan akan mendatangkan hasil di kemudian hari sesuai dengan mutu program pendidikan yang dijalankan. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan hendaknya direncanakan secara baik agar dapat diperoleh hasil pendidikan yang baik dan maksimal.

Buku ini menjelaskan berbagai teori perencanaan, pembahasan tentang keunggulan dan kelemahan setiap teori, contoh penerapannya dalam perencanaan di bidang pendidikan pada berbagai kasus. Oleh karena itu, buku ini dapat menjadi panduan dalam pembuatan perencanaan pendidikan bagi mahasiswa, guru, dosen, kepala sekolah, kepala dinas pendidikan, pemerhati pendidikan dan semua pihak yang bergerak di bidang pendidikan.

Penerbit



Telp - 0751 7894141-7811373
Jl. Prof. Dr. Hamka No. 72
Padang

ISBN 978 602 8124 17 1



978-602-8124-17-1